

GERAKAN PEMUDA PENTING UNTUK HADIRKAN PEMILU BERSIH DAN BERKUALITAS

MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI KONSTITUSI



MAJELIS

MPR RUMAH KEBANGSAAN

EDISI NO.02/TH.XVIII/II/2024



Pemilihan Presiden Tahun 2024

VERSI QUICK COUNT, PRABOWO SUBIANTO Gibran Rakabuming Raka Pemenangnya

ISSN 0854-6371



9 770854 637158

22 **Nasional**
Bansuet Tegaskan Harga
Keputusan Mahkamah Kontitusi

34 **Kajian MPR**
Serap Aspirasi para Pakar
di Bandung dan Depok

41 **Selangan**
Dari Daendels ke
Habibie

63 **Sosialisasi**
Fadel Sampaikan Tiga Pesan
untuk Masyarakat Gorontalo



MPR
RUMAH KEBANGSAAN
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA
DAN KEDAULATAN RAKYAT



Buku Digital MPR RI
SETJEN MPR RI

Daftar Isi



08 BERITA UTAMA

Pemenang Pilpres 2024 Versi Quick Count

Hasil quick count (hitung cepat) beberapa lembaga survei menunjukkan pasangan Capres dan Cawapres Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka menjadi pemenang dalam pemilihan presiden pada Pemilu 2024. Dari hasil hitung cepat beberapa lembaga survei itu, pasangan Prabowo - Gibran meraih suara melewati 50% plus satu. Apabila hasil real count nantinya sama dengan quick count maka Pilpres 2024 akan berlangsung satu putaran saja.



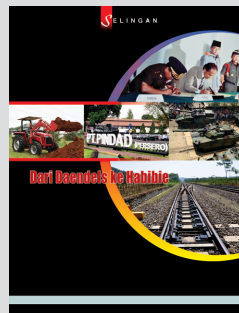
21 Nasional

HNW: Pentingnya Edukasi Etika Berpolitik



60 Sosialisasi

Bamsuet Ajak Cegah Keterbelahan Umat Beragama



41 SELINGAN

Dari Daendels ke Habibie



76 Wawancara

Ledia Hanifa Amaliah

Pengantar Redaksi	04
Perspektif	06
Kolom	38
Aspirasi Masyarakat	49
Gema Pancasila	54
Kolom	70
Varia MPR	72
Figur	78
Ragam	80
Dari Rumah Kebangsaan	82
Rehal	84



COVER

Edisi No.02/TH.XVIII/II/ 2024

Kreatif: Jonni Yasrul - Foto: Istimewa

Pengantar Redaksi

Prabowo - Gibran, Pemenang Pilpres 2024 Versi Quick Count

RAKYAT Indonesia telah menentukan pilihan. Pada Rabu, 14 Februari 2024, warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih telah menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Sekitar 204 juta warga negara Indonesia mempunyai hak pilih dalam Pemilu 2024 ini berbondong-bondong datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) mereka masing-masing. Di bilik suara, mereka memilih anggota DPR, anggota DPRD, anggota DPD, presiden dan wakil presiden, yang tertera di surat suara.

Kita bersyukur pemungutan suara Pemilu 2024 dapat berlangsung dengan aman dan tertib tanpa gangguan yang berarti. Rakyat pun antusias untuk menggunakan hak pilihnya dengan datang mencoblos di TPS. Tingkat partisipasi rakyat dalam Pemilu 2024 kali ini diperkirakan lebih tinggi dibanding Pemilu lima tahun lalu.

Beberapa saat setelah pencoblosan, lembaga-lembaga survei mulai bekerja, baik melakukan exit poll maupun quick count. Hampir semua stasiun televisi menayangkan hasil penghitungan cepat (*quick count*) dari beberapa lembaga survei. Lembaga-lembaga survei ini secara khusus menghitung cepat perolehan suara pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres). Pemilu 2024 ini diikuti tiga pasangan calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres), yaitu pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dan pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud Md.

Pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar diusung Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Ummat. Pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka diusung Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Gelora. Sedangkan pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud Md diusung PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Perindo, Partai Hanura.

Menjelang sore hari, hasil quick count Pilpres 2024 sudah bisa diketahui karena lembaga-lembaga survei sudah menghitung data sampel yang mendekati 100 persen data masuk. Lembaga-lembaga survei yang melakukan hitung cepat di antaranya LSI Denny J.A, Indikator Politik Indonesia, Poltracking, Populi Center, CSIS, SMRC, Charta Politica, PRC, dan Lembaga Survei Indonesia (LSI), dan Litbang Kompas. Hasil quick count oleh semua lembaga survey masing-masing menunjukkan angka yang tak begitu jauh berbeda.

Ringkasnya, dari quick count beberapa lembaga survei, pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar memperoleh suara dalam kisaran 24 – 26%, pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka meraih 57 – 59% suara, dan pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mendapatkan 16 – 17% suara. Dengan demikian, pasangan nomor urut 3 Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka menjadi pemenang Pilpres 2024 versi quick count.

Apabila nanti hasil real count KPU menunjukkan angka yang tak jauh berbeda dengan hasil quick count maka Pemilu 2024 bisa dipastikan akan berlangsung hanya satu putaran saja, karena sudah ada satu pasangan Capres dan Cawapres yang memperoleh suara 50% plus satu. Dalam UU nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 416 Ayat (1) disebutkan: "Pasangan calon terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari ½ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia".

Hasil penghitungan cepat ini bukanlah hasil resmi Pemilu 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai melakukan penghitungan suara secara berjenjang hingga akhir rekapitulasi hasil penghitungan suara pada 20 Maret 2024. Secara nasional, hasil Pemilu akan diumumkan setelah KPU menyelesaikan rekapitulasi suara. Mari kita menunggu pengumuman dan penetapan hasil Pemilu 2024 secara resmi dari KPU. □



PENASEHAT

Pimpinan MPR-RI

PEMIMPIN REDAKSI

Siti Fauziah

REDAKTUR PELAKSANA

Indro Gutomo

KOORDINATOR REPORTASE

Dhina Kurnia Winanda

FOTOGRAFER

Tim Medvis

SEKRETARIS REDAKSI

Djarot Widiarto

STAF DISTRIBUSI

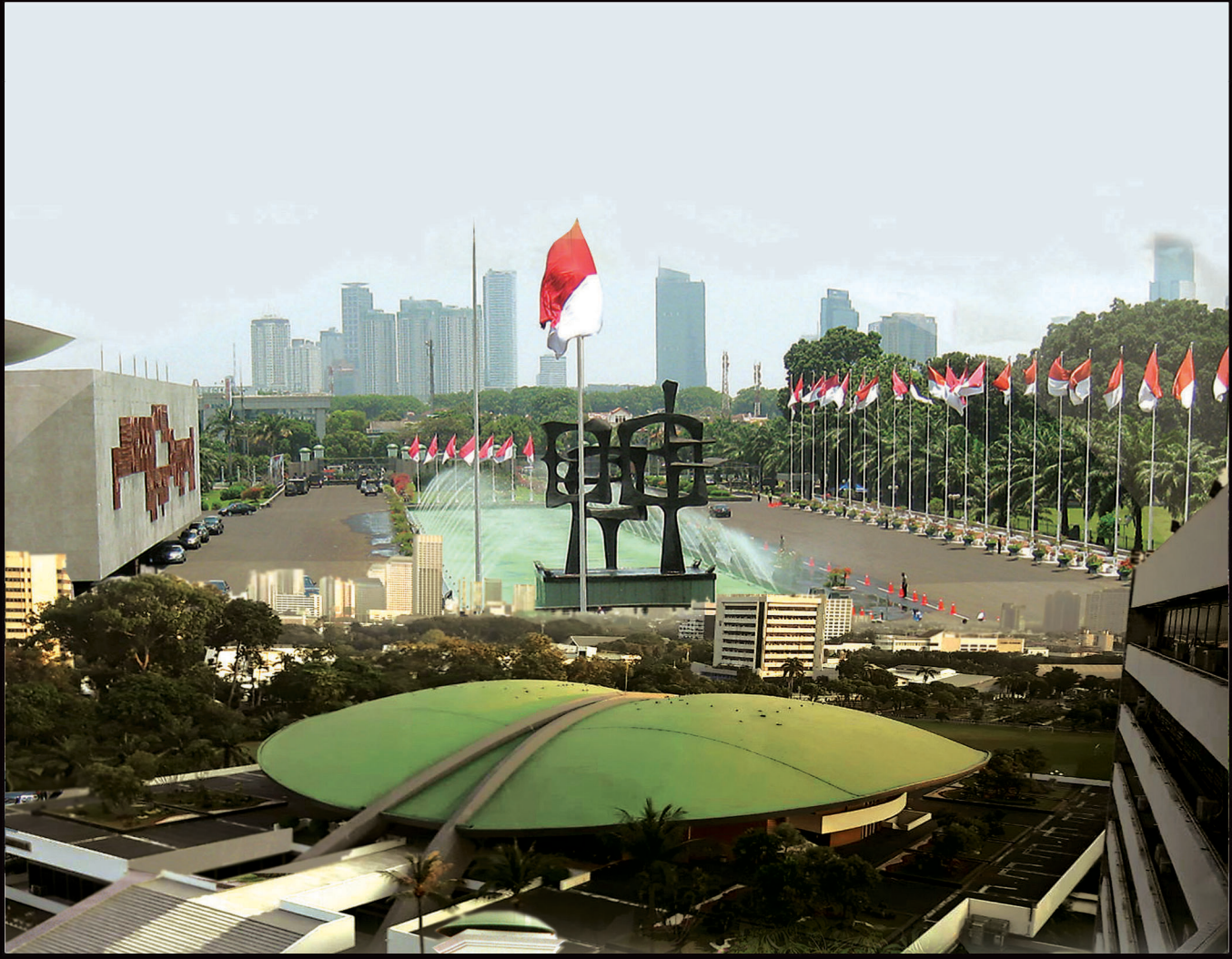
Amelia Rubinta, Ikhwani Bimo F

TIM AHLI

Syahriil Chili, Jonni Yasrul,
Ardi Winangun, Budi Sucahyo,
Derry Irawan, M. Budiono

ALAMAT REDAKSI

Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi,
Sekretariat Jenderal MPR-RI
Gedung Nusantara III, Lt. 5
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 6,
Senayan, Jakarta 10270.
Telp. (021) 57895237, 57895238,
57895251 Fax.: (021) 57895237
Email: pemberitaan@setjen.mpr.go.id



EMPAT PILAR MPR RI

- Pancasila Sebagai Dasar dan Ideologi Negara
- UUD NRI Tahun 1945 Sebagai Konstitusi Negara
- NKRI Sebagai Bentuk Negara
- Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Semboyan Negara

The infographic includes the MPR RI logo, the Garuda Pancasila, the Indonesian flag, and a map of Indonesia. It also features a photograph of the MPR RI building and a group of people in traditional attire.



Pangan dan Bijak Berutang, Membarui Prioritas di Tengah Ketidakpastian

DINAMIKA global yang nyata-nyata jauh dari ukuran ideal alias tidak kondusif cenderung memaksa setiap negara membarui prioritas kepentingan nasional masing-masing. Indonesia pun idealnya melakukan hal yang sama untuk meminimalisir eksekusi ketidakpastian global sekarang ini, utamanya terhadap kehidupan masyarakat. Fokus pada upaya peningkatan produktivitas tanaman pangan, serta lebih berhati-hati dalam pemanfaatan utang luar negeri menjadi pilihan yang bijak.

Dinamika global yang tidak kondusif saat ini disebabkan oleh perang atau konflik bersenjata di sejumlah kawasan, plus eksekusi atau dampak negatif perubahan iklim, utamanya terhadap sektor tanaman pangan. Semua dampak negatif itu nyata dan bisa dirasakan oleh setiap orang di sepanjang tahun 2023. Tahun-tahun mendatang pun masih sarat tantangan. Selain karena dampak perubahan iklim, dinamika global juga masih diwarnai dengan perang di berbagai kawasan.

Selain itu, muncul juga kecenderungan bahwa dinamika global yang tidak kondusif itu akan terus tereskalasi, mengacu pada beberapa indikator terbaru, termasuk yang muncul di Asia pada awal tahun 2024 ini, yakni hasil pemilihan umum di Taiwan yang menyebabkan para elit pemimpin di Tiongkok berang.

Layak menyebut sarat tantangan karena dunia saat ini masih terperangkap oleh gangguan pada aspek produksi dan suplai, disrupsi rantai pasok, gangguan lalu lintas barang dan jasa (distribusi), harga minyak (energi) yang tinggi, ancaman inflasi, perangkap suku bunga tinggi yang menggejala sejak Maret 2022, dan bayang-bayang krisis pangan karena produktivitas sektor tanaman pangan pada tingkat global pun terus mengalami penurunan. Dalam konteks Indonesia, fakta-fakta ini hendaknya digarisbawahi oleh para calon presiden yang berkontestasi pada Pemilu 2024.

Untuk meminimalisir eksekusi dari ragam tantangan itu, Indonesia sudah memprogramkan rencana impor tiga (3) juta ton beras. Total impor beras sebanyak itu secara tidak langsung menjadi penjelasan tentang adanya masalah serius dalam aspek ketahanan pangan. Program impor beras itu menjadi pilihan tak terhindarkan, karena volume produksi dalam negeri terus menurun. Badan Pusat Statistik (BPS)

mencatat, produksi padi pada 2023 diperkirakan 53,63 juta ton gabah kering giling (GKG). Setelah dikonversikan menjadi beras, total produksi beras tahun 2023 diperkirakan sebesar 30,90 juta ton.

Jumlah itu menandai penurunan produksi padi sebanyak 1,12 juta ton GKG atau 2,05% jika dibandingkan produksi padi tahun 2022 yang 54,75 juta ton GKG. Dengan begitu, produksi beras pada 2023 hanya sekitar 30,90 juta ton, atau turun 645,09 ribu ton ekuivalen 2,05%, jika dibandingkan dengan produksi beras tahun 2022 yang mencapai 31,54 juta ton.

Faktor menurunnya luas areal panen padi sangat penting untuk digarisbawahi dan ditangani melalui program berkelanjutan. Masih menurut BPS, luas areal panen padi per 2023 diperkirakan 10,20 juta hektar setelah mengalami penurunan seluas 255,79 ribu hektar, atau 2,45%, jika dibandingkan luas areal panen padi tahun 2022 yang mencapai 10,45 juta hektar.

Fakta tentang defisit produksi bahan pangan itu, khususnya beras, hendaknya ditangani dengan lebih sungguh-sungguh melalui program yang realistis. Tekad mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan jangan lagi dijadikan sekadar slogan. Telah diingatkan berulang kali bahwa perubahan iklim membawa dampak sangat serius, utamanya terhadap sektor tanaman pangan. Menurut perkiraan Organisasi Pangan Dunia (FAO), jika komunitas global gagal menangani persoalan seputar peningkatan suhu bumi, dunia akan menghadapi krisis pangan pada 2050.

Tidak elok jika para pemimpin era terkini mewarisi persoalan defisit produksi bahan pangan kepada generasi anak-cucu. Menyusunnya areal panen padi hendaknya mulai ditanggapi dengan program-program pemulihan kesuburan. Upaya meningkatkan produktivitas sektor tanaman harus dimulai sejak dini. Ingat, sejarah membuktikan bahwa dampak dari defisit bahan pangan akan melebar ke berbagai aspek, termasuk aspek politik serta aspek stabilitas, ketahanan, serta keamanan negara-bangsa.

Selain itu, pada era suku bunga tinggi sekarang ini, kebijakan utang luar negeri serta pengelolaan dan pemanfaatannya hendaknya dilandasi kehati-hatian, dengan tetap dan selalu berpijak pada skala

Dr. H. Bambang Soesatyo, SE., SH., MBA.

Ketua MPR RI



prioritas. Sebab, kecenderungan tingginya suku bunga acuan pada tingkat global diperkirakan berlangsung lebih lama. Faktor suku bunga yang tinggi berdampak pada naiknya beban pembayaran bunga utang luar negeri.

Total utang luar negeri Indonesia hingga akhir November 2023, sebagaimana catatan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), adalah Rp 8.041,01 triliun, dengan rasio terhadap PDB 38,11%. Pembayaran bunga utang pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 masih cukup tinggi, yakni mencapai Rp 441,4 triliun. Tingginya suku bunga saat ini tentu akan berdampak pada volume bunga utang di tahun-tahun mendatang.

Maka, kebijakan utang luar negeri saat ini dan seterusnya, idealnya, selalu berpijak pada skala prioritas, atau sebesar-besarnya untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Berutang ketika dinamika global sarat ketidakpastian seperti sekarang ini haruslah dilandasi pertimbangan yang arif lagi bijaksana. Karena itu, jangan gegabah memanfaatkan utang, dan mulailah lebih bersungguh-sungguh mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan.

Adalah fakta bahwa dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Sementara perang antara Israel dan militan Hamas di Gaza masih berlanjut, kawasan Laut Merah pun membara pada pekan kedua Januari 2024. Amerika Serikat (AS) dan Inggris menyerang beberapa wilayah Yaman sebagai respons terhadap penguasa negara itu, Houthi, yang menyerang kapal dagang di perairan itu. Houthi menembak rudal jelajah dari wilayah Yaman, dan AS mengklaim menembak jatuh rudal itu. Houthi bertekad akan terus melawan, dengan memastikan serangan terhadap kapal dagang yang melintasi perairan Laut Merah dan Terusan Suez

akan berlanjut.

Selain itu, Turki pada pekan kedua Januari 2024 pun mengerahkan kekuatan militernya, melancarkan serangkaian serangan udara terhadap situs-situs Kurdi di Irak utara dan Suriah sebagai respons atas kematian sembilan tentara Turki. Sedangkan di Gaza, Israel sudah memastikan bahwa perang melawan militan Hamas akan terus berlanjut selama beberapa bulan ke depan. Demikian pula dengan perang antara Rusia dan Ukraina yang masih berlanjut hingga kini.

Di Asia, benih eskalasi ketegangan sudah menampakkan wujudnya.. Sebagaimana sudah disimak bersama, pemilihan Presiden Taiwan pada Sabtu (13/1) telah menampilkan Lai Ching-te dari Partai Progresif Demokratik (DPP) sebagai pemenang, dengan meraih 40,1% suara. Dinilai sebagai sosok yang sering membuat masalah (troublemaker), sosok Lai jelas tidak disukai Beijing. Bahkan, sebelum Pemilu dimulai, para pemimpin di Beijing sudah memberi pernyataan tegas dan keras sebagai peringatan.

"Kami sampaikan kepada komunitas internasional bahwa antara demokrasi dan otoritarianisme, kami akan berpihak pada demokrasi," kata Lai. Pernyataan Lai ditanggapi juru bicara Kantor Urusan Taiwan di Beijing, Chen Binhua, dengan menegaskan kembali bahwa Taiwan merupakan wilayah yang tidak dapat dipisahkan dari kedaulatan integral Tiongkok.

Bisa ditebak bahwa setiap manuver pemimpin baru Taiwan pasti akan ditanggapi dengan keras dan tegas oleh Beijing. Maka, sudah barang tentu semua negara di kawasan secara tidak langsung 'dipaksa' untuk terus memantau eskalasi ketegangan Tiongkok-Taiwan dengan segala kemungkinan dan dampaknya. Itulah sekilas gambaran tentang dunia yang sedang tidak baik-baik saja. □

Pemilihan Presiden Tahun 2024

Versi Quick Count, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka Pemenangnya



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Hasil quick count (hitung cepat) beberapa lembaga survei menunjukkan pasangan Capres dan Cawapres Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka menjadi pemenang dalam pemilihan presiden pada Pemilu 2024. Dari hasil hitung cepat beberapa lembaga survei itu, pasangan Prabowo - Gibran meraih suara melewati 50% plus satu. Apabila hasil real count nantinya sama dengan cuick count maka Pilpres 2024 akan berlangsung satu putaran saja.

HUJAN mengguyur Jakarta dan daerah sekitarnya menjelang pagi pada hari Rabu itu. Pada hari itu, 14 Februari 2024, bertepatan dengan hari pemungutan suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Pada hari itulah rakyat menentukan pilihan setelah melewati minggu tenang sejak kampanye berakhir pada 10 Februari 2024. Rakyat menentukan pilihan di bilik suara setelah melalui ingar bingar kampanye Pemilu sepanjang 75 hari sejak November 2023. Langit mendung dan sesekali hujan rintik di Jakarta dan sekitarnya tak menyurutkan langkah rakyat menuju Tempat Pemungutan Suara (TPS) masing-masing.

Tak mengherankan bila TPS-TPS di seputaran Jakarta terlihat masih basah oleh sisa air hujan. Seperti TPS No. 10 RW 02 Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat. Beberapa orang panitia tampak masih mengepel lantai yang sedikit tergenang air. Kawasan Gambir diguyur hujan sejak pukul 03.00 WIB. Meski hujan belum reda, anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 10 ini sudah bersiap sejak pagi. Di TPS inilah, Presiden Joko Widodo melakukan pencoblosan surat suara Pemilu 2024.

Pasukan Pengamanan Presiden atau Paspampres sudah mensterilisasi lokasi pada pukul 06.00 WIB. Panitia juga telah memasang kotak suara hingga merapikan meja pendaftaran.

Paspampres sudah berjaga di sekitar TPS yang bernaung di bawah tenda berukuran lapangan futsal dan bernuansa merah putih. Tampak belasan kursi hijau, bilik suara, dan meja pendaftaran. TPS ini hanya berjarak sekitar 1 km dari Istana Kepresidenan.

Sekitar pukul 08.45 WIB, Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Iriana Joko Widodo tiba di TPS 10. Presiden dan Ibu Iriana langsung menuju meja pendaftaran untuk mengisi daftar hadir. Presiden kemudian duduk sejenak seraya menunggu giliran untuk menuju bilik pencoblosan. Tak lama, Presiden dan Ibu Iriana dipanggil dan menerima sejumlah surat suara yang akan dicoblos.

Presiden tampak terlebih dahulu membuka dan memeriksa surat suara sebelum masuk ke bilik suara. Usai mencoblos, Presiden dan Ibu Iriana memasukkan surat suara ke masing-masing kotak suara yang telah disediakan. Tak lupa, Presiden dan Ibu Iriana menyelupkan jari kelingking ke dalam tinta sebagai tanda telah menggunakan hak pilih dalam Pemilu 2024.

"Alhamdulillah baru saja saya bersama Ibu Iriana melakukan pencoblosan dalam rangka pemilihan presiden-wakil presiden, kemudian DPR RI, DPD RI, dan DPRD Jakarta," ujar Presiden kepada awak media usai pencoblosan.

Presiden berharap, Pemilu kali ini dapat menjadi pesta demokrasi



bagi rakyat Indonesia. Selain itu, Pemilu juga dapat berjalan dengan jujur dan adil, serta langsung, umum, bebas, rahasia (Luber). "Ini adalah pesta demokrasi. Kita berharap ini betul-betul menjadi pesta rakyat dan juga berlangsung dengan jujur, dengan luber, dan diikuti oleh seluruh rakyat Indonesia dengan kegembiraan, karena ini adalah pesta rakyat, pesta demokrasi," ucap Presiden.

Pemilu 2024 adalah pemilu yang diadakan serentak Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres). Pemilihan legislatif untuk memilih anggota legislatif (DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota). Namun, perhatian masyarakat lebih besar tertuju pada Pilpres, untuk memilih siapa yang akan menjadi Presiden RI periode 2024-2029. Pilpres 2024 diikuti tiga pasangan calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres).

Ketiga pasangan Capres dan Cawapres sesuai penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tersebut adalah pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang diusung Partai

Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Ummat. Kedua, pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang diusung Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, serta Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelora, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Prima, Partai Garuda. Ketiga, pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud Md diusung PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura, dan Partai Perindo.

Capres Anies Baswedan menggunakan hak suaranya di TPS 060 Waduk Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Anies bersama ibundanya Aliyah Rasyid dan istrinya Fery Farhati, berjalan kaki dari rumahnya menuju TPS yang hanya berjarak sekitar 500 meter. Anak-anaknya, Mutiara Annisa Baswedan dan Mikail Azizi Baswedan, serta menantunya Ali Saleh Alhuraiby ikut dalam rombongan. Mereka semuanya kompak mengenakan pakaian berwarna putih.

Tiba di TPS sekitar pukul 08.25 WIB, Anies sempat menyapa sejumlah warga yang ada

di sekitar TPS. Anies juga sempat menyapa awak media dengan melambaikan tangannya. Anies sempat memperlihatkan surat suara sebelum mencoblos. Setelah mencoblos, Anies bersama istri dan anak-anaknya keluar dari area TPS. Mereka juga mengangkat jari telunjuk yang telah dicelupkan ke tinta sebagai penanda sudah ikut mencoblos. Jari telunjuk yang dicelupkan ke tinta juga sebagai penanda angka satu.

Sedangkan pasangan Capres Anies Baswedan, Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, pagi itu mencoblos di TPS 23, RW 02, Kelurahan Bangka, Jakarta Selatan. Sekitar pukul 08.00 WIB, Cak Imin bersama istri dan tiga anaknya sudah tiba di TPS. Mereka tampak kompak mengenakan baju berwarna putih. Saat masuk ke area TPS terdengar suara sholawat dari para pendukungnya yang ikut dalam rombongan. Cak Imin menghampiri meja pendaftaran dan memperlihatkan surat undangan. Setelah itu mengantri menunggu giliran pencoblosan.

Usai mencoblos, Cak Imin mengungkapkan rasa Syukur karena bisa melaksanakan hak

pilihnya. Dia pun mengimbau kepada para pendukung untuk melaksanakan hak pilihnya di TPS masing-masing. Ia juga meminta agar para pendukungnya ikut memantau TPS. “Yang jelas semua harus siaga, siaga untuk mengawasi, mengawal sampai penghitungan akhir,” ujarnya.

Sementara itu, di Hambalang Bogor, Jawa Barat, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto melakukan pencoblosan di TPS 033 di dekat rumahnya. Sekitar pukul 08.57 WIB, Prabowo tiba di TPS. Ia mengenakan kemeja berwarna biru muda. Ia sempat menyapa warga sekitar dan melambaikan tangan ke arah awak media. Setelah itu, Prabowo mendaftar di tempat pendaftaran dan antri menunggu panggilan.

Tak berapa lama, dia dipanggil dan menerima surat suara. Prabowo sempat memeriksa surat suara secara hati-hati di bilik suara, lalu mencoblos kelima surat suara dan memasukkannya ke dalam kotak suara. Prabowo menyelesaikan pencoblosan dengan mencelupkan dua jari ke tinta. Dua jari adalah penanda pasangan nomor urut 2.

Barangkali agak berbeda dengan TPS-TPS lainnya, TPS tempat Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka bertema Valentine. Tanggal 14 Februari adalah hari Valentine atau hari kasih sayang. TPS 34 Manahan, Banjarsari, Solo, cukup unik. Ada empat bilik suara di TPS tersebut dan didominasi warna merah muda (pink – pink adalah warna Valentine) dan putih. Di tempat inilah Gibran Rakabuming Raka dan istri Selvi Ananda akan mencoblos surat suara Pemilu 2024.

Keduanya tiba di TPS 34 Manahan sekitar pukul 11.07 WIB. Pada kesempatan itu, Gibran mengenakan atasan lengan panjang bercorak dan bawahan hitam, sedangkan Selvi menggunakan atasan berwarna coklat dan celana hitam. Gibran lebih dulu masuk ke bilik suara untuk mencoblos, kemudian disusul Selvi. Usai mencoblos, Gibran memamerkan jari kelingkingnya yang telah dicelup ke tinta.

Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menggunakan hak suaranya dalam Pemilu di TPS 11 Kelurahan Lemponsari, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah. Ganjar datang bersama istrinya Siti Atikoh, dan putera semata wayang, Alam Ganjar. Ganjar dan Atikoh berbaju warna putih, sedangkan Alam

berkaus hitam. Alam juga tampak membawa sebuah kamera Polaroid. Tiba di TPS, ketiganya mengumbar senyum kepada warga sekitar.

Tiba di TPS, Ganjar didata oleh anggota TPS dan menunggu antrian untuk dipanggil ke dalam bilik suara. Setelah dipanggil, Ganjar menerima lima surat suara yang akan dicoblos. Ganjar pun menuju bilik suara untuk melakukan pencoblosan. Usai mencoblos, Ganjar menunjukkan jari kelingkingnya yang telah bertinta kepada awak media.

Sementara itu, Cawapres nomor urut 3 Mahfud Md menggunakan hak suaranya di TPS 106 Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta. Sekitar pukul 08.02 WIB, Mahfud Md bersama sang istri, Zaizatoen Nihayati, dan anak

2009, 2014, dan 2019), lembaga-lembaga survei melakukan hitung cepat (*quick count*), khususnya hitung cepat suara pemilihan presiden. Beberapa lembaga survei yang melakukan hitung cepat adalah LSI Denny JA, Poltracking, Indikator, CSIS, Populi Center, SMRC, Charta Politica, Litbang Kompas. Berikut beberapa hasil *quick count* beberapa lembaga survei.

Pada Jumat, 16 Februari 2024, hasil penghitungan cepat Pilpres 2024 dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA sudah masuk 100%. Perolehan suara pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mencapai 58,47%. Pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar memperoleh



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

bungsunya, Royhan Akbar, tiba di TPS yang bernuansa merah putih. Mahfud sempat menyapa warga sekitar sebelum mendaftar di tempat pendaftaran.

Beberapa saat, Mahfud Md mendapat panggilan dan menerima sejumlah kertas suara. Dia membuka lembaran kertas suara Capres dan Cawapres dan memperlihatkan ke awak media. Istri dan anak bungsunya menyusul dipanggil dan menerima surat suara. Mereka satu per satu masuk ke bilik suara untuk melakukan pencoblosan.

Quick Count

Satu hal yang ditunggu-tunggu masyarakat adalah penghitungan *quick count* dari lembaga-lembaga survei. Sama seperti pada pemilu sebelumnya (mulai Pemilu 2004,

24,99%. Kemudian pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo – Mahfud Md hanya 16,56% suara.

Quick count LSI Denny JA untuk Pilpres 2024 melibatkan 2.000 TPS yang tersebar di 38 provinsi dengan menggunakan metode multistage random sampling. Margin of error dalam *quick count* ini sebesar plus minus 1%. “Dengan data itu, Prabowo-Gibran disimpulkan LSI Denny JA menang Pilpres 2024 dalam satu putaran,” ujar pendiri LSI Denny JA, Denny Januar Ali, Jakarta, Jumat, 16 Februari 2024.

Lembaga Centre for Strategic and International Studies (CSIS) dan Cyrus Network juga telah merampungkan hitung cepat atau *quick count* Pilpres 2024 pada Jumat, 16 Februari 2024. Data sampel yang masuk



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

sudah 100%. Hitung cepat yang dilakukan CSIS menggunakan sampel 2.000 TPS yang tersebar di 38 provinsi. Sampel dipilih dengan metode multistage random sampling. Sedangkan tingkat kepercayaan 95%, dengan margin error 1%.

Hasilnya, pasangan nomor urut 2 Prabowo – Gibran unggul dengan persentase 58,25%, diikuti pasangan nomor urut 1 Anies – Muhaimin dengan 24,91%. Sedangkan pasangan nomor urut 3 Ganjar – Mahfud meraih 16,84%. “Berdasarkan data quick count Cyrus Network dan CSIS Indonesia ini, dapat disimpulkan bahwa Pilpres 2024 berlangsung satu putaran,” sebut keterangan tertulis CSIS dan Cyrus Network, pada Sabtu, 17 Februari 2024.

Pada Sabtu (17/2/2024) pukul 19:00 WIB, data yang telah masuk sebesar 100% pada lembaga survei Poltracking menunjukkan pasangan Prabowo-Gibran pemimpin suara sebesar 58,51%, sedangkan pasangan Anies-Cak Imin berada di urutan kedua dengan perolehan 25,13% suara, sementara Ganjar-Mahfud memperoleh suara 16,36%.

Lembaga survei Populi Center juga telah merilis hasil survei untuk Pilpres 2024 yang sudah mencapai 100%, pada Kamis, 15 Februari pukul 23.04 WIB. Hasilnya, pasangan nomor urut 2 Prabowo – Gibran unggul 59,08%, diikuti pasangan nomor urut 1 Anies – Muhaimin dengan meraih 25,06% suara, dan pasangan nomor urut 3 Ganjar – Mahfud dengan 15,86% suara.



Menanggapi hasil quick count, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengatakan, “masih terlalu dini untuk menyimpulkan apapun...jadi kita harus menunggu. Kami akan menunggu sampai ada hasil resmi, dan kami akan menghormatinya,” ujarnya dalam wawancara dengan media asing Al Jazeera, Sabtu, 17 Februari 2024.

Pun demikian Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Menanggapi hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, Ganjar Pranowo mengatakan, Tim Pemenangan Nasional (TPN) sedang bekerja mengawal suara di seluruh Indonesia. Dia optimistis dalam penghitungan suara yang nanti dilakukan KPU. Ia juga meminta semua pihak untuk menunggu proses penghitungan resmi. “Maka kita tunggu saja, nanti yang sifatnya teknis, kawan-kawan TPN yang sedang mempersiapkan,” jelasnya.

Hasil *quick count* sejumlah lembaga survei menempatkan perolehan suara Ganjar – Mahfud Md berada di posisi buncit. Menanggapi hal ini, Ganjar berseloroh, “Kamu percaya nggak suara saya segitu?” ujarnya sambil meninggalkan kerumunan wartawan di Posko Teuku Umar, Jakarta, Rabu, 14 Februari 2024.

Sebaliknya, Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto mengungkapkan rasa Syukur dan terima kasih mewakili tim dan Koalisi Indonesia Maju (KIM) kepada masyarakat yang telah mendukung Prabowo – Gibran. “Atas nama tim Prabowo – Gibran dan Koalisi Indonesia Maju, kita bersyukur atas hasil penghitungan cepat yang sudah ada,” katanya di Istora Senayan, Rabu sore, 14 Februari 2024.

Prabowo bersyukur atas hasil dari beberapa *quick count* dari lembaga survei yang menampilkan Prabowo – Gibran unggul dan berpotensi untuk menang satu putaran. “Semua lembaga survei menunjukkan angka-angka yang memang paslon Prabowo – Gibran menang sekali putaran,” ungkapnya.

Hasil quick count bukanlah hasil resmi Pemilu 2024. KPU sendiri melakukan *real count* dan penghitungan suara secara berjenjang dari tingkat kecamatan, hingga provinsi. Sesuai Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai 20 Maret 2024. □

MBO/BSC

Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Versi Quick Count

Profil Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka

PEMUNGUTAN suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sudah berlangsung pada Rabu, 14 Februari 2024. Penyelenggaraan Pemilu ini untuk memilih pasangan presiden dan wakil presiden, serta anggota legislatif di DPR, DPD, dan DPRD. Khusus untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, beberapa lembaga survei mengadakan quick count atau hitung cepat. Pada sore hari, ketika pengumpulan sampel suara sudah mencapai 100 persen, dari hasil hitung cepat sudah bisa diketahui pasangan Capres dan Cawapres yang unggul.

Pemilihan presiden 2024 diikuti tiga pasangan Capres dan Cawapres, yaitu: Pasangan nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar; pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka; dan pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Semua lembaga survei yang melakukan quick count menunjukkan hasil yang sama, yaitu pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul atas pasangan lainnya dan memperoleh suara 50 plus satu (lihat bagian pertama). Bila ternyata hasil real count yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nantinya sama dengan quick count maka pemilihan presiden hanya berlangsung satu putaran saja.

Berikut ini profil Capres Prabowo Subianto dan Cawapres Gibran Rakabuming Raka.

Prabowo Subianto

Pemilihan Presiden 2024 adalah kontestasi yang keempat kali diikuti Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra. Pertama kali Prabowo Subianto mengikuti Pilpres pada tahun 2009 sebagai Cawapres berpasangan dengan Capres Megawati Soekarnoputri. Pada saat itu, pasangan Megawati – Prabowo Subianto kalah dari pasangan Susilo Bambang Yudhoyono –



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Boediono. Kemudian pada Pemilu 2014, Prabowo Subianto kembali maju sebagai Capres berpasangan dengan Cawapres Hatta Rajasa berhadapan dengan pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Dan, Pilpres 2014 dimenangkan pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

Pantang menyerah, pada Pemilu 2019, Prabowo Subianto kembali maju sebagai Capres berpasangan dengan Sandiaga Uno sebagai Cawapres. Lagi-lagi, Prabowo Subianto kalah dari pasangan Joko Widodo dan K.H. Ma'ruf Amin. Kini, pada Pemilu 2024 yang baru saja berlangsung 14 Februari 2024, Prabowo Subianto kembali maju sebagai Capres berpasangan dengan Cawapres Gibran Rakabuming Raka. Berdasarkan quick count Pemilu 2024, pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengungguli dua pasangan capres/cawapres lainnya.

Sering tampil dalam kontestasi Pilpres dan tiga kali mengalami kekalahan, Prabowo Subianto bahkan sering dijadikan bahan olok-olok oleh lawan politiknya. Pertanyaan yang muncul, kenapa maju kembali dalam

Pilpres setelah berulang kali kalah? Mengapa terus mencoba walau kalah berkali-kali? Apakah ambisi meraih kekuasaan sebagai presiden? Pertanyaan ini pun diajukan Najwa Shihab dalam sebuah wawancara pada Juni 2023 yang diupload di kanal Youtube. Prabowo Subianto menjawab, "Dalam sisa hidup saya, saya ingin berbuat yang baik. Orang mau hina, mau olok-olok silakan. Saya tidak layani, dan saya tidak mau balas."

"Orang yang bertanya seperti itu tidak paham artinya seorang pendekar. Tidak paham seorang pejuang. Anda tidak bertanya kenapa Jenderal Soedirman tetap berjuang meski hanya satu paru-paru? Apakah Anda pernah bertanya tentang perjuangan Yos Soedarso, I Gusti Ngurah Rai yang sudah dikepung Belanda? Seperti mereka, saya tidak menyerah."

Pada kesempatan lain, Prabowo pernah berucap, "Jangan berpikir untuk kalah. Kalau berpikir kalah, artinya kita sudah kalah. Kalau mungkin kalah, tapi kalau kalah, jangan mengakui kau kalah, anggap saja kekalahan adalah kemenangan yang tertunda. Kalah menang itu biasa. Petarung terjatuh adalah

hal biasa. Petarung kadang-kadang jatuh, kadang-kadang K.O. Yang penting bukan jatuhnya, yang penting bagaimana kau berdiri kembali.”

Barangkali motivasi itu yang mendasari Prabowo Subianto. Perjalanan hidup Prabowo Subianto ibarat petarung, yang pernah kalah dan K.O, tetapi bisa bangkit kembali dan terus berjuang. Prabowo Subianto mengalami pasang surut kehidupan. Dari latar belakang kehidupannya, kita bisa mengambil banyak hikmah dan pelajaran. Prabowo Subianto yang lahir pada 17 Oktober 1951 adalah anak ketiga dan putera pertama dari pasangan Soemitro Djohadikusumo dan Dora Soemitro.

Soemitro Djohadikusumo adalah Begawan ekonomi Indonesia yang berasal dari Kebumen, Jawa Tengah. Sedangkan Dora Soemitro adalah Perempuan Kristen Protestan berdarah Minahasa. Ibunya berasal dari keluarga Maengkom di Langowan Sulawesi Utara. Soemitro yang juga aktif sebagai politikus Partai Sosialis Indonesia sempat menjadi Menteri Keuangan di era Soekarno, dan Menteri Perdagangan di era Soeharto.

Prabowo memiliki dua kakak perempuan, bernama Biantiningsih Miderawati dan Maryani Ekowati, serta seorang adik laki-laki bernama Hashim Djohadikusumo. Prabowo merupakan cucu dari Margono Djohadikusumo, yaitu seorang pendiri Bank



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Negara Indonesia dan juga sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agung yang pertama. Berdasarkan silsilah, keluarga Djohadikusumo merupakan keturunan dari Raden Tumenggung Kertanegara yang merupakan Panglima Laskar Pangeran Diponegoro.

Prabowo menghabiskan masa kecilnya di luar negeri. Ia mengikuti keluarganya, terutama setelah ayahnya terlibat menentang pemerintah Presiden Soekarno dalam Pemerintahan Revolusioner di

Sumatera. Dari sejumlah sumber disebutkan, Prabowo berpindah-pindah sekolah dari Malaysia, Swiss, sampai Inggris. Prabowo menyelesaikan studi menengahnya di Vicotria Institution di Kuala Lumpur, Malaysia, Zurich International School di Zurich, Swiss; dan The American School di London.

Hingga akhirnya ketika pemerintahan Orde Lama tumbang digantikan Orde Baru, keluarga Soemitro kembali ke Indonesia. Lalu Prabowo masuk ke Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah, pada tahun 1970. Setelah lulus, ia kemudian bergabung dengan Komando Pasukan Sandi Yudha (Kopassanda)—pasukan elit Angkatan Darat yang menjadi cikal bakal Kopassus. Tugasnya saat itu menjadi komandan pleton pada Grup I/Para Komando yang menjadi bagian dari pasukan operasi Tim Nanggala di Timor Timur.

Pada Mei 1983, Prabowo menikah dengan Siti Hediati Hariyadi, puteri dari Presiden Soeharto dan Tien Soeharto. Prabowo dan Siti Hediati dikaruniai seorang anak laki-laki, yaitu Ragowo Hediprasetyo atau Didiet. Akan tetapi pernikahan mereka tidak berjalan sampai tua. Tak lama setelah Orde Baru tumbang, keduanya berpisah pada tahun 1998. Anaknya, Didiet, tumbuh di Boston, Amerika Serikat, dan memilih profesi sebagai seorang desainer yang berbasis di Paris, Prancis.

Sejak menikah, karir militer Prabowo melesat. Tahun 1985 Prabowo menjadi wakil komandan Batalyon Infanteri Lintas Udara 328, dan pada 1991 menjabat Kepala Staf Brigade Infanteri Lintas Udara 17 yang bermarkas di Cijantung. Dua tahun kemudian, Prabowo kembali ke pasukan khusus yang sudah berganti nama menjadi Kopassus. Pada puncaknya, Prabowo diangkat menjadi Komandan Jenderal Kopassus dengan pangkat Mayor Jenderal pada 1995. Pada 20 Maret 1998, Prabowo diangkat menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad).

Pada detik-detik periode lengsernya Soeharto hingga Mei 1998, Prabowo dituduh terlibat dalam penghilangan sejumlah aktivis.



Dewan Kehormatan Perwira (DKP) menggelar sidang pada Agustus 1998. Sidang itu terkait dengan kasus hilangnya sejumlah aktivis politik yang dilakukan anggota Kopassus di bawah Danjen Prabowo. Keputusan sidang adalah menjatuhkan sanksi administrasi kepada Prabowo berupa pemberhentian dari dinas kemiliteran.

Setelah berhenti dari dinas kemiliteran, Prabowo merintis usaha mengikuti karir adiknya Hashim Djojohadikusumo menjadi pengusaha. Dalam dunia bisnis, Prabowo memiliki dan memimpin 27 perusahaan di Indonesia dan di luar negeri. Di antaranya presiden dan CEO PT Tidar Kerinci Agung yang bergerak dalam bidang produksi minyak kelapa sawit, lalu PT Nusantara Energy yang bergerak dalam bidang migas, pertambangan, pertanian, kehutanan dan pulp, dan juga PT Jaladri Nusantara yang bergerak di bidang perikanan.

Prabowo mulai meniti karir politik saat mencalonkan diri sebagai bakal calon presiden Indonesia dari Partai Golkar pada konvensi Capres Golkar tahun 2004. Meskipun lolos, pada akhirnya Prabowo kalah suara dari Wiranto. Pada 6 Februari 2008, bersama sang adik Hashim Djojohadikusumo, mantan aktivis mahasiswa Fadli Zon, dan mantan Deputy V Badan Intelijen Negara Muchdi Purwoprandjono, serta sederet nama lainnya, Prabowo Subianto mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra.

Prabowo menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Partai Gerindra mengikuti Pemilu tahun 2009 dan meraih 4,46% dengan menempatkan 26 wakil di DPR RI. Pada Pilpres 2009, Partai Gerindra mengajukan Prabowo sebagai bakal calon presiden. Tetapi setelah proses tawar menawar, Prabowo akhirnya bersedia menjadi calon wakil presiden berpasangan dengan Capres Megawati Soekarnoputri. Pada Pilpres 2009 ini, pasangan Megawati – Prabowo kalah dari pasangan Susilo Bambang Yudhoyono – Boediono.

Pada Pemilu 2014, Partai Gerindra bersama partai koalisi kembali mengajukan Prabowo Subianto sebagai calon presiden bersama

Hatta Rajasa sebagai calon wakil presiden. Dalam Pilpres, Prabowo Subianto kembali kalah dari pasangan Joko Widodo – Jusuf Kalla. Lalu, pada Pilpres 2019, berpasangan dengan Sandiaga Uno, Prabowo Subianto kembali menelan kekalahan dari pasangan Joko Widodo – K.H. Ma'ruf Amin. Namun, pada 23 Oktober 2019, Prabowo Subianto dilantik menjadi Menteri Pertahanan dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019 sampai 2024.

Pada Pemilu 2024, untuk keempat kalinya Prabowo Subianto maju kembali mencalonkan diri dalam kontestasi Pilpres berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka. Hasil quick count Pilpres 2024 menunjukkan pasangan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka unggul dibanding dua pasangan Capres dan Cawapres lainnya.

Prabowo Subianto pantang menyerah. Seperti seringkali diucapkannya, "Tidak ada kata menyerah dalam hati seorang pejuang. Menang kalah biasa. Jangankan menang kalah, mati dalam pertempuran kita siap."



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Gibran Rakabuming Raka

Dalam pemilihan presiden pada Pemilu 2024 kali ini, Prabowo Subianto didampingi oleh Walikota Solo, Gibran Rakabuming Raka, yang juga putera sulung Presiden Joko

Widodo. Gibran Rakabuming Raka bisa dibilang sebagai nama kejutan dalam kontestasi pemilihan presiden kali ini. Namanya diajukan di detik-detik terakhir pendaftaran calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres). Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan tentang syarat batas usia pencalonan Capres dan Cawapres.

Dalam putusannya MK membolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden selama berpengalaman menjadi kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Putusan MK ini membuka peluang Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka bisa ikut kontestasi pemilihan presiden pada Pemilu 2024. Pada Ahad, 22 Oktober 2023, Koalisi Indonesia Maju (KIM) mengumumkan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden.

"Baru saja Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang terdiri dari delapan partai politik, yang dihadiri lengkap oleh ketua umum masing-masing dan sekjen masing-masing, kita telah berembuk secara final, secara konsensus, seluruhnya sepakat mengukung Prabowo Subianto sebagai Capres Koalisi Indonesia Maju untuk 2024-2029 dan saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden," ujar Prabowo dalam jumpa pers di kediamannya di Jl. Kertanegara No. 4, Jakarta Selatan, Ahad malam (22/10/2024).

Gibran sendiri masih tercatat sebagai kader PDI Perjuangan. Meski menjadi bakal Cawapres Prabowo, Gibran belum mengundurkan diri atau diberhentikan sebagai anggota dari PDI Perjuangan. Adapun PDI Perjuangan telah mengukung pasangan Capres Ganjar Pranowo dan Cawapres Mahfud MD untuk kontestasi pemilihan presiden pada Pemilu 2024.

Untuk pertama kalinya Gibran Rakabuming Raka diperkenalkan sebagai Cawapres di depan jajaran ketua umum partai politik anggota KIM, pendukung, serta simpatisan di Indonesia Arena, Komplek Gelora Bung Karno, Jakarta, sesaat sebelum pendaftaran ke KPU pada Rabu, 25 Oktober 2023. Membuka pidatonya, Gibran meminta



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Prabowo tenang lantaran dirinya sudah hadir mendampingi. “Tenang saja Pak Prabowo, tenang saja Pak, saya sudah ada di sini,” kata Gibran disambut riuh sorak sorai para pendukung.

Gibran Rakabuming Raka lahir 1 Oktober 1987. Ia adalah seorang pengusaha dan politisi yang sudah menjabat sebagai Walikota Surakarta sejak dilantik pada 26 Februari 2021. Gibran adalah putera sulung dari Joko Widodo dan Iriana. Sebagai putera pembisnis furniture yang sukses, Gibran kecil sudah menikmati kesempatan bersekolah di

luar negeri. Dia sekolah di Orchid Park Secondary School (setara SMA) Singapura. Di tingkat kuliah, Gibran menempuh pendidikan di Management Development Institute of Singapura (MDIS) dan memperoleh gelar sarjana pada 2007. Tiga tahun kemudian, dia menamatkan studi di University of Technology Sydney (UTS Insearch) di Sydney, Australia, lulus tahun 2010.

Gibran tinggal di luar negeri hampir 8 tahun. Sekembalinya ke Tanah Air, Gibran merintis bisnis Chilli Pari pada Desember 2010. Berkat usahanya tersebut, ia pun

dipercaya sebagai ketua Asosiasi Perusahaan Jasa Boga Indonesia (APJBI) Kota Solo. Ia juga mendirikan House of Knowledge yang berfungsi untuk melatih karyawan-karyawan lepas catering Chilli Pari, terutama dalam berbahasa Inggris. Kemudian, bersama adiknya, Kaesang Pangarep, Gibran membuka bisnis Kafe Markobar yang pada awalnya hanya berdomsili di Solo. Kafe yang menjual aneka Martabak itu sempat viral di media sosial.

Pada tahun 2015, Gibran menikahi Puteri Solo Selvi Ananda Putri. Keduanya dikaruniai seorang putera bernama Jan Ethes Srinarendra yang lahir pada 2016 dan La Lembah Manah yang lahir pada 10 Maret 2016. Gibran terus mendirikan bermacam usaha seperti restoran Pasta Buntel, usaha kopi CS Coffe Shop dan Ceker Ayam Bakar, juga usaha perbaikan elektronik khusus Apple, usaha jas hujan, Perusahaan startup, mendirikan restoran Mangkok Ku, aplikasi pencari kerja Kerjaholic.

Pada 2020, secara mengejutkan Gibran memulai karier politiknya. Dia mendaftarkan diri sebagai anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di kantor dewan pimpinan cabang (DPC) Solo. Pendaftaran tersebut bertujuan untuk masuk dalam pencalonan sebagai Walikota Solo pada pemilihan 2020. Gibran berhasil menang dengan perolehan suara sebesar 225.451 atau setara 86,53% dalam kontestasi politik Solo melawan pasangan Bagyo Wahyono dan FX Suparjo. Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakasa resmi dilantik sebagai Wali Kota Solo pada 26 Februari 2021.

Pada 22 Oktober 2023, Gibran dideklarasikan sebagai Cawapres mendampingi Capres Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Pada 13 November 2023, KPU resmi menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon presiden dan calon wakil presiden dalam Pemilihan Umum 2024. Keduanya diusung oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, dan Partai Bulan Bintang (PBB). □

BSC (dari berbagai sumber)





FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Prof. Dr. Sjarifuddin Hasan, MM., MBA., Wakil Ketua MPR

Secara Kasat Mata Demokrasi Kita Semakin Baik

MASA kampanye telah usai. Dan, rakyat Indonesia yang memiliki hak pilih telah pula memberikan suaranya dalam pemungutan suara Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 pada Rabu, 14 Februari 2024. Sejak pagi hingga siang hari pada hari pemungutan suara itu, rakyat berbondong-bondong datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) masing-masing. Mereka memilih pasangan calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) serta wakil-wakilnya yang akan duduk di lembaga legislatif (DPR, DPD, dan DPRD).

Pesta demokrasi di Indonesia ini diwarnai dengan berbagai persaingan sengit antarkontestan dan para pendukungnya. Kadang-kadang persaingan itu menggunakan negative campaign (kampanye negatif) maupun black campaign (kampanye hitam) untuk menyerang lawan politik. Semua upaya dilakukan mulai dari menyampaikan gagasan hingga gimmick untuk menarik simpati pemilih. Namun, masa kampanye bisa berlangsung dengan aman dan terkendali.

Pemungutan suara pada 14 Februari 2024

pun berjalan dengan aman dan tertib. Bagaimana pandangan Pimpinan MPR terhadap jalannya Pemilu 2024 ini hingga hari pemungutan suara? Berikut wawancara Majelis dengan Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat Prof. Dr. H. Sjarifuddin Hasan, MM., MBA. Petikannya.

Pemungutan suara dalam Pemilu 2024 telah berlangsung dengan aman dan tertib, serta tidak ada gangguan-gangguan yang berarti. Bagaimana Bapak menilai kualitas Pemilu 2024 ini?

Kita bersyukur pemungutan suara dalam Pemilu 2024 sudah berjalan dengan baik. Saya melihat antusiasme masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu ini sangat tinggi. Mereka sudah berusaha memilih para calon yang terbaik. Kita berharap semoga kepercayaan yang diberikan oleh rakyat dapat dijalankan oleh mereka yang terpilih dengan sebaik-baiknya. Apalagi, rakyat juga meyakini bahwa calon yang sudah dipilih adalah calon yang terbaik untuk memimpin bangsa ini lima tahun ke depan.

Sebagian kalangan menyampaikan terjadinya potensi kecurangan dalam

Pemilu 2024 ini. Bagaimana Bapak melihat Pemilu 2024 yang ditengarai banyak terjadi kecurangan?

Saya menilai kecurigaan terjadinya kecurangan dalam Pemilu adalah sesuatu hal yang wajar. Apalagi dalam setiap kontestasi Pemilu pasti ada pihak-pihak yang tidak puas dan muncul kecurigaan-kecurigaan. Yang menjadi persoalan adalah apakah ada bukti atau tidak yang mendasari kecurigaan tersebut. Jika ada bukti yang mendasari kecurigaan terjadinya kecurangan, kita telah memiliki jalan keluarnya. Yaitu, dilanjutkan ke Bawaslu jika ada bukti pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilu, atau dilanjutkan ke kepolisian jika ditemukan pelanggaran pidana. Jadi, sudah ada mekanismenya bila terjadi pelanggaran dalam Pemilu.

Beberapa pihak juga menilai adanya ketidaknetralan dari ASN, TNI, dan Polri dalam Pemilu ini. Apa tanggapan Bapak?

Kecurigaan adanya ASN, TNI, dan Polri yang tidak netral hanya asumsi saja. Karena masih asumsi maka belum tentu kebenarannya. Tetapi, lagi-lagi, sudah ada saluran dan

mekanismenya. Bila asumsi itu benar dan ditemukan bukti yang jelas, sudah tersedia pintu keluarnya. Tetapi, tentu saja bukti itu harus valid sehingga bisa menjadi dasar adanya pelanggaran maupun ketidaknetralan di kalangan ASN, TNI, maupun Polri. Tetapi, sejauh yang saya tahu, secara umum baik ASN, TNI, maupun Polri telah membuktikan netralitasnya dan ini perlu mendapat apresiasi.

Selain ASN, TNI, dan Polri, ada juga anggapan bahwa Presiden dan beberapa menteri berpihak pada salah satu pasangan Capres dan Cawapres. Bagaimana mengenai hal ini?

Sekali lagi saya harus sampaikan, sudah ada saluran untuk menyampaikan keluhan-keluhan atau keberatan-keberatan. Para menteri sebenarnya memiliki latar belakang dan garis politik yang tidak sama antara satu menteri dengan menteri lainnya. Semua sudah ada aturan dan undang-undangnya. Misalnya, bagaimana presiden atau menteri yang ingin berkampanye, itu sudah ada aturannya. Dan, ternyata Presiden Joko Widodo kan tidak berkampanye. Kita juga memberikan apresiasi terhadap pilihan yang sudah diambil presiden itu.

Terkait dengan kritik yang disampaikan kalangan perguruan tinggi, pengajar maupun civitas akademika, bagaimana Bapak melihat kritik dari perguruan tinggi itu?

Menurut saya, kritik dari perguruan tinggi itu patut didengar dan disalurkan, bahkan ditampung oleh legislatif. Karena itu, kita juga sewajarnya memberikan apresiasi



kepada para akademisi yang sudah menyampaikan pandangan serta kritik terhadap demokrasi kita saat ini. Kita juga harus berterima kasih kepada mereka karena telah memberikan masukan untuk perbaikan demokrasi ke depan, yaitu bagaimana kita sebaiknya memelihara dan meningkatkan demokrasi kita.

Saya malah berpikir akan lebih bagus jika masukan tersebut bisa dilakukan secara rutin oleh civitas akademika, baik kepada DPR maupun pemerintah. Untuk menyalurkan masukan itu sudah ada proses dan saluran yang bisa digunakan. Khususnya di MPR, pada saat kegiatan sosialisasi Empat Pilar MPR sebenarnya ada ruang bagi para akademisi untuk menyalurkan aspirasi serta pandangannya. Artinya, penyampaian aspirasi itu sejalan dengan program sosialisasi Empat Pilar MPR.

Begitupun dalam sosialisasi perubahan UUD NRI Tahun 1945. Sosialisasi ini juga bisa menjadi saluran bagi para akademisi untuk menyampaikan aspirasi dan pandangannya terkait dengan demokrasi dan konstitusi. Karena itu, kita patut memberikan apresiasi yang tinggi kepada para akademisi yang telah

menyampaikan kritik dan masukan untuk perbaikan demokrasi kita ke depan.

Beberapa pihak juga mengkritik bantuan sosial (Bansos) yang diberikan menjelang Pemilu 2024 atau politisasi Bansos. Apa pendapat Bapak?

Bansos adalah program yang sudah dicanangkan jauh-jauh hari, termasuk anggarannya melalui APBN. Yang patut dicermati adalah bagaimana penyaluran Bansos. Jangan sampai ada klaim, misalnya dari partai tertentu atau Caleg tertentu, atau ada kaitannya dengan kampanye. Tetapi, program Bansos itu penting untuk tetap berjalan, meskipun tidak ada anggaran tetapi tetap dicari. Kalau program ini sudah lama berjalan dan sudah ada anggarannya, saya pikir tinggal pengawasannya ditingkatkan. Jangan sampai ada klaim, dari organisasi atau kelompok, dan partai tertentu karena Bansos ini adalah program pemerintah.

Terakhir, apakah Pemilu 2024 ini bisa meningkatkan kualitas demokrasi kita?

Kita harus selalu membuka ruang untuk mengubah atau memperbaiki undang-undang, termasuk UU Pemilu. Contohnya, masih ada orang yang kehilangan hak suara karena tiba-tiba harus pindah domisili atau hal-hal lainnya. Ini adalah salah satu hal yang perlu diperbaiki di masa datang. Memang kita menginginkan semua proses demokrasi terus meningkat. Ini harus dijaga. Dengan meningkatnya antusiasme masyarakat untuk datang ke TPS maka proses demokrasi di Indonesia semakin baik. Kemudian, perlu adanya transparansi dan mekanisme atau saluran bila terjadi pelanggaran-pelanggaran. Secara kasat mata, demokrasi kita terlihat semakin baik. Kalau misalnya di sana sini masih ada persoalan, maka artinya memang perlu ada evaluasi yang lebih mendalam. □



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Delegasi Pemuda Muhammadiyah Jakarta

**HNW
Gerakan Pemuda Penting untuk
Hadirkan Pemilu Bersih dan Berkualitas**



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Sebagai organisasi pemuda, Pemuda Muhammadiyah merupakan kelompok strategis dan sangat menentukan.

KEDATANGAN Pemuda Muhammadiyah Pengurus Wilayah Jakarta (PM Jakarta) ke Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, 17 Januari 2024, disambut hangat oleh Wakil Ketua MPR Dr. H. Muhammad Hidayat Nur Wahid, MA. (HNW).

Delegasi yang dipimpin oleh Zulfahmi Yasir Yunan S.Sos., M.Ip., diterima oleh HNW di Ruang Kerja, Lt.9, Gedung Nusantara III. Kehadiran Zulfahmi yang didampingi oleh Sekretaris PM Jakarta Dipo Khairul Islam, Komandan KOKAM Yasser Atmanegara, serta beberapa pengurus lainnya ini adalah untuk menyampaikan kegiatan dan program kerja mereka.

Di bulan Februari 2024, KOKAM Jakarta akan mengadakan pendidikan dan latihan dasar (diklatsar) dan mereka mengundang HNW untuk mengisi salah satu materi diklatsar, dan HNW mengapresiasi kegiatan KOKAM ini dan menyanggupi untuk hadir menyampaikan materi pelatihan dasar KOKAM itu.

Kepada wartawan yang men-door stop dirinya, HNW mengatakan, Pemuda Muhammadiyah seperti halnya organisasi Muhammadiyah yang menaunginya, merupakan gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. "Karenanya, wajar bila ia terus melakukan gerakan pencerahan, dan tajdid/ pembaruan," ujarnya.

Sebagai organisasi pemuda, HNW menyebut, Pemuda Muhammadiyah merupakan kelompok strategis dan sangat menentukan. "Sebagai organisasi yang menghimpun anak-anak muda, posisi mereka sangat menentukan dalam memetakan masa depan generasi bangsa, termasuk generasi milenial dan Z, dalam menghadapi Pemilu 2024," ujar HNW yang juga Ketua Badan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor itu. Apalagi, lanjut HNW, pemilih pemula yang terdiri dari anak muda (generasi milenial dan Z) jumlahnya sekitar 60% dari total pemilik suara sah.

Semua kondisi bangsa dan negara, menurut HNW, akan banyak tergantung dari hasil pemilu. Untuk itu, menjadi sangat penting peran aktif Pemuda Muhammadiyah bersama dengan kelompok masyarakat lainnya untuk ikut menghadirkan pemilu yang luber, jurdil, bersih dari kecurangan dan mengoreksi bila ada penyimpangan, seperti money politic, intimidasi, termasuk ketidaknetralan aparaturnya pemerintah maupun penyelenggara pemilu.

Dari strategisnya peluang pemuda dan tantangan yang dihadapi, HNW berharap agar organisasi Pemuda Muhammadiyah memaksimalkan fungsi dan perannya di tengah masyarakat. "Pemuda Muhammadiyah harusnya bisa mengedukasi dan menjadi solusi di tengah munculnya rasa kekhawatiran menjelang pemilu," ujar alumni



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Universtas Madinah, Arab Saudi, itu.

Lebih lanjut dikatakan oleh pria asal Klaten, Jawa Tengah, itu bila mereka mampu berkontribusi pada umat dan bangsa maka anggota organisasi yang pusatnya berada di Menteng Jakarta itu, bukan sembarang pemuda. “Tetapi pemuda yang berkualitas dan berkontribusi positif untuk masa depan generasi muda dan masa depan bangsa dan

negara,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, HNW meminta Pemuda Muhammadiyah ikut meluruskan pandangan yang salah bahwa politik itu kotor, termasuk di kalangan generasi muda. Karena pandangan yang demikian membuat banyak di kalangan anak muda, termasuk umat Islam, tidak mau terlibat dalam urusan politik. “Pandangan tersebut perlu

dikritisi dan dikoreksi, karena selain salah juga tidak menguntungkan kalangan pemuda,” tuturnya.

Untuk meluruskan pandangan tersebut, HNW berharap, bila ada anggota Pemuda Muhammadiyah yang berpolitik agar melakukannya dengan bertanggung jawab serta mampu menghadirkan solusi dari berbagai permasalahan yang dihadapi oleh bangsa dan negara.

Kepada delegasi Pemuda Muhammadiyah Jakarta yang hadir dalam kesempatan itu, HNW dengan tegas mengatakan, mendukung kegiatan mereka. “Pemuda Muhammadiyah harus bekerja sama secara positif dan konstruktif dengan berbagai pihak, termasuk di dunia politik, yang terbukti tulus dan peduli dengan masalah umat dan masa depan bangsa dan generasi mudanya. Karena sehebat apapun organisasi pemuda, tidak mungkin mengatasi semua masalah. Diperlukan kolaborasi (ta’awun) memperjuangkan maslahat Umat, Bangsa, dan Negara” pungkasnya. □

Universitas Kristen Indonesia, Jakarta

Pengukuhan Guru Besar Dr. Dhaniswara K. Harjono, SH., MH., MBA.

Ketua MPR RI Bamsuet Kembali Tegaskan Pentingnya Pintu Darurat Konstitusi Saat Pengukuhan Rektor Universitas Kristen Indonesia Sebagai Guru Besar



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Dosen Pascasarjana Universitas Pertahanan RI (UNHAN), Bambang Soesatyo, kembali menegaskan pentingnya Indonesia memiliki pintu darurat dalam UUD NRI Tahun 1945 dan protokol kedaruratan ketika terjadi kekosongan kekuasaan akibat pemilu tidak dapat dilaksanakan secara tepat waktu. Bamsuet juga mengingatkan, pekerjaan rumah bangsa Indonesia yang harus dituntaskan adalah kemiskinan, kebodohan, dan ketidakadilan.

“Selain soal ketidakpastian hukum sebagaimana disampaikan oleh Prof. Dhanis, penataan kekuasaan kehakiman juga perlu segera dilakukan untuk menjamin rasa keadilan masyarakat,” ujar Bamsuet dalam sambutannya saat pengukuhan Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, SH., MH., MBA., sebagai Guru Besar Ilmu Hukum Bisnis di Universitas Kristen Indonesia Jakarta, Rabu (10/1/24).

Ketua Dewan Pembina Perhimpunan Alumni Doktor Ilmu Hukum UNPAD ini juga

mengapresiasi pencapaian akademik Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono. SH.,MH.,MBA., yang dikukuhkan sebagai Guru Besar Ilmu Hukum Bisnis Universitas Kristen Indonesia (UKI). Mengangkat orasi ilmiah tentang ‘Direksi Kebal Hukum?’, Dhaniswara melakukan kajian hukum bisnis dalam perspektif

restrukturisasi badan usaha milik negara (BUMN).

“Selamat atas dikukuhkannya Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, SH., MH.,MBA., sebagai Guru Besar Hukum Bisnis Program Doktor Hukum Universitas Kristen Indonesia. Sebagai praktisi hukum dan keberhasilannya menakhodai Universitas



Kristen Indonesia sejak tahun 2018, Prof Dhaniswara layak memperoleh gelar akademis tertinggi di perguruan tinggi tersebut,” ujar Bamsuet.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menuturkan, dalam orasi ilmiah Prof. Dhaniswara menjelaskan, Direksi BUMN adalah penanggungjawab utama atas kegiatan restrukturisasi yang dilakukan untuk memperbaiki dan mengembangkan kinerja dalam upaya penyelamatan perusahaan. Direksi seringkali dihadapkan pada situasi dilematis yang menimbulkan keraguan dalam mengambil keputusan strategis untuk kepentingan pengelolaan perseroan. Khususnya, terkait dengan keperluan untuk melakukan transaksi dan investasi yang di dalamnya terkandung risiko bisnis dan risiko hukum.

“Kerap terjadi direksi perseroan yang bertanggungjawab untuk kepengurusan perseroan demi kemajuan perseroan justru

terjerat permasalahan hukum akibat dari keputusan atau kebijakan yang dibuatnya. Begitu pula apabila keputusan yang diambil merugikan perseroan, direksi dituntut secara hukum, baik perdata ataupun pidana. Dalam kaitan tersebut direksi sebagai penanggungjawab perseroan ketika dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada doktrin business judgement rule, maka direksi tersebut tidak dapat dituntut secara hukum sepanjang yang telah dilakukan sesuai dengan governance yang berlaku,” kata Bamsuet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini memaparkan, business judgement rule adalah konsep di mana direksi perseroan tidak dapat dibebankan tanggungjawab secara hukum atas keputusan yang diambilnya. Walaupun keputusan tersebut menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Sepanjang keputusan itu dilakukan dengan mengedepankan itikad baik, tujuan dan cara

yang benar, dasar yang rasional dan kehati-hatian serta penuh tanggungjawab.

Dalam penerapan doktrin business judgement rule sesungguhnya terletak pada mekanisme dan prosedur yang ditempuh oleh direksi sebelum diambilnya keputusan tersebut. Bukan merujuk pada isi keputusan itu sendiri. Prinsipnya, dalil business judgement rule sangat berkaitan dengan ada tidaknya unsur kesengajaan, yakni mengetahui (willens) dan menghendaki (wettens) pada diri direksi saat mengambil keputusan. Jika tidak ada keduanya, tidak ada kesalahan pada sang direksi.

“Pengambilan keputusan direksi perseroan yang merupakan cikal bakal terbentuknya kebijakan perusahaan, sepanjang telah dilakukan sesuai anggaran dasar, penerapan risk management berupa six eyes principle serta pengendalian internal yang konservatif dan efektif, bukanlah pelanggaran hukum, apapun hasilnya,” pungkas Bamsuet. □

Terima Delegasi Pesantren Al Ikhsan

HNW: Pentingnya Edukasi Etika Berpolitik

Wakil Ketua MPR, Dr. H. Hidayat Nur Wahid, MA., berharap agar lembaga pendidikan Al Ikhsan ikut menyemangati, mengedukasi, dan mencerahkan warga dalam berpolitik dan menghadapi pemilu sesuai etika dan akhlaq mulia seperti yang diajarkan di pesantren.

BERTEMPAT di Ruang Kerja Lt.9, Gedung Nusantara III, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta, 15 Januari 2024, Wakil Ketua MPR Dr. H. Muhammad Hidayat Nur Wahid, MA., (HNW) menerima pimpinan pengurus Yayasan Al Ikhsan yang mengelola Pesantren Al-Ikhsan.

Anggota delegasi lembaga pendidikan pesantren yang beralamat di Kebagusan, Jakarta, terdiri dari: Dr. KH. Abdurahman, Ibadurrahman, Saripudin Irwansyah, Zaenal Arifin, Alo Didi, dan Ustad Ichsan.

Dalam silaturahmi yang dimulai pukul 14.30 WIB itu banyak hal yang dibahas, seperti masalah keumatan, kebangsaan, serta apa yang terjadi saat ini di Palestina. Dan, di akhir silaturahmi, pihak Al Ikhsan menyampaikan undangan kepada HNW agar menghadiri Haflah Alquran yang digelar pada minggu



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

pertama bulan Februari.

Dalam kesempatan itu, HNW berharap kepada Al Ikhsan agar lembaga pendidikan

yang berada di Jakarta Selatan itu ikut menyemangati, mengedukasi, dan mencerahkan warga dalam berpolitik dan



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

menghadapi pemilu sesuai etika dan akhlaq mulia yang diajarkan di pesantren, apalagi yang berorientasi Alquran.

HNW menekankan hal demikian, agar semua pihak, termasuk masyarakat, dalam menghadapi pemilu tidak terjebak pada sikap pragmatisme, tergoda pada money politic, atau lebih memilih golput.

Melaksanakan pemilu yang luber dan jurdil, menurut HNW, menjadi tugas semua anak bangsa, sebab pemilu merupakan amanat yang ada dalam UUD NRI Tahun 1945. Karena

itu, politisi PKS itu berharap, Al Ikhsan ikut mendorong dan menyemangati masyarakat agar jati diri anak bangsa, seperti nilai-nilai yang diajarkan di pesantren.

HNW menyatakan, nilai-nilai yang diajarkan di pesantren adalah nilai-nilai yang membentuk manusia agar mempunyai sikap mulia, utama, berakhlak, bertanggung jawab, mementingkan kemaslahatan umat. "Juga memilih pemimpin dan wakil rakyat yang baik," tegas pria yang juga menjadi Ketua Badan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor itu.

Diakui oleh alumni Universitas Madinah, Arab Saudi, itu di tengah kehidupan perkotaan, arus gaya hidup materialistik dan pragmatisme demikian kuatnya sehingga hadirnya lembaga pendidikan yang berbasis agama Islam, seperti Al Ikhsan sangat penting. "Untuk mengingatkan semangat idealisme dan mempunyai nilai-nilai yang sesuai jati diri pesantren," tuturnya.

Sebagai salah satu elemen masyarakat, Al Ikhsan tidak harus masuk dalam partai politik. Pondok pesantren memang didorong untuk lebih fokus melakukan pemberdayaan masyarakat melalui jalur pendidikan. Meski tidak perlu berpolitik, namun diingatkan agar partai politik jangan sampai mengkooptasi Al Ikhsan dan lembaga pendidikan lainnya.

Ditegaskan oleh pria asal Klaten, Jawa Tengah, itu partai politik harus tetap melaksanakan peran-perannya melalui anggota yang ada di DPR dan DPRD untuk memperjuangkan kemaslahatan rakyat dan lembaga-lembaga pendidikan supaya hak-hak mereka terpenuhi.

Bila hak-hak lembaga pendidikan terpenuhi maka hal demikian akan mendongkrak kualitas peserta didiknya. "Bila lembaga pendidikan berkualitas maka demokrasi yang hadir juga semakin ideal," ucapnya. □

Rilis Buku 'Konstitusi Butuh Pintu Darurat'

Bamsoet Tegaskan Hargai Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK)

Idealnya, UUD NRI Tahun 1945 harus dapat memberikan jalan keluar secara konstitusional, menyediakan sebuah 'pintu darurat' untuk mengatasi kebuntuan ketatanegaraan atau 'constitutional deadlock'.

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menegaskan, menghargai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak uji materi tentang keberadaan TAP MPR dan menyatakan MPR tidak berwenang mengeluarkan ketetapan atau Tap yang bersifat mengatur (regeling) dan berlaku mengikat keluar.

Namun, Bamsoet mengingatkan, potensi bahaya seandainya dalam keadaan tertentu

muncul keadaan yang luar biasa, yang berpotensi mengancam keutuhan bangsa dan negara, sementara UUD belum merumuskan dengan jelas untuk mengatasi keadaan itu. Misalnya menjelang Pemilihan Umum terjadi sesuatu yang di luar dugaan kita bersama, seperti bencana alam yang dahsyat, atau pandemi yang tidak segera dapat di-atasi, lembaga manakah yang berwenang menunda pelaksanaan pemilihan umum?

Kemudian, bagaimana pengaturan konstitusionalnya jika pemilihan umum tertunda, sedangkan masa jabatan Presiden, Wakil Presiden, para anggota MPR, DPR, dan DPD, serta para menteri anggota kabinet (termasuk triumvirat: Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan) telah habis masa jabatannya?

Masalah-masalah seperti ini belum ada jalan keluar konstitusionalnya. Idealnya, UUD NRI Tahun 1945 harus dapat memberikan



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

jalan keluar secara konstitusional, menyediakan sebuah “pintu darurat,” untuk mengatasi kebuntuan ketatanegaraan atau “constitutional deadlock”.

Sementara mantan Ketua MK yang kini Anggota DPD RI, Prof. Jimly Asshiddiqie, mendorong masuknya kembali Utusan Golongan dan Utusan Daerah di MPR. Kepala LLDIKTI Wilayah 3 Kemenristek Prof. ToniToharudin mengatakan, pemikiran yang dituangkan Bamsoet dalam bukunya ini tidak hanya menyajikan analisis kritis terkait peran MPR RI, tetapi juga menawarkan solusi

kongkret dalam hal bangsa negara menghadapi kegentingan yang tidak diatur dalam konstitusi pasca amandemen keempat.

“Tidak kita pungkiri bahwa setelah amendemen keempat, konstitusi ternyata masih menyisakan beberapa persoalan yang belum ada rujukan penyelesaian konstitusionalnya. Persoalan-persoalan itu antara lain, bagaimanakah langkah konstitusional yang dapat kita tempuh, seandainya dalam keadaan tertentu muncul keadaan yang luar biasa yang berpotensi mengancam keutuhan bangsa dan negara.

Sementara UUD belum merumuskan dengan jelas untuk mengatasi keadaan itu,” ujar Bamsoet saat peluncuran buku ke-32 karya Bamsoet berjudul: ‘Konstitusi Butuh Pintu Darurat: Urgensi Memulihkan Wewenang Subjektif Superlatif MPR RI’, di Jakarta, Rabu (17/1/24).

Hadir sebagai pembahas dalam peluncuran buku tersebut, selain Prof. Jimly Asshiddiqie dan Prof. ToniToharudin juga Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nurwahid, Fadel Muhammad, Arsul Sani, Sekjen PKS yang juga anggota Komisi III DPR Aboe Bakar Al-Habsyi, dan mantan ketua MK Hamdan Zulfa. Sementara Wakil Ketua DPR RI yang juga Cawapres Paslon No.1 Muhaimin Iskandar hadir memberikan testimoni.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, semisal menjelang Pemilihan Umum terjadi sesuatu yang di luar dugaan, seperti bencana alam yang dahsyat atau pandemi yang tidak segera dapat diatasi, lembaga manakah yang berwenang menunda pelaksanaan pemilihan umum? Kemudian, bagaimana pengaturan konstitusionalnya jika pemilihan umum tertunda, sedangkan masa jabatan presiden, wakil presiden, para anggota MPR, DPR, dan DPD, serta para menteri anggota kabinet, termasuk triumvirat, yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan telah habis masa





FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

jabatannya.

“Masalah-masalah seperti ini belum ada jalan keluar konstitusionalnya. Idealnya, UUD NRI Tahun 1945 harus dapat memberikan jalan keluar secara konstitusional, menyediakan sebuah ‘pintu darurat’, untuk mengatasi kebuntuan ketatanegaraan atau ‘constitutional deadlock,’” kata Bamsuet.

Dosen Pascasarjana Universitas Pertahanan RI (UNHAN) dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini memaparkan, jika situasi seperti itu benar-benar terjadi, maka prinsip kedaulatan rakyat yang harus dikedepankan untuk mengatasi keadaan-keadaan bahaya tersebut. Secara akademis, lembaga MPR yang diisi oleh anggota-

anggota DPR dan DPD yang kesemuanya adalah produk pemilihan umum, menjadi satu-satunya lembaga negara yang paling merepresentasikan wujud kedaulatan rakyat..

“Sesuai amanat ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar, sebagai representasi dari prinsip daulat rakyat maka MPR dapat diatribusikan dengan kewenangan subyektif superlatif dan kewajiban hukum untuk mengambil keputusan atau penetapan yang bersifat pengaturan guna mengatasi dampak dari suatu keadaan kedaruratan. Misalnya, berupa kahar politik ataupun kahar fiskal yang tidak dapat diantisipasi dan tidak bisa

dikendalikan secara wajar,” urai Bamsuet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPi ini menegaskan, menghadirkan kewenangan subyektif superlatif memiliki makna strategis untuk mengembalikan dan menyempurnakan daulat rakyat yang terepresentasikan oleh lembaga perwakilan yang “lengkap”, terdiri dari unsur DPR dan DPD, dalam kelembagaan MPR. Ketetapan MPR dimaknai dan diterima sebagai rumusan aspirasi terbaik menurut semua elemen masyarakat. Setiap kebijakan strategis yang diberlakukan melalui Tap MPR patut dipahami sebagai kesepakatan seluruh rakyat, yang tujuannya adalah untuk kemaslahatan bersama.

“Mengeliminasi wewenang subyektif superlatif dari MPR dapat dimaknai mereduksi kekuasaan tertinggi rakyat yang telah memberi mandat kepada presiden. Dalam konsepsi ini maka kuasa rakyat dalam menetapkan arah dan masa depan bangsa melalui permusyawaratan dan perwakilan, sebagaimana diamanatkan oleh sila ke-4 Pancasila, ‘Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,’ hanyalah sebuah utopia,” pungkas Bamsuet.

Bamsuet sendiri telah melahirkan berbagai karya buku, antara lain: Mahasiswa Gerakan dan Pemikiran (1990); Kelompok Cipuyung, Pandangan dan Realita (1991); Ekonomi Indonesia 2020 (1995); Skandal Gila Bank Century (2010); Perang Perangan Melawan Korupsi (2011); Pilpres Abal-Abal Republik Amburadul (2011); Republik Galau (2012); Skandal Bank Century di Tikungan Terakhir (2013).

Selain itu, buku Presiden dalam Pusaran Politik Sengkuni (2013); 5 Kiat Praktis Menjadi Pengusaha No.1 (2013); Indonesia Gawat Darurat (2014); Republik Komedi 1/2 Presiden (2015); Ngeri Ngeri Sedap (2017); Dari Wartawan ke Senayan (2018); dan Akal Sehat (2019); Jurus 4 Pilar (2020); “Solusi Jalan Tengah” (2020); Cegah Negara Tanpa Arah (2021); Hadapi Dengan Senyuman (2021); Melawan Radikalisme dan Demoralisasi Bangsa (2022); Indonesia Era Disrupsi (2022); 60 Tahun Meniti Buih di Antara Karang (2022); PPHN Tanpa Amendemen (2023); PPHN Menuju Indonesia Emas 2045 (2023); News Maker’ - Satu Dasawarsa The Politician Senayan (2023). □



Hari Internasional Anti Islamophobia

Hidayat Nur Wahid: UU Anti Islamophobia Diperlukan

HNW menilai, Islamophobia bukan lagi “duri peradaban dunia” melainkan racun peradaban dunia. “Islamophobia ini adalah racun yang menghancurkan peradaban dunia,” tegasnya.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, MA mengatakan, pemerintah Indonesia mendukung resolusi PBB soal Memerangi Islamophobia dan menjadikan tanggal 15 Maret sebagai Hari Internasional Melawan Islamophobia. Maka sebagai bukti keseriusan dukungan itu wajar bila Indonesia memiliki UU Anti-Islamophobia. UU ini diperlukan agar tidak terjadi perilaku pengekangan bahkan perlawanan di masyarakat yang malah membuka terjadinya perilaku pengadilan jalanan yang inkonstitusional dan tidak sesuai dengan semangat disepakatinya resolusi anti islamophobia tersebut. Karena itu, perlu diupayakan penyusunan dan pengusulan RUU Anti-Islamophobia baik oleh Pemerintah, DPR, maupun masyarakat.

“Kami sangat mendukung adanya kajian untuk menghadirkan Rancangan Undang-Undang Anti Islamophobia sebagaimana dilakukan oleh MUI maupun masyarakat

kampus, seperti Universitas Muhammadiyah Prof. HAMKA. Karena posisi Indonesia yang bukan hanya mendukung Hari Internasional Melawan Islamophobia, tapi juga sukses melobi banyak negara untuk mendukung. Maka, wajar bila di Indonesia juga dibuat UU Anti Islamophobia, supaya tidak terjadi perilaku pengekangan maupun perlawanan terhadap laku Islamophobia di lapangan yang tidak sesuai dengan aturan hukum, inkonstitusional, dan tidak sesuai dengan spirit hadirnya resolusi PBB anti Islamophobia tersebut,” kata Hidayat Nur Wahid, atau biasa disapa HNW.

HNW menyampaikan hal itu, ketika berbicara sebagai panelis dalam Orasi Kemanusiaan bertema: “Islamophobia, Duri Dalam Peradaban” yang disampaikan Prof. Dr. Sudharnoto Abdul Hakim, MA., (Ketua Hubungan dan Kerjasama Internasional MUI Pusat) di Aula AR Fachrudin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Uhamka, Jakarta, Kamis (18/1/2024).

Selain Hidayat Nur Wahid, panelis lainnya adalah Duta Besar Muhsin Syihab, Ph.D., (Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian Luar Negeri), Dr. Desvian Bandarsyah, M.Pd., (Wakil Rektor II Uhamka), dan Ir. H. Agustanzil Sjahroezah, MPA., (Wakil Presiden Pimpinan Pusat/Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam).

Menurut HNW, di dunia sudah ada UU Anti-Semitism dan sudah diberlakukan di beberapa negara. Maka, wajar saja bila dihadirkan UU Anti Islamophobia. Saat ini, di Amerika, dalam hal ini Senat Amerika, sedang mengupayakan untuk menghadirkan satu RUU tentang Anti-Islamophobia. Beberapa negara lain, seperti Kanada, juga sedang mengupayakan hal yang sama. Namun, sampai sekarang, upaya untuk menghadirkan UU Anti-Islamophobia itu belum berhasil.

“Kalau Indonesia memulai penyusunan RUU Anti-Islamophobia, dan kemudian berhasil, saya kira ini merupakan sebuah



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

karya yang luar biasa dari MUI, Pemerintah, DPR, dan pihak lainnya. Tujuan RUU ini adalah untuk menghadirkan keadilan, harmoni, kerukunan, toleransi, gotong royong, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathoniyah, dan ukhuwah basyariyah. Kita menunggu RUU Anti-Islamofobia yang dibuat MUI dan pihak lain, dan kami siap memperjuangkannya di DPR,” ujar Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKS ini.

Dalam orasi kemanusiaan itu, Prof. Dr. Sudhamoto telah memaparkan Islamophobia

dari sisi sejarah, perkembangannya, realitas kekinian dalam beragam bentuknya, baik dari jenis-jenis Islamophobia maupun dari aktor-aktornya, dan apa yang mesti dilakukan sekarang dan ke depan. HNW menilai Islamophobia bukan lagi “duri peradaban dunia” melainkan racun peradaban dunia. “Islamophobia ini adalah racun yang menghancurkan peradaban dunia,” tegasnya.

HNW mengungkapkan, pada tahun 2022, Perserikatan Bangsa-Bangsa memutuskan

secara aklamasi tanggal 15 Maret sebagai Hari Internasional Melawan Islamophobia, atau Combating Against Islamophobia. Indonesia cukup berperan dengan keluarnya resolusi PBB tentang Hari Internasional Melawan Islamophobia.

“Salah satu sebab mengapa terjadi aklamasi dukungan terhadap resolusi Sidang Umum PBB yang menghasilkan Hari Internasional Melawan Islamophobia adalah peran diplomasi dari Kementerian Luar Negeri. Indonesia bisa meyakinkan lebih dari 11 negara untuk menerima resolusi ini. Kementerian Luar Negeri, bahkan Kementerian Agama menyatakan, mendukung adanya Hari Melawan Islamophobia,” jelasnya.

Dalam konteks Indonesia, lanjut HNW, memang sudah seharusnya bila tidak terjadi Islamophobia. Di Indonesia, yang terjadi sebagaimana disebut Prof. Sudarnoto adalah soft Islamophobia. Salah satu bentuk Islamophobia dalam konteks politik adalah mengampanyakan ketakutan. Salah satu contoh adalah Pilgub DKI Jakarta tahun 2017. Pada waktu itu, para Buzzer mengampanyakan ketakutan bila Anies Baswedan menang dalam Pilgub DKI Jakarta, maka Jakarta akan berubah mengerikan menjadi seperti Suriah, terjadi radikalisme, terorisme, intoleran. “Itulah bentuk Islamophobia. Kita menyaksikan semuanya ternyata tidak terbukti,” katanya.

HNW menambahkan, bentuk Islamophobia yang lain adalah banyaknya Perda yang dihapus oleh Kementerian Dalam Negeri dengan alasan Perda itu adalah Perda Syariah. Padahal, Perda Syariah itu sudah melalui mekanisme yang dibenarkan UU dan mengikuti tradisi demokrasi, misalnya musyawarah terbuka di tingkat daerah dan melibatkan partisipasi masyarakat, gubernur, bupati, walikota dan partai-partai yang ada.

“Perda itu dihapus dengan alasan karena syariah. Sekalipun disetujui dan bahkan sudah diundangkan. Itu jenis Islamophobia yang menggelisahkan, padahal mestinya tidak terjadi, karena di Bali juga diberlakukan aturan yang khas Hindu seperti soal hari Nyepi, dan tetap bisa diberlakukan. Agar tidak terjadi keresahan dan agar diamalkanlah keadilan sesuai Pancasila (sila ke 2 dan ke 5) Islamophobia penting dikoreksi melalui hadirnya UU yang disepakati,” tutupnya. □



Grand Opening Parle Senayan Resto & Cafe

Bamsoet Apresiasi Parle Senayan Resto & Cafe Serap Ratusan Tenaga Kerja

Capaian kinerja pada industri makanan dan minuman usai pandemi Covid-19 terus menunjukkan tren positif, baik dalam peningkatan produktivitas, investasi, ekspor hingga penyerapan tenaga kerja.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengapresiasi pelaksanaan grand opening Parle Senayan Resto and Cafe di kawasan mall Senayan Park (SPARK) yang didirikannya secara pribadi bersama Puan Maharani dan

La Nyala Mattalitti, serta Sonny Harsono sebagai simbol kekompakan di luar parlemen. Sehingga berbagai persoalan pelik bisa dibicarakan dan dipecahkan tanpa sekat-sekat yang kaku.

Lebih dari itu, kehadiran Parle Senayan Resto and Cafe yang menyerap 300-an or-

ang lebih tenaga kerja semakin menyemarakkan industri makanan dan minuman. Sehingga bisa turut berkontribusi terhadap penerimaan negara dan daerah melalui pajak yang dibayarkan.

“Parle Senayan Resto and Cafe menyajikan beragam makanan khas nusantara dipadukan cita rasa western dan asia. Nama Parle Resto and Cafe yang berada di samping kawasan gedung Parlemen (MPR/DPR/DPD RI) ini mengambil nama dari bahasa Perancis. Parle dalam bahasa Perancis artinya berbicara. Parle juga merupakan penggalan dari kata Parlemen,” ujar Bamsoet usai menghadiri Grand Opening Parle Resto and Cafe di Jakarta, Selasa malam (16/1/24).

Hadir dalam acara grand opening Parle Senayan Resto & Café, selain pimpinan MPR RI Fadel Muhammad, Arsul Sani juga hadir Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasmita, Menteri Pariwisata & Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, dan Kepala Staf Angkatan Laut RI Laksamana TNI Muhammad Ali.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, menu yang disajikan di Parle Resto and Cafe sangat beragam dengan harga bersahabat. Antara lain, Crispy Madura Duck Taco, Lumpia Jamur Jakarta, Soft Shell Crab Sari Kapasan, Sate Lidah Bumbu Rujak, Asinan Juhi Betawi, Crispy Duck Pecel Madiun, Bebek Goreng Serundeng Bali, Ayam Tangkal Aceh Sambal Ganja, Ayam Bakar Taliwang, Ikan Bakar Barramundi Jimbaran.

“Ada juga Salmon Gulai Nyat Nyak, Udang Bakar Madu Manado, Tomahawk Aus 5+, Empal Gentong Cirebon Iga Sapi, Rawon Buntut Kikil, Lidah Sapi Cabe Ijo Padang, Pipi Sapu Kalio, Iga Bakar Maranggi Purwakarta, Nasi Goreng Kambing Taman Menteng, Nasi Campur Sultan, Nasi Ulam Betawi, Es Pisang



ljo makassar, dan banyak lagi,” kata Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Perhimpunan Alumni Doktor Ilmu Hukum UNPAD dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menambahkan, capaian kinerja industri makanan dan minuman merupakan salah satu manufaktur terbesar yang memberikan kontribusi pada pertumbuhan

ekonomi nasional. Capaian kinerja pada industri makanan dan minuman usai pandemi Covid-19 juga terus menunjukkan tren positif, baik dalam peningkatan produktivitas, investasi, ekspor hingga penyerapan tenaga kerja.

“Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, produk domestik bruto (PDB)

industri makanan dan minuman terus mengalami peningkatan. Pada kuartal II/2023, PDB industri makanan dan minuman tumbuh sebesar 4,62% (yoy). Meningkat di kuartal III/2023 menjadi 10,90%. Menunjukkan industri makanan dan minuman mampu terus menggeliat tengah ketidakpastian global,” pungkas Bamsoet. □

Kenaikan Pajak Hiburan

Bamsoet Dorong Pemerintah Kaji Ulang Kenaikan Pajak Hiburan

Suara para pelaku usaha hiburan perlu didengar dengan baik dalam proses pengambilan keputusan ini. Sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat lebih memperhitungkan berbagai aspek dan kepentingan yang ada.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mendorong pemerintah mempertimbangkan secara cermat dampak dari kenaikan pajak hiburan terhadap industri hiburan. Perlu dilakukan kembali kajian mendalam dan dialog yang lebih intensif dengan pelaku usaha hiburan guna mencari solusi terbaik yang dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan fiskal negara dan kelangsungan usaha para

pengusaha hiburan.

“Pemerintah dan DPR diharapkan untuk membuka ruang dialog yang lebih luas dengan melibatkan semua pihak terkait. Suara para pelaku usaha hiburan perlu didengar dengan baik dalam proses pengambilan keputusan ini. Sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat lebih memperhitungkan berbagai aspek dan kepentingan yang ada,” ujar Bamsoet usai menerima pemilik Phantom Rudy Salim di

Kebumen, Ahad (21/1/24).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) pasal 58 ayat 2, menyebutkan bahwa khusus tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% dan paling tinggi 75%. Kenaikan tersebut kemudian memunculkan sejumlah kontroversi dari para pelaku usaha hiburan.

“Kenaikan pajak hiburan sebesar ini dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap industri hiburan. Selain memberatkan para pelaku usaha, kenaikan pajak sebesar ini berpotensi menimbulkan dampak negatif. Seperti peningkatan harga tiket masuk, penurunan daya beli masyarakat, dan bahkan berdampak pada kelangsungan usaha para pelaku industri hiburan,” kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPi ini memaparkan, dibanding negara lain pajak hiburan di Indonesia tergolong tinggi. Dicontohkan, Thailand menerapkan pajak hiburan hanya 5% demi menarik wisatawan.

Merujuk pada The Economic Times, pemerintahan Thailand melakukan pemo-

tongan pajak minuman beralkohol dan tempat hiburan untuk meningkatkan pariwisata di negara tersebut. Langkah-langkah yang disetujui termasuk memotong pajak atas anggur dari 10% menjadi 5% dan menghilangkan pajak atas minuman beralkohol yang sebelumnya sebesar 10%. Selain itu,

pajak cukai tempat hiburan akan dikurangi setengahnya, dari 10% menjadi 5%.

“Kini Thailand merupakan negara ASEAN yang paling ramai akan wisatawan mancanegara. Pajak hiburan Indonesia yang melonjak tinggi ke tingkat minimum 40% merupakan posisi teratas dibandingkan

Singapura sebesar 15%, Malaysia yang berada di angka 10%, dan Amerika Serikat (Chicago) di angka 9%. Dikhawatirkan tingginya pajak hiburan di Indonesia, bisa membuat daya tarik Indonesia menurun dibandingkan negara-negara tetangga,” pungkas Bamsuet. □

Pencatatan Data Sektor UMKM

Lestari Moerdijat: Harus Mampu Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi Rakyat

Data usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang lengkap harus mampu mengakselerasi pengembangan sektor ekonomi kerakyatan di Indonesia.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

PENCATATAN data yang rinci dari para pelaku UMKM di tanah air merupakan langkah penting dalam pengembangan sektor ekonomi nasional,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Kamis (11/1).

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) telah menuntaskan pendataan lengkap koperasi dan UMKM 2022 dan tercatat 9,11 juta usaha di Indonesia, yang terdiri dari 9,09 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan 20 ribu koperasi.

Menurut Lestari, data terkait beragam UMKM di Indonesia harus dimanfaatkan semaksimal mungkin sebagai salah satu instrumen dalam proses pengembangan ekonomi kerakyatan. Sejumlah intervensi dalam upaya pemberdayaan usaha mikro misalnya, tambah Rerie sapaan akrab Lestari, akan lebih tepat sasaran dengan data yang akurat terkait kondisi setiap usaha.

Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah (Demak, Kudus dan Jepara) itu sangat berharap langkah yang lebih sistematis ini dapat berjalan dengan

konsisten sehingga dapat mewujudkan percepatan pengembangan sektor UMKM yang lebih terukur.

Karena, tegas Rerie, pertumbuhan sektor UMKM sekaligus berpotensi meningkatkan jumlah pelaku wirausaha di tanah air. Apalagi, ujar Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, berdasarkan catatan Kemenkop UKM, rasio kewirausahaan Indonesia berada di level 3,74%.

Sedangkan negara tetangga kita seperti Malaysia, Singapura dan Thailand, kata Rerie, memiliki

rasio kewirausahaan di atas 4%. Sementara, sebagian negara maju memiliki rasio kewirausahaan di angka 12%.

Rerie mendorong agar pemerintah di tingkat pusat dan daerah dapat bersinergi dengan baik dalam upaya menumbuhkan semangat kewirausahaan masyarakat, demi mewujudkan pembangunan nasional yang lebih baik dan merata di masa depan. *

Tingkatkan Daya Saing sektor UMKM

Sebelumnya, persisnya tanggal 29/12/2023, Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, juga menyampaikan keterangan tertulis terkait transformasi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam upaya meningkatkan daya saing harus dilanjutkan dalam rangka mewujudkan penguatan perekonomian nasional.

“Sejumlah upaya pemulihan perekonomian nasional harus dilakukan, termasuk melalui transformasi sektor UMKM, yang berdaya

saing,” ujar Rerie, sapaan Lestari Moerdijat.

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) menargetkan penciptaan wirausaha sebanyak 1 juta orang pada 2024. Saat ini, tercatat sebanyak 821.599 wirausaha berhasil diciptakan melalui 320 kegiatan di 27 kementerian/lembaga.

Sementara itu, program digitalisasi difokuskan pada penguatan sektor hulu. Inovasi pembiayaan akan terus didorong untuk memberikan kemudahan kepada pelaku UMKM dan koperasi, termasuk melalui credit scoring, serta menyelesaikan RUU

Perkoperasian.

Menurut Lestari, sejumlah upaya mencetak wirausaha baru yang tangguh harus terus dilakukan melalui berbagai inovasi agar mampu beradaptasi dengan tantangan zaman.

Dukungan sejumlah regulasi yang mampu mendorong pertumbuhan sektor ekonomi mikro, tegas Rerie, sangat dibutuhkan dalam upaya mengakselerasi para wirausaha muda di tanah air.

Upaya pemanfaatan program digitalisasi, jelas Rerie, harus terus dikembangkan dalam

rangka meningkatkan daya adaptasi para pelaku UMKM menjawab tantangan di era global. Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu mengakui, pemanfaatan teknologi digital dapat mempercepat ekspansi sektor UMKM hingga mancanegara.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu sangat berharap sejumlah program penguatan dan transformasi sektor UMKM dapat secara konsisten diterapkan agar mampu ikut mendorong peningkatan kinerja perekonomian nasional. □

Data sektor UMKM Harus Mampu Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi Rakyat

Data usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang lengkap harus mampu mengakselerasi pengembangan sektor ekonomi kerakyatan di Indonesia.

PENCATATAN data yang rinci dari para pelaku UMKM di tanah air merupakan langkah penting dalam pengembangan sektor ekonomi nasional,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Kamis (11/1).

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) telah menuntaskan pendataan lengkap koperasi dan UMKM 2022 dan tercatat 9,11 juta usaha di Indonesia, yang terdiri dari 9,09 juta usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan 20 ribu koperasi.

Menurut Lestari data terkait beragam UMKM di Indonesia harus dimanfaatkan semaksimal mungkin sebagai salah satu instrumen dalam proses pengembangan ekonomi kerakyatan.

Sejumlah intervensi dalam upaya pemberdayaan usaha mikro misalnya, tambah Rerie sapaan akrab Lestari, akan lebih tepat sasaran dengan data yang akurat terkait kondisi setiap usaha.

Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah (Demak, Kudus dan Jepara) itu sangat berharap langkah yang lebih sistematis ini dapat berjalan dengan



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

konsisten sehingga dapat mewujudkan percepatan pengembangan sektor UMKM yang lebih terukur.

Karena, tegas Rerie, pertumbuhan sektor UMKM sekaligus berpotensi meningkatkan jumlah pelaku wirausaha di tanah air.

Apalagi, ujar Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, berdasarkan catatan Kemenkop UKM rasio kewirausahaan Indonesia berada di level 3,74%.

Sedangkan negara tetangga kita, tambah

Rerie, seperti Malaysia, Singapura dan Thailand memiliki

rasio kewirausahaan di atas 4%. Sementara, sebagian negara maju memiliki rasio kewirausahaan di angka 12%.

Rerie mendorong agar pemerintah di tingkat pusat dan daerah dapat bersinergi dengan baik dalam upaya menumbuhkan semangat kewirausahaan masyarakat, demi mewujudkan pembangunan nasional yang lebih baik dan merata di masa depan. □

Diskusi Tata Kelola Ketahanan Energi

Lestari Moerdijat: Bangun Kemandirian Energi demi Kemakmuran Merata

Upaya membangun kemandirian dan keberlanjutan energi harus diwujudkan di tengah dinamika ketersediaan sumber mineral dan energi di tanah air, demi kemakmuran yang merata.

PADA periode transisi energi saat ini, kita harus berkomitmen penuh mengurangi dampak perubahan iklim dan menjamin pelestarian lingkungan yang mampu mendukung ketahanan energi yang kita miliki," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, saat membuka diskusi daring bertema: Tata Kelola Ketahanan Energi Indonesia Menuju 2045 yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (17/01/2024).

Diskusi yang dimoderatori Arief Adi Wibowo (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu dihadiri oleh Sugeng Suparwoto (Ketua Komisi VII DPR RI), Filda C. Yusgiantoro, S.T., M.B.M., M.B.A., Ph.D., (Ketua Umum Purnomo Yusgiantoro Center /PYC), dan Muhammad Kholid Syeirazi (Direktur Eksekutif Center for Energy Policy - Sekretaris Jenderal Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama), sebagai narasumber.

Selain itu hadir pula Tri Mumpuni (Anggota Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional/BRIN) dan Hadi Ismoyo (Praktisi Migas) sebagai penanggap.

Menurut Lestari, sesuai amanat konstitusi, implikasi perlindungan negara juga termasuk pemenuhan kebutuhan masyarakat yang secara khusus tertuang dalam Pasal 33 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945, terkait kekayaan alam yang dikelola negara harus dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.

Dalam konteks itu, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, pengelolaan sumber daya alam dan mineral di Indonesia selain menjamin ketahanan energi juga mesti menunjang kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.

Per November 2023, Dewan Energi Nasional (DEN) menyampaikan bahwa ketahanan energi nasional Indonesia berada pada angka 6,57, termasuk dalam kategori tahan. Di sisi lain, ujarnya, mengutip World Energy Outlook 2024, konsumsi energi global akan meningkat sebesar 1,8% karena permintaan besar dari pasar Asia.

"Bagaimana dengan kategori tahan itu kita



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

mampu mengantisipasi peningkatan konsumsi energi dan dinamika di sejumlah sektor," ujar Rerie, sapaan akrab Lestari. Karena itu, tegas Rerie, tata kelola ketahanan energi Indonesia, di samping dapat memenuhi kebutuhan domestik, juga harus mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia.

Seiring dengan perubahan maupun ketidakpastian dunia, menurut Rerie, yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, dibutuhkan perbaikan terkait inovasi kebijakan yang terintegrasi, sehingga dapat membantu mengembangkan sistem ketahanan energi yang efektif, efisien, dan transparan.

Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto mengungkapkan bahwa Indonesia perlu terus meningkatkan energy security, sekaligus harus bersiap menghadapi gejolak ketersediaan energi. Kebijakan energi yang tepat, ujar Sugeng, sangat diperlukan agar negara mampu merealisasikan ketersediaan energi dari sisi keterjangkauan harga dan mudah diperoleh.

Menurut Sugeng, energy security kita untuk bahan bakar minyak (BBM) saat ini sekitar 20 hari. Sedangkan di sejumlah negara energy security-nya sudah mencapai dua hingga tiga bulan. Padahal,

ungkap dia, konsumsi migas kita saat ini 1,4 juta barel per hari.

Di sisi lain, Sugeng juga menegaskan, Indonesia juga berkomitmen untuk merealisasikan nett zero emission dengan terus berupaya menurunkan emisi gas rumah kaca. Diakui Sugeng, energi yang bersumber dari fosil sudah menjadi masalah, sehingga tidak ada alasan lagi untuk tidak beralih ke pemanfaatan energi baru dan terbarukan.

Saat ini, ungkap Sugeng, Komisi VII DPR RI sedang memfinalisasi undang-undang energi baru terbarukan, merevisi undang-undang ketenagalistrikan dan menyusun rancangan undang-undang Migas. Secara umum, tegas Sugeng, paradigma kebijakan energi kita adalah melepaskan ketergantungan terhadap energi fosil.

Ketua Umum Purnomo Yusgiantoro Center (PYC), Filda C. Yusgiantoro, mengungkapkan, saat ini ada empat megatrend yang memengaruhi dunia, yaitu dampak ekonomi di Asia sangat luar biasa, persaingan dalam mengelola sumber daya alam, pemanfaatan teknologi dan perubahan iklim.

Saat ini, ujar Filda, terjadi tren peningkatan pemanasan global ketika terjadi peningkatan produksi CO2 yang menyebabkan suhu bumi naik. Diperkirakan, tambah dia, dari rentang

waktu 2000-2100 bila tidak ada upaya apa pun, suhu bumi akan meningkat 2,9 derajat Celcius.

Diakui Filda, progres realisasi SDGs sektor energi Indonesia stagnan, sehingga membutuhkan kualitas SDM yang lebih baik di sektor energi.

Filda juga menilai, capaian bauran energi baru terbarukan di Indonesia masih jauh dari target. Pemanfaatan energi di Indonesia saat ini, tambah dia, bersumber dari gas bumi (23%), batu bara (26%), minyak bumi (46%), dan energi baru terbarukan (5%).

Tata kelola kebijakan energi, tegas Filda, memerlukan perubahan paradigma terkait kesadaran masyarakat dalam melakukan diversifikasi dan konversi energi.

Direktur Eksekutif Center for Energy Policy, Muhammad Kholid Syeirazi, mengungkapkan, pada rentang waktu 2000-2050 energi fosil masih dominan, masyarakat dunia ingin membalikkan dominasi itu dengan mengutamakan energi baru terbarukan.

Pemanfaatan energi baru terbarukan 23% pada 2025, menurut Kholid, adalah target

yang mustahil diwujudkan. Karena, jelas dia, untuk merealisasikan transisi energi dibutuhkan sejumlah upaya, antara lain pengembangan energi baru terbarukan, melakukan pensiun dini PLTU, pemanfaatan hidrogen.

Tantangan untuk mewujudkan transisi energi, jelas dia, juga besar karena ketiadaan dana transisi, teknologi green energy mahal, harga jual produk green energy juga tinggi, dan ekosistem green energy juga belum memadai.

Kholid mengusulkan adanya petroleum fund di luar APBN yang bisa dimanfaatkan untuk mendanai proses transisi dan diversifikasi ke energi hijau.

Anggota Dewan Pengarah BRIN, Tri Mumpuni, berpendapat bahwa bangsa kita adalah bangsa yang tidak mau belajar dalam menyikapi pemanfaatan energi hijau. Sejak hampir 30 tahun lalu, ujar Tri Mumpuni, sudah mengusulkan agar sebagian hasil dari penjualan bahan bakar fosil disisihkan untuk pengembangan energi hijau.

Praktik serupa, menurut Tri Mumpuni, sudah dipraktikkan oleh Cina untuk mencari energi alternatif untuk mengganti energi fosil yang sudah menyusut.

Menurut Tri Mumpuni, selain mengupayakan transisi energi, Indonesia perlu meningkatkan kedaulatan energi. Dia menyarankan agar negara memberikan kesempatan pada masyarakat untuk mengembangkan potensi energi hijau.

Praktisi Migas, Hadi Ismoyo, berharap agar secepatnya RUU Migas menjadi undang-undang, agar menjadi dasar hukum bagi industri migas di tanah air. Untuk mengembalikan produksi migas 1 juta barel per hari, ujar Hadi, upaya eksplorasi harus ditingkatkan dan Pertamina seharusnya berada di garis depan dalam upaya tersebut.

Pemerintah, tegas Hadi, harus meningkatkan kapabilitas organisasi di sektor energi, karena kenyataannya masing-masing kementerian/lembaga terkesan memiliki agenda sendiri dalam menerapkan kebijakan. □

Delegasi Forum Komunikasi Pendidikan Alqur'an (FKPQ) DKI Jakarta

HNW: Para Guru Perlu Terus Mengajarkan Nilai-nilai Terkandung dalam Alqur'an

Perjuangan para pengajar Alqur'an sangat membanggakan. Mereka tetap melaksanakan tugasnya meski penghasilan yang diperoleh berupa honda (honor dari Allah) dan jauh di bawah pasukan orange.

WAKIL Ketua MPR yang juga Caleg DPR RI Partai Keadilan Sejahtera Dapil Jakarta II meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan luar negeri, Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, MA., merasa prihatin terhadap kesejahteraan para guru, termasuk ustad-ustadzah, para guru pengajar Alqur'an. Pendapat yang mereka peroleh dari mengajar Alqur'an masih jauh dari mencukupi, padahal usaha dan kerja kerasnya membumikan Alqur'an tak pernah berhenti dan sangat membantu pemerintah.

Perjuangan dan pengabdian para Guru Alquran, menurut politisi PKS yang biasa disapa HNW, ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Mereka turut membantu kewajiban negara mencerdaskan generasi muda,



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

menghadirkan kegiatan alternatif positif, dan itu sudah dirasakan masyarakat. Karena itu, sudah sewajarnya jika negara mengimbangi

dengan menyejahterakan para guru ngaji, sebagai apresiasi terhadap kegiatan dan pengabdian yang telah mereka jalankan



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

selama ini.

Pernyataan itu disampaikan oleh HNW usai menerima delegasi Forum Komunikasi Pendidikan Alqur'an (FKPQ) DKI Jakarta di Ruang Samithi, Gedung Nusantara V, Komplek MPR, DPR Senayan, Jakarta, Jum'at (19/1/2024). Delegasi FKPQ DKI Jakarta dipimpin Ketuanya, Ustad Ade Syaefudin.

Lebih lanjut, HNW menegaskan, ada banyak jalur yang bisa digunakan untuk memberikan apresiasi kepada guru-guru Pendidikan Alquran. Tidak hanya dengan UU atau mengubah UU, apalagi hanya mengandalkan aturan-aturan resmi yang dikeluarkan pemerintah daerah saja. Ada banyak kalangan, termasuk lembaga-lembaga zakat bisa diajak berkolaborasi untuk memikirkan dan meningkatkan kesejahteraan guru mengaji, dan itu perlu dilakukan sesegera mungkin," ungkap

anggota Komisi VIII DPR RI ini.

Di era tahun politik seperti sekarang ini, kata HNW, para guru tersebut juga penting mengajarkan nilai-nilai utama yang terkandung dalam Kitab Suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang sangat relevan di tahun politik. Seperti, nilai Iman, Taqwa, Amanah dan Ukhuwah, larangan menipu, berkhianat, berlaku dholim, dan lain-lainnya, yang kesemuanya sangat penting menjadi panduan kehidupan di era tahun politik baik bagi warga Jakarta maupun Indonesia pada umumnya.

"Di tahun-tahun politik nilai-nilai tersebut sangat penting. Berpolitik dengan Iman, Taqwa, Ukhuwah tidak memecah belah, tidak khianat, tidak memfitnah dan tidak mengumbar hoax," tambah HNW. Karena itu, sebaiknya para guru, terlebih pemerintah DKI Jakarta, bisa saling berkolaborasi untuk menghadirkan hak serta kewajiban masing-

masing agar tujuan dalam bernegara bisa tercapai.

"Kita di parlemen tidak pernah capek mengusahakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, termasuk para guru Alqur'an, tetapi, belum semua keinginan itu bisa tercapai. Misalnya, keinginan meredistribusi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN agar menjangkau seluruh guru, tak terkecuali guru Alqur'an," pungkas HNW.

Sebelumnya, ketua delegasi Forum Komunikasi Pendidikan Alqur'an (FKPQ) DKI Jakarta, Ustad Ade Syaefudin mengatakan, perjuangan para pengajar Alqur'an ini sangat membanggakan. Mereka tetap melaksanakan tugasnya, meski penghasilan yang diperoleh berupa honda (honor dari Allah) dan jauh di bawah pasukan orange. Beruntung, banyak orang yang tidak membiarkan situasi tersebut, dan ikut mengusahakan perbaikan meski tidak mengutarakannya secara terbuka.

Pada kesempatan tersebut, Ustad Ade Syaefudin mewakili para guru Pendidikan Alqur'an juga berterima kasih atas perjuangan HNW yang telah mengusahakan bantuan dari Kementerian Sosial, meski perjuangan tersebut tidak diketahui oleh para guru yang menerima.

"Sudah banyak yang Pak Hidayat usahakan untuk guru-guru Pendidikan Alqur'an. Harapan kami, Bapak tidak lelah terus membantu mewakili dan memperjuangkan aspirasi para guru, termasuk untuk memperoleh anggaran operasional yang memang sangat dibutuhkan lembaga Pendidikan Alqur'an," ujar Ustad Ade Syaefudin. □



Serap Aspirasi para Pakar di Bandung dan Depok



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Badan Pengkajian MPR menggelar FGD di Kota Bandung dan Depok. Di sana bersama dengan para pakar atau ahli membahas berbagai masalah ke-MPR-an. Ada yang datang dari Universitas Padjadjaran, Universitas Bung Karno, dan Universitas Muhammadiyah Jakarta. FGD dilakukan untuk menampung pendapat para ahli guna menyempurnakan konstitusi. Diuraikan secara detail hubungan antarlembaga negara dan Sidang Tahunan MPR. Dikatakan MPR sebagai constitutional identity Indonesia.

BERTEMPAT di Kota Bandung, Jawa Barat, 15 Desember 2023, Badan Pengkajian MPR bersama dengan para pakar menggelar *Focus Group Discussion* (FGD). FGD dengan tema: *Hubungan Antarlembaga Negara* itu dihadiri oleh Agun Gunandjar Sudarsa (Fraksi Partai Golkar), Slamet Ariyadi (Fraksi PAN), Maman Imanul Haq (Fraksi PKB), dan Sodik Mudjahid (Fraksi Partai Gerindra) dari pihak Badan Pengkajian MPR. Sedang para pakar dari Universitas Padjadjaran hadir Dr. Indra Perwira, SH., MH.; Dr. Ali Abdurahman, SH., MH.; Dr. Mei Susanto, SH., MH.; dan Rahayu Prasetyaningsih, SH., MH.

Dalam makalahnya, Ali Abdurahman mengatakan, Pasal 2 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara. Rumusan dalam Pasal 2 ayat (2) UUD tidak mengalami perubahan.

Dirinya bertanya makna sidang? Disebut ruang bagi sekelompok/ sejumlah orang atau institusi tertentu untuk membahas urusan-urusan tertentu yang menghasilkan keputusan atau penetapan atau

melaksanakan kegiatan tertentu. Selain itu sidang menghasilkan produk hukum. Ditambahkan, sidang ada yang formal dan seremonial.

Menurut Ali Abdurahman, sidang yang dilakukan institusi tertentu berkaitan dengan materi yang menjadi urusan, wewenang, atau kompetensinya. Sidang yang dilakukan lembaga negara berkaitan dengan tugas, wewenang, dan kompetensinya.

Diuraikan tentang sidang-sidang MPR, yakni mengubah UUD, menetapkan UUD, melantik Presiden dan Wakil Presiden, memutuskan usul DPR tentang pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya, memilih Presiden dan Wakil Presiden jika keduanya berhenti secara bersamaan.

Dalam makalah yang ada, Rahayu Prasetyaningsih menulis soal Laporan, Pertanggungjawaban, dan Akuntabilitas. Diuraikan, istilah akuntabilitas (*accountability*) sering dipergunakan beriringan dengan atau dianggap sinonim dengan *responsibility*, dan *answerability*. Konsep *accountability* pada dasarnya adalah bahwa penerima tanggung jawab harus selalu siap untuk “*calling to account*”



menjelaskan pertanggungjawaban (*explanation of responsibility*). *Accountability* – *the obligation to perform* - beban pertanggungjawaban untuk memastikan kewajiban untuk menyelenggarakan (*responsibility*) dapat dilaksanakan.

Responsibility disebut sebagai *the obligation to act* – melakukan suatu tindakan/ menyelenggarakan. *Accountability* - *the obligation to answer for responsibilities* (kewajiban untuk memberikan jawaban atas tindakan (*responsibility*)). *To be accountable just is to be answerable* – memberikan jawaban atas responsibilitas, adanya kewajiban untuk memberikan informasi dan penjelasan atas tindakan atau pelaksanaan dari kewajiban. *Accountability* lebih jauh lagi termasuk di dalamnya kemungkinan untuk adanya sanksi/hukuman akibat tindakan yang tidak sesuai. “Dan, yang menyamakan antara *accountability* dan *responsibility* adalah adanya kewajiban untuk membuat laporan

yang seringkali tidak jelas,” paparnya.

Dirinya menguraikan macam akuntabilitas. Ada akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) - *citizens holding officials account-*



able, hubungan antara pihak yang tidak sederajat (*unequal*) antara pemerintah dan rakyat (warga negara). Akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*) *officials holding one another accountable*, hubungan antarlembaga yang kurang lebih sederajat, di antara cabang-cabang kekuasaan. Dan *diagonal accountability* merepresentasikan sejauh mana aktor di luar penyelenggara Negara, misalnya media massa, NGO, ormas.

Diungkap oleh Rahayu, pendapat lainnya dalam hal kepada siapa akuntabilitas ditujukan. Dalam sektor publik dikenal apa yang disebut dengan *multiple accountability*. Richard Heeks (1998) berpendapat, pada sektor publik dikenal beberapa jenis akuntabilitas, yaitu: (1). *Managerial accountability* adalah akuntabilitas kepada pimpinan yang lebih tinggi dalam suatu organisasi; (2). *Political accountability* menunjuk kepada institusi yang memberikan legitimasi politik



kepada instansi yang bersangkutan; (3). *Financial accountability* menunjuk kepada institusi yang menyediakan/memberikan anggaran kepada institusi yang bersangkutan; (4). *Public accountability* menunjuk kepada warga negara/masyarakat; (5). Menurut Heeks, akuntabilitas ini merupakan kombinasi dari *ultimate political accountability* (bila lembaga ini mendapatkan legitimasinya dari rakyat/dipilih rakyat) dan *client accountability* jika lembaga ini bertanggungjawab memberikan pelayanan langsung pada rakyat (*public service obligation*).

Diterangkan macam-macam *accountability* lainnya. Pembagian dari sudut *Public Service Accountability* (Joseph G. Jabbar & O.P. Dwivedi, 1989). (1). *Democratic accountability*, merepresentasikan gabungan antara akuntabilitas politik dan administratif. Pemerintah bertanggungjawab kepada pimpinan politik negara atas tindakan dan kinerjanya, menteri kepada parlemen (dalam sistem parlementer), dan pegawai negeri kepada menteri. (2). *Professional accountability*, para professional seperti dokter, insinyur, ahli hukum, ahli ekonomi, dan lain sebagainya, bertanggung jawab kepada publik atas kinerjanya berdasarkan norma-norma keprofesionalan yang disepakati atau pertanggungjawaban kinerja sesuai dengan keahlian yang disandangnya.

(3). *Legal accountability*, pertanggungjawaban secara hukum kinerja individu atau unit-unit pemerintahan atas kegiatan menghasilkan dan menyajikan barang dan jasa kepada publik; atau pertanggungjawaban kinerja atas dasar pelaksanaan ketentuan hukum yang berlaku. (4). *Organizational/Administrative accountability*, yakni pertanggungjawaban hierarkhis pelaksanaan perintah dari unit-unit organisasi ke pusat/atasan/pimpinan administrasi. (5). *Political accountability*, pertanggungjawaban pejabat politik atas keputusan politik yang telah dibuat dan dijalankannya kepada public. (6). *Moral accountability*, yakni pertanggungjawaban kinerja atas dasar nilai-nilai etika/moral yang berlaku.

Lebih lanjut dalam makalah itu diterangkan, secara sederhana macam Akuntabilitas meliputi: Akuntabilitas managerial adalah proses di mana penerima delegasi harus bertanggungjawab (memberikan jawaban) atas pelaksanaan tugas yang sudah disepakati berdasarkan kriteria dan standar yang sudah disepakati. Dalam hal ini adanya format laporan kinerja dapat dikembangkan, pada dasarnya ada 3 komponen penting dalam akuntabilitas ini, yaitu: adanya indikator/standar yang disepakati, prinsip bukti yang akurat, relevan, dan cukup, serta proses penilaian yang akurat dan baik. Akuntabilitas ini cenderung bersifat administratif. Pakta



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

integritas dapat digunakan.

Akuntabilitas politik, proses di mana penerima delegasi harus bertanggung jawab (memberikan jawaban) atas tindakan yang dilakukannya pada publik. Publik mempunyai pengetahuan, latar belakang, persepsi, kebutuhan dan masalah yang berbeda yang akan memengaruhi penilaian atas akuntabilitas itu sehingga apapun yang menjadi indikator atau kriterianya akan mendapat reaksi dan respon yang berbeda, sehingga penyeragaman format akuntabilitas di sini bukanlah menjadi hal utama. Akuntabilitas politik yang disampaikan sekurang-kurangnya mengandung 3 elemen, yaitu: alasan, justifikasi, dan penjelasan yang jelas dan mudah dipahami publik.

Setelah melaksanakan FGD di Bandung, Badan Pengkajian MPR selanjutnya melakukan hal serupa di Kota Depok, Jawa Barat, pada 21 Desember 2023. FGD kali ini bertema: *Pelaksanaan Sidang Tahunan MPR*. Hadir dari Badan Pengkajian adalah Tifatul Sembiring dari Fraksi PKS, Guntur Sasono dari Fraksi Partai Demokrat, Yanuar Prihatin dari Fraksi PKB, dan Darmadi Duriyanto dari Fraksi PDI Perjuangan.

Sedang dari pakar hadir Wakil Rektor I Universitas Bung Karno, Dr. Ismail, S.H.; dan Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Prof. Dr. Ibnu Sina Chandranegara.

Ibnu Sina dalam makalahnya menyebut-



kan, ada tiga pokok permasalahan, yakni: bagaimana pelaksanaan dan format Sidang Tahunan MPR yang ideal sebagai forum penyampaian Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara kepada rakyat atas pelaksanaan kerjanya masing-masing dalam satu tahun?

Apakah MPR dapat dibenarkan untuk memberikan rekomendasi atas Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara (tidak mengikat) untuk perbaikan kinerja lembaga-lembaga negara tahun berikutnya? Dan, apakah MPR dapat dibenarkan melalui Peraturan Tata Tertib MPR RI mengatur Sidang Tahunan dengan agenda Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara?

Dia menyebutkan, MPR sebagai *constitutional identity Indonesia*. Hal demikian berdasarkan pada referensi Gary Jeffrey Jacobsohn (2006) yang menyebutnya sebagai *constitutional identity yang dimaknainya sebagai the specific identity of any given constitution. Representing a mix of aspirations and commitments expressive of a nation's past, constitutional identity also evolves in ongoing political and interpretive activities in courts, legislatures, and other public and private domains.*

Juga pada pemikiran Aidul Fitriadi Azhari (2014) yang mengaitkannya tradisi bernegara yang mungkin saja dipengaruhi oleh modernisasi, sehingga tradisi bisa saja bergeser atau justru menjadi *ethno-*

nasionalisme. Dikatakan, dalam doktrin, constitutional identity sendiri dapat dibagi kedalam tiga bentuk, yaitu: bentuknya yang fundamental, bentuknya yang instrumental, dan bentuknya yang alamiah.

Diuraikan tentang sidang tahunan dan konvensi ketatanegaraan MPR. Dijelaskan, konvensi ketatanegaraan memiliki sifat-sifat non legal rules. Tujuan konvensi dikehendaki, antara lain: (i) keinginan meneruskan tradisi pemerintahan konstitusional, (ii) keinginan untuk mempertahankan jalannya roda pemerintahan yang rumit tetap berjalan secara teratur, dan (iii) keinginan untuk mempertahankan kepercayaan publik dan kekuasaan.

MPR menyelenggarakan sidang dalam rangka pelaksanaan wewenang dan tugas MPR (Pasal 63 (2) Peraturan MPR No 1 Tahun 2019 tentang Tatib). Seketika perihal sidang tahunan diatur dalam suatu UU maka itu bukan lagi dipadankan dengan konvensi ketatanegaraan. (Pasal 63 (4) Tatib MPR.

Dirinya menjelaskan tentang format mendengarkan kinerja lembaga negara. Disebut tidak terdapat format baku, format penyelenggaraan dapat bertahan pada konvensi ketatanegaraan (tidak perlu diatur dalam peraturan, melainkan dapat berbentuk putusan atau penetapan). Pidato tahunan bukan sebagai sarana pengawasan sehingga tidak perlu adanya rekomendasi.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI



Pidato tahunan menyangkut kemerdekaan dan kinerja menyambut peringatan kemerdekaan, tidak perlu dikaitkan dengan hal teknis mengenai Nota Keuangan RAPBN (Pidato Nota keuangan bisa di bulan Mei). “Saya berpendapat cabang kekuasaan kehakiman tidak perlu dilibatkan”, ujarnya.

Menurut Ismail, format Sidang Tahunan MPR yang ideal adalah dalam sidang tahunan lembaga negara menyampaikan laporan kinerja dalam kurun 1 tahun dengan konsep: Tanggal 14, Laporan Kinerja Lembaga MPR, DPR dan DPD; Tanggal 15, Laporan Kinerja Lembaga MA, MK dan KY.; Dan, tanggal 16, Laporan Kinerja Lembaga BPK dan Lembaga Presiden.

Setelah lembaga negara menyampaikan laporan kinerja, MPR melakukan evaluasi, dan MPR dapat memberikan rekomendasi kepada lembaga negara tersebut. Tujuan Rekomendasi tersebut dalam perspektif *check and balance*.

Ditegaskan, berdasarkan ketentuan Pasal 8 UU. No. 12 Tahun 2011 (dan perubahannya), MPR mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Peraturan MPR. Alasan penerbitan Peraturan MPR, yakni menindaklanjuti UU, bersifat responsive dan menjawab kebutuhan.

Berdasarkan hal tersebut MPR dapat menerbitkan Peraturan MPR dengan substansi laporan kinerja lembaga negara yang kewenangannya diatur oleh UUD. □



Dr. H. Bambang Soesatyo, SE., SH., MBA.

Ketua MPR RI

Tentang Bonus Demografi Ketika Lanskap Dunia Kerja Berubah

ARTIFICIAL intelligence (AI) dan semakin pesatnya perkembangan atau progres digitalisasi terus mengubah mekanisme kerja pada hampir semua sektor, termasuk aktivitas produksi sektor industri manufaktur, perdagangan, dan jasa lainnya. Konsekuensi ikutannya tentu saja mengubah lanskap dunia kerja, karena permintaan pasar kerja akan kualifikasi pekerja juga berubah. Menuju bonus demografi dalam satu-dua dekade mendatang, Indonesia harus menanggapi perubahan lanskap dunia kerja itu dengan program-program yang adaptif dan berfokus pada kompetensi angkatan kerja.

Sudah menjadi pengetahuan bersama bahwa aktivitas sektor industri manufaktur, proses produksi, dan juga sektor-sektor jasa terus beradaptasi dengan progres digitalisasi yang didukung oleh ragam platform digital. Dalam hidup keseharian, masyarakat juga sudah menikmati ragam layanan digital. Layanan transportasi, belanja aneka kebutuhan hingga beli makanan-minuman sampai layanan jasa bank.

Berpijak pada fakta seperti itu, semua orang dengan mudah bisa membuat kesimpulan bahwa sejumlah pekerjaan tidak lagi dilakukan atau dilayani oleh keahlian dan kreativitas manusia dalam statusnya sebagai pekerja atau karyawan. Bagi publik perkotaan, fakta tentang hilangnya peran layanan manusia sangat mudah ditemukan saat membayar tarif tol atau tarif parkir di perkantoran maupun pusat-pusat belanja. Ragam layanan jasa

perbankan pun sudah mengandalkan teknologi digital. Sejumlah laporan menyebutkan bahwa industri perbankan telah menutup begitu banyak kantor cabang, serta mem-PHK (pemutusan hubungan kerja) sampai ribuan karyawan.

Tema tentang hilangnya banyak pekerjaan akibat digitalisasi sudah begitu sering dibicarakan. Sebaliknya, pada saat bersamaan, munculnya pekerjaan atau profesi baru yang lahir dari digitalisasi pun sudah berulang kali dikemukakan. Semua orang, utamanya generasi muda, diingatkan bahwa progres digitalisasi dan pemanfaatan AI tidak akan menimbulkan bencana atau disrupsi pada aspek ketenagakerjaan. AI atau digitalisasi hanya mengubah lanskap dunia kerja, sehingga permintaan pasar kerja akan kualifikasi pekerja pun banyak berubah. Permintaan pasar kerja era terkini atau Industri 4.0 tidak sama lagi dengan era sebelumnya.

Selain hasil dari sejumlah penelitian terdahulu, laporan dari Forum Ekonomi Dunia (WEF) bertema Future of Work 2023 layak untuk disimak dan dipertimbangkan, sebab laporan ini memberi gambaran tentang perubahan drastis lanskap dunia kerja akibat digitalisasi dan pemanfaatan AI. Menurut Peneliti WEF, 23% dari tenaga kerja di segala bidang industri bakal berubah total dalam lima tahun ke depan, karena banyak pekerjaan pola lama yang tereliminasi akibat tampilnya peran profesi baru.

Pada 2027, masih menurut perkiraan WEF, 69 juta posisi pekerjaan baru tercipta. Namun, dalam rentang

waktu yang sama, sekitar 83 juta pekerjaan akan hilang. Perkiraan ini menjelaskan bahwa digitalisasi dan pemanfaatan AI menyebabkan pasar kerja butuh pekerja dengan kualifikasi baru untuk mengimplementasi perangkat AI. Sebab, munculnya sejumlah profesi baru berbasis AI menyebabkan pekerjaan administratif pola lama semakin minim pemanfaatannya.

Didorong oleh kecenderungan yang tak terelakan itu, kesadaran serta pemahaman tentang perubahan lanskap dunia kerja itu perlu semakin diintensifkan di dalam negeri. Dan, negara hendaknya menjadi instrumen terdepan yang menyebarkan pemahaman dan kesadaran di kalangan generasi muda, utamanya generasi Z.

Karena dunia kerja berubah, orang-orang muda harus diberi ruang dan kesempatan untuk membangun kompetensi agar mereka tidak gagap menanggapi perubahan zaman. Untuk generasi Z, misalnya, mereka harus memperoleh informasi yang lebih mendetil tentang kebutuhan pasar kerja pada era digitalisasi dan pemanfaatan AI, termasuk profesi baru dengan ragam kualifikasinya.

Tak kalah pentingnya adalah respons dunia pendidikan karena berkait langsung dengan urgensi literasi digital bagi masyarakat, serta upaya memberi ruang bagi orang muda membangun kompetensi mereka. Tentunya, dibutuhkan penyesuaian kurikulum pendidikan yang relevan untuk menyiapkan orang-orang muda agar kompeten beradaptasi dengan progres digitalisasi dan pemanfaatan AI.

Faktor lain yang tidak bisa dipisahkan adalah keharusan menyediakan infrastruktur teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di dalam negeri yang benar-benar mumpuni. Karena Indonesia sudah melakoni digitalisasi, percepatan pembangunan infrastruktur TIK yang mumpuni tidak bisa ditawar-tawar lagi. Pemerintah hendaknya lebih bersungguh-sungguh mewujudkan infrastruktur TIK yang handal.

Saat ini, dapat diasumsikan bahwa kapasitas dan kapabilitas

Infrastruktur TIK Indonesia belum mumpuni, karena target pembangunannya masih jauh dari rampung. Oleh pemerintah, pembangunan infrastruktur TIK ditargetkan rampung pada 2032. Oleh karena perubahan berlangsung begitu cepat, upaya merampungkan pembangunan infrastruktur TIK patut diprioritaskan agar jaringan internet bisa tersedia di semua wilayah tanah air.

Jangan lagi ada wilayah atau desa yang berstatus blank spot. Pemerintah pernah mencanangkan program Desa Digital untuk menggabungkan TIK dalam pelayanan publik dan kegiatan perekonomian di desa. Orang-orang muda di pedesaan tentu sangat berharap program seperti ini segera direalisasikan.

Sangat relevan pula untuk mengaitkan perubahan lanskap dunia kerja saat ini dengan bonus demografi Indonesia dalam satu-dua dekade mendatang. Pada tahun 2045, Indonesia akan mendapatkan bonus demografi. Pada dekade itu, 70% dari jumlah penduduk Indonesia dalam usia produktif (15-64 tahun). Dan, sisanya 30 persen, merupakan komunitas penduduk yang tidak produktif (usia di bawah 14 tahun dan di atas 65 tahun).

Pada dekade 2030-2040-an itu, progres digitalisasi mungkin semakin pesat dan pemanfaatan AI semakin luas. Kalau sebagian saja dari 70% penduduk Indonesia usia produktif itu tidak cukup kompeten dengan dunia kerja saat itu, tentu akan menimbulkan masalah. Jika bonus demografi tidak dapat dimanfaatkan dengan baik, dampaknya cukup serius. Akan muncul masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, memburuknya kesehatan komunitas tertentu hingga tingginya kriminalitas.

Dalam konteks menciptakan lapangan kerja baru di era digitalisasi, otomatisasi dan pemanfaatan AI, negara harus peduli pada upaya membangun kompetensi angkatan kerja atau komunitas penduduk usia produktif. □

Ngobrol Bareng Legislator

Syarief Hasan Minta Masyarakat Jangan Sampai Terjerat Pinjaman Online

Pinjaman dari Pinjol merupakan awal masalah baru. “Setelah mendapat uang dari Pinjol, saat itu pula seseorang akan mendapat kesulitan luar biasa yang tak terbayangkan sebelumnya,” ujar Wakil Ketua MPR RI, Prof. Dr. Sjarifuddin Hasan, MM, MBA., mengingatkan.

WAKIL Ketua MPR Prof. Dr. Sjarifuddin Hasan, MM, MBA, menyebutkan Pinjaman Online (Pinjol) sudah menjadi isu lama, manfaat Pinjol amat sedikit, tetapi persoalan yang ditimbulkannya sangat rumit. Karena itu, dia menyarankan kepada masyarakat untuk menghindari Pinjol. Alasannya, pinjaman dari Pinjol akan memberatkan nasabah yang meminjam karena bunga pinjaman dari Pinjol jauh lebih besar dari bunga bank biasa. Sekalipun ada Pinjol yang resmi dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), masyarakat sebaiknya menghindari Pinjol.

“Masyarakat agar tidak masuk dalam lingkaran jebakan Pinjol. Memang pada saat menerima pinjaman dari Pinjol seakan-akan bisa mengatasi masalah keuangan, tetapi pada saat mengembalikan pinjaman akan muncul masalah yang luar biasa,” saran Sjarifuddin Hasan ketika menjadi pembicara dalam “Ngobrol Bareng Legislator” dengan tema: “Pinjaman Online: Manfaat dan Resiko Bagi Pembiayaan UMKM” di Aula Serba Guna Kampung Cipanas, Desa Ciharahas, Kecamatan Cilaku, Cianjur, Ahad petang (28/1/2024).

Berbicara tentang Pinjol, Syarief Hasan meminta masyarakat untuk mencermati bunga pinjaman yang ditawarkan Pinjol. “Apabila tingkat suku bunga Pinjol melebihi dari bunga bank umum, maka hal itu cepat atau lambat sudah pasti sebuah modus penipuan. Selain itu, modusnya juga gali lubang tutup lubang. Satu nasabah hilang, akan ada nasabah lain. Mereka adalah sebuah sindikat, dan akhirnya merugikan kita semua. Kalau ada Pinjol yang mengatakan bunga pinjaman lebih rendah dari bunga bank maka pastilah itu penipuan,” papar Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat ini.

Anggota Komisi I DPR RI itu mengakui bahwa Fintech seperti Pinjol memang ada yang sudah mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tetapi, masyarakat kadang



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

sulit membedakan antara Pinjol yang mendapat izin dan Pinjol yang ilegal. “Sekalipun ada Pinjol yang resmi, bunga pinjaman Pinjol akan lebih tinggi dari bunga bank. Kalau bunga Pinjol lebih tinggi dari bunga bank maka pasti akan menyulitkan nasabah. Jadi, lebih bagus hindari Pinjol,” imbuhnya.

Syarief Hasan menambahkan, alasan orang tertarik dengan Pinjol adalah karena prosedur mendapatkan pinjaman secara mudah dan cepat. Sementara untuk mendapatkan pinjaman dari bank resmi harus melalui banyak persyaratan. “Kelemahan perbankan inilah yang dimanfaatkan Pinjol karena memberi kemudahan dan kecepatan mendapat pinjaman. Pinjol mengambil kesempatan di tengah-tengah kesulitan keuangan yang dialami seseorang. Masyarakat pun kemudian tertarik meminjam uang di Pinjol,” jelasnya.

Ketika menerima uang pinjaman dari Pinjol, lanjut Syarief Hasan, masalah keuangan yang dialami seseorang seolah-olah sudah teratasi. Padahal, pinjaman dari Pinjol merupakan awal masalah baru. “Setelah

mendapat uang dari Pinjol, saat itu pula seseorang akan mendapat kesulitan luar biasa yang tidak terbayangkan sebelumnya,” tuturnya.

Menurut Syarief Hasan, kerugian dari Pinjol tidak hanya berupa materi (membayar bunga pinjaman yang tinggi), tetapi juga mengganggu keamanan, ketenteraman, dan kenyamanan pribadi. Ketika Pinjol menagih pinjaman, kadang-kadang dilakukan dengan cara di luar nalar, menggunakan pihak lain dan cara-cara ancaman disertai kekerasan. “Ini mengganggu kenyamanan peminjam. Bahkan, sering terjadi peristiwa yang tidak diinginkan, seperti bunuh diri, perceraian, dan lainnya, karena terjerat Pinjol,” tambahnya.

Syarief Hasan mengakui mereka yang meminjam di Pinjol kadang-kadang karena memang tidak ada opsi (pilihan) lain. “Seakan-akan Pinjol mengatasi masalah kesulitan keuangan yang dialami seseorang. Padahal, Pinjol adalah jebakan utang yang menjadi masalah baru. Karena itu, lebih baik mencari jalur resmi dengan meminjam uang di bank-bank resmi,” pungkasnya. □



Dari Daendels ke Habibie

Berawal dari suatu bengkel senjata yang didirikan oleh Daendels, PT. Pindad (Persero) sekarang menjelma sebagai penyedia alutsista yang bisa diandalkan. Perjalanan panjang yang dilalui membuat perusahaan yang berada di Kota Bandung itu menjadi BUMN kebanggan bangsa Indonesia. Produksinya diminati oleh banyak negara. Direktur Utama I PT. Pindad adalah pria yang selanjutnya menjadi Presiden ket-tiga Republik Indonesia Prof. Dr.-Ing. Ir. H. Bacharuddin Jusuf Habibie, FEng.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

PADA tanggal 7 Januari 2023, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar Debat III Calon Presiden. Debat ketiga dengan tema *Pertahanan, Keamanan, Internasional, Globalisasi, Geopolitik, dan Politik Luar Negeri* yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, itu berlangsung sangat menarik bahkan tensi perdebatan dibilang pada suhu yang panas.

Sesuai tema dalam perdebatan arus utama berputar soal penyediaan alat utama sistem senjata (alutsista). Berbicara tentang alutsista, bangsa ini sesungguhnya memiliki produsen yang produksinya bisa diandalkan. Produk yang ada tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, namun sudah banyak diminati oleh negara lain.

Produsen alutsista dan sarana pendukungnya milik bangsa itu satu di antaranya adalah PT. Pindad (Persero). Perusahaan yang berada di Kota Bandung, Jawa Barat, itu memiliki sejarah yang sangat panjang. Disebut dalam *Wikipedia*, pabrik yang saat ini memproduksi senjata, kendaraan militer, dan produksi non-militer itu berawal dari prakarsa Gubernur Jenderal Hindia-Belanda Herman Willem Daendels. Di awal kekuasaannya sebagai gubernur jenderal, tahun 1808, pria kelahiran Hattem, Belanda, itu mendirikan bengkel untuk memproduksi, memelihara, dan memperbaiki senjata.

Bengkel yang dinamakan *Constructie Winkel* (CW) itu berada di Surabaya. "Gubernur Jenderal Daendels menjadikan Surabaya sebagai tempat gudang persenjataan yang belakangan berkembang menjadi industri penting," tulis Haword Dick dalam *Surabaya, City of Work: A Socioeconomic History, 1900-2000* (2003).

Lebih lanjut dalam *Wikipedia* dikatakan, CW akhirnya menjadi industri pertahanan pertama yang ada di Hindia-Belanda. Untuk menambah kekuatan militer Belanda agar mencukupi kebutuhan pertahanan di wilayah jajahan dan ada juga yang dikirim ke Belanda untuk berperang melawan Perancis, Daendels juga membangun industri serupa di Semarang. Pabrik yang berada di Semarang itu merupakan bengkel amunisi berskala besar. Bengkel itu dinamakan *Proyektieel Fabriek* (PF).

Dari waktu ke waktu industri pertahanan



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

yang dikembangkan oleh pemerintah kolonial semakin penting, maju, dan strategis. Titik awal yang diprakarsai oleh Daendels terus dibiakkan, buktinya pada tahun 1850, pemerintah Hindia Belanda mendirikan bengkel produksi dan perbaikan amunisi dan bahan peledak untuk Angkatan Laut, yakni *Pyrotechnische Werkplaats* (PW). PW juga dibangun di Surabaya.

Pembangunan industri pertahanan pada masa itu tidak hanya sukses memproduksi senjata, namun juga sukses dalam tata Kelola. CW pada awal tahun 1851 namanya diubah menjadi *Artilerie Constructie Winkel* (ACW). Sepuluh tahun kemudian atau tepatnya tahun 1861, PW dilebur ke dalam

ACW. Peleburan ini membuat ACW memiliki tiga unit produksi, yakni produksi senjata dan perkakasnya, produksi amunisi dan bahan peledak, serta unit laboratorium penelitian.

Meski Perang Dunia I yang terjadi pada tahun 1914 pecah di Eropa, Afrika, Timur Tengah, Kepulauan Pasifik, Cina, dan lepas pantai Amerika Selatan dan Utara, namun hal demikian juga membuat *ketar-ketar* pemerintahan Kolonial Belanda. Mereka memikirkan bagaimana aset-aset yang dimiliki itu tetap aman. Untuk menyelamatkan ACW, pemerintah Kolonial Belanda merelokasi atau memindahkan pabriknya dari Surabaya dan kota lainnya ke Bandung.

Bandung dipilih sebagai tempat





mengamankan ACW dengan alasan kota yang disebut sebagai Ibu Kota Priangan itu dikelilingi oleh perbukitan dan pegunungan. Tak hanya ada benteng alam, namun ia juga diakui sebagai wilayah yang strategis sebab dilalui oleh Jalan Raya Pos dan ada jalur kereta api milik Staatsspoorwegen.

Pemindahan dari Surabaya ke Bandung dilakukan secara bertahap, mulai tahun 1918 hingga 1920. Sementara PF yang berada di Semarang diboyong ke Bandung pada tahun 1932. Yang berada di Jatinegara, Batavia (Jakarta), yang berupa Institut Pendidikan Pemeliharaan dan Perbaikan Senjata juga dipindahkan ke Bandung. Lembaga pendidikan itu di *Wikipedia* disebutnya

Geweemarkerschool. Semua yang dipindah ke wilayah yang sekarang menjadi Ibu Kota Provinsi Jawa Barat itu selanjutnya dilebur dalam satu perusahaan yang namanya *Artilerie Inrichtingen* (AI).

Saat Perang Dunia II meletus di banyak negara, terutama di Eropa, membuat pabrik senjata di Hindia-Belanda meningkatkan produksinya. Dalam *www.cnbcindonesia.com*, 24 Januari 2024, diungkap Kek Beng Kwee dalam *Doea Poeloe Lima Tahun Sebagai Wartawan: 1922-1947* (1948) menyebut, jumlah pegawai meningkat setelah Belanda diserang tentara NAZI Jerman pada 10 Mei 1940.

Pegawai PW naik dari 2.300 orang menjadi

25.000 orang. Pegawai ACW naik dari 750 menjadi 5.000 orang. Namun, menaikkan kapasitas produksi itu tak diikuti menangnya tentara Belanda melawan tentara Jepang.

Kekalahan Belanda melawan Jepang itu terungkap di *Wikipedia*. Diceritakan, pada masa pendudukan Jepang di Hindia-Belanda, AI tidak mengalami perubahan. Hanya saja nama unit-unitnya diubah, seperti unit produksi senjata diubah menjadi *Dai Ichi Kozo*, *Geweemarkerschool* diubah menjadi *Dai Ni Kozo*, unit laboratorium penelitian diubah menjadi *Dai San Kozo*, unit produksi amunisi diubah menjadi *Dai Shi Kozo*, dan *Monrage Artilerie* diubah menjadi *Dai Go Kozo*.

Kekalahan Jepang pada Sekutu dan kemerdekaan yang diproklamasikan oleh Bangsa Indonesia membuat semua asset yang dimiliki oleh pemerintah Kolonial Belanda direbut oleh rakyat. AI pada 9 Oktober 1945 direbut oleh Laskar Pemuda. Laskar itu tak hanya merebut pabrik besar itu, namun juga mengubah namanya menjadi Pabrik Senjata Kiaracandong.

Ketika Agresi Militer Belanda berhasil menguasai Bandung, Pabrik Senjata Kiaracandong kembali direbut tentara Belanda. Namanya pun diubah kembali menjadi *Leger Produktie Bedrijven* (Perusahaan Produksi Angkatan Darat) atau LPB. LPB pada masa itu direstrukturisasi menjadi tiga unit, yaitu produksi senjata, produksi munisi, dan laboratorium penelitian. Sedang *Geweemarkerschool* diubah menjadi *Central Reparatie Werkplaats*.

Selanjutnya, dalam *pindad.com* diceritakan setelah pengakuan kedaulatan Belanda kepada Indonesia pada 27 Desember 1949, Belanda menyerahkan aset-asetnya secara bertahap pada pemerintahan Indonesia, termasuk LPB. Setelah menjadi milik Indonesia nama LPB diganti menjadi Pabrik Senjata dan Mesiu (PSM). Untuk mengelola PSM, pemerintah menyerahkan kepada Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD).

Sebagai pabrik senjata, PSM pun mulai melakukan aktivitas dan produksi. Kurang dari setahun dikelola TNI AD, PSM mampu membuat laras senjata berkaliber 9 mm dan laras dengan kaliber 7,7 mm.

Dalam *pindad.com*, PSM sempat mengalami krisis tenaga ahli. Hal demikian



FOTO-FOTO: ISTIMEWA



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

bisa terjadi karena adanya peraturan pemerintah yang mengatur soal kewarganegaraan dan tenaga kerja sehingga membuat banyak pekerja asing kembali ke negara asalnya. Yang terjadi selanjutnya di PSM adalah sentralisasi organisasi. Caranya, dengan merampingkan lini produksi dari 13 menjadi 6 lini dengan lini baru munisi kaliber kecil (MKK).

Untuk meningkatkan mutu dan produksi, dalam *web* itu diungkap PSM melakukan modernisasi pabrik dengan membeli mesin-mesin baru.

Pada tanggal 1 Desember 1958, nama PSM oleh TNI AD diubah menjadi Pabrik Alat Peralatan Angkatan Darat (Pabal AD). Pergantian nama itu juga dibarengi dengan

perluasan usaha, yakni tak hanya memproduksi senjata dan munisi, namun juga peralatan militer yang lain. *Nah*, di sinilah tujuan penting dicanangkan oleh Pabal AD, yakni mengurangi ketergantungan peralatan militer pada negara lain. Untuk mendukung hal yang demikian maka banyak mahasiswa dikirim ke luar negeri untuk melanjutkan program pendidikan guna mempelajari persenjataan dan balistik.

Pabal AD pun namanya semakin tenar di dunia, buktinya banyak perusahaan senjata di Eropa menjalin kerja sama. Salah satu bentuk kerja sama itu adalah kerja sama membuat produksi senjata ringan.

Pada 1 Desember 1958 nama Pabal AD disematkan pada pabrik itu, namun pada

tahun 1962 nama itu diubah menjadi Perindustrian TNI Angkatan Darat (Pindad). Disebut dalam *pindad.com*, Pindad saat itu lebih berfokus pada tujuan pembinaan yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip pengelolaan terpadu dan kemajuan teknologi mutakhir. Proses produksi yang ada untuk mendukung kebutuhan TNI AD.

Pada masa itu telah dilakukan percobaan dan evaluasi pembuatan senjata baru. Dari keberhasilan pengembangan yang dilakukan membuat produksi Pindad digunakan sebagai senjata standar tentara Indonesia.

Sebagai perusahaan strategis, Pindad tidak hanya dikuatkan dalam dari dalam. Keluar pun juga dilakukan hal yang sama. Ketika pemerintahan Soeharto di awal kekuasaannya, awal tahun 1972-an, melakukan reorganisasi kementerian (pada masa itu disebut departemen), termasuk penataan Kementerian Pertahanan dan Keamanan (Hankam), hal demikian juga berimbas pada Pindad. Imbas yang terjadi membuat namanya menjadi Kopindad (Komando Perindustrian TNI AD).

Reorganisasi yang dilakukan disebut berdampak positif terhadap kinerja yang semula dianggap lamban menjadi lincah, bergairah dan dinamis.

Selanjutnya dalam *Wikipedia* disebut, dekade 1980-an, muncul ide untuk mengubah status Pindad menjadi sebuah perseroan terbatas. Langkah ini perlu diambil sebab bila berada di bawah naungan TNI AD, ruang gerak Pindad terbatas karena sangat bergantung pada anggaran TNI AD.

Agar keberadaannya lebih berkembang, dalam *pindad.com* disebutkan, pada 29 April 1983 Pindad resmi beralih status dari institusi yang sebelumnya di bawah naungan Departemen Pertahanan dan Keamanan menjadi perseroan terbatas (PT), dengan nama baru PT. Pindad (Persero). Kata Pindad di belakang kata PT bukan merupakan singkatan melainkan kedudukannya utuh sebagai sebuah nama. Direktur Utama PT. Pindad kali pertama adalah Prof. Dr. Ing. B.J Habibie. Pada masa itu, Habibie juga merupakan Menteri Negara Riset dan Teknologi.

Peralihan Pindad menjadi BUMN pada 29 April 1983 itu bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) PT. Pindad (Persero). □

AWG/dari berbagai sumber





Dukung Pindad, Setiap Periode MPR Berkunjung

Setiap periode, pimpinan MPR melakukan kunjungan kerja ke Pindad. Di pabrik senjata itu pimpinan MPR selain memberi dukungan pengembangan perusahaan dan produksinya, juga menjajal mobil khusus dan senjata tempur.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

SEBAGAI industri strategis dan vital, PT. Pindad (Persero) mendapat dukungan dari banyak pihak. Salah satu pihak yang peduli, memperhatikan, dan mendorong pertumbuhan Pindad adalah MPR. Bukti kepedulian dari lembaga negara ini pada perusahaan yang berada di Kota Bandung, Jawa Barat, itu adalah dengan meninjau langsung apa yang terjadi di sana.

Pada 7 Juli 2020, Ketua MPR Bambang Soesatyo yang didampingi Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad tiba di Auditorium Pindad. Kehadiran pimpinan MPR itu langsung disambut oleh Direktur Utama Pindad Abraham Mose. Abraham Mose tidak sendiri, jajaran di bawahnya seperti Direktur Bisnis Produk Industrial Heri Heriswan, Direktur Bisnis Produk Pertahanan Keamanan Heru Puryanto, dan Direktur Keuangan dan Administrasi Wildan Arief, mendampingi untuk menyambut kunjungan kerja itu.

Dalam sambutannya, Abraham Mose –

seperti dikutip dari *pindad.com*— mengucapkan terima kasih dan menyampaikan rasa bangga atas kunjungan pimpinan MPR ke Pindad. Dalam kesempatan itu, dirinya memperkenalkan Pindad (Persero), termasuk fasilitas produksi hingga produk-produk yang telah dihasilkan.

“Pindad memiliki 2 lini bisnis, yaitu: bisnis industri pertahanan dan produk-produk industrial. Pindad terletak di 2 lokasi, yakni: di Bandung memproduksi produk pertahanan dan industrial, sementara di Turen, Kabupaten Malang, fokus untuk produksi munisi. Untuk produk industrial, Pindad sudah memiliki excavator, alat-alat pertanian, hingga alat-alat untuk memupur railway,” ujarnya seperti yang ada dalam *web* di atas.

Lebih lanjut diungkapkan, Pindad akan memproduksi rudal yang pengerjaannya akan dilaksanakan di Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Bambang Soesatyo, seperti diberitakan, mengapresiasi sambutan hangat yang

diberikan. Ia mengatakan, kunjungan MPR ini adalah merupakan bentuk dukungan agar visi Pindad untuk menjadi perusahaan global terkemuka dalam bidang pertahanan dan keamanan serta produk industrial di tahun 2026 dapat terwujud.

“Pindad merupakan industri strategis yang menunjukkan bahwa Indonesia memiliki salah satu kekuatan untuk pemenuhan kebutuhan alutsistanya demi menjaga stabilitas pertahanan ke depannya. Merupakan suatu kebanggaan saat ini produk Pindad sudah banyak digunakan di beberapa negara tetangga hingga berpartisipasi untuk aksi perdamaian PBB. Eksistensi Pindad sebagai perusahaan industri strategis diharapkan dapat mewujudkan kemandirian dan kedaulatan industri pertahanan kita,” ujarnya seperti termuat dalam *pindad.com*.

Lebih lanjut dikatakan, salah satu bentuk keberpihakan pemerintah terhadap pengembangan industri strategis dalam negeri adalah Komisi III mengimbu badan

pertahanan (Polri) untuk memberlakukan pembatasan impor secara tegas dan menyeluruh. "Pindad juga harus lebih proaktif untuk menyampaikan kepada publik, produk-produk apa saja yang sudah Pindad pasarkan, disertai dengan kapasitas produksinya," tuturnya.

Di *mpr.go.id*, diungkapkan, dalam kunjungan itu, Bambang Soesatyo menjajal langsung kendaraan taktis Maung serta Senapan Serbu SS2 - V4 HB yang digunakan Kontingen TNI AD menjuarai lomba menembak antarnegara di ajang Australian Army of Skill Arms at Meeting (AASAM) sejak tahun 2008-2019. Keduanya merupakan hasil karya anak bangsa melalui Pindad.

Sebelum Pimpinan MPR Periode 2019-2024 melakukan kunjungan kerja ke Pindad, pimpinan MPR Periode 2014-2019 juga melakukan hal yang sama pada 25 Oktober 2017 Ketua MPR Zulkifli Hasan yang didampingi oleh Wakil Ketua MPR Mahyudin, E.E Mangindaan, dan Hidayat Nur Wahid serta ketua fraksi dan kelompok DPD di MPR berkunjung ke Pindad.

Disebut dalam *web* itu, kunjungan yang dilakukan untuk mendorong penguatan nasionalisme dengan memberi perhatian terhadap produksi dalam negeri di bidang industri yang memiliki nilai strategis saat ini dan masa yang akan datang.

Kehadiran mereka di Bandung juga langsung disambut oleh Abraham Mose beserta jajaran manajemen. Dalam kesempatan itu, ia memperlihatkan perkembangan Pindad dalam mendukung



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

alutsista TNI serta mewujudkan kemandirian industri pertahanan dalam negeri. "Kunjungan ini merupakan kesempatan yang sangat baik sehingga dapat secara langsung melihat kemampuan serta kondisi Pindad.

Berbicara nasionalisme sudah jelas bahwa Pindad memiliki kompetensi yang baik untuk memproduksi alutsista mendukung TNI. Harapan ke depan, makin besar penggunaan produk dalam negeri dan dukungan pemerintah dalam hal mengembangkan industri pertahanan ini sehingga ke depan kita akan betul-betul merealisasikan kemandirian industri pertahanan," ujar Abraham seperti termuat dalam *pindad.com*.

Kunjungan MPR ke Pindad bisa jadi merupakan tradisi, sebab pada Pimpinan MPR Periode 2009-2014 juga ada kunjungan

serupa, pada 24 Oktober 2013, Wakil Ketua MPR Ahmad Farhan Hamid melakukan hal yang serupa, yakni berkunjung ke Pindad.

Kunjungan Ahmad Farhan Hamid bisa jadi sangat istimewa, sebab dihadiri juga oleh Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Samsodein. Di *web* itu diberitakan, kunjungan MPR merupakan bagian dari agenda kunjungan ke beberapa industri strategis di Indonesia. Kunjungan ini dilakukan untuk mengetahui secara lebih dalam mengenai industri pertahanan dan keamanan di Indonesia, khususnya untuk matra darat, lewat beberapa proses produksi untuk bermacam-macam produk yang diproduksi oleh Pindad.

Dalam kunjungan itu delegasi MPR melihat fasilitas produksi Pindad dan menyaksikan secara langsung pembuatan beberapa produk alutsista andalan, seperti melihat proses pembentukan badan kendaraan tempur, sejak pemotongan plat baja, perakitan badan panzer, hingga membentuk satu badan panzer yang utuh. Tak hanya itu, delegasi MPR juga diberi kesempatan melihat pemasangan berbagai aksesoris dari kendaraan tempur Anoa, mulai dari ban hingga interior kendaraan.

Diungkap para tamu itu diberi kesempatan mencoba kendaraan tempur Pindad secara langsung, bahkan para tamu bukan hanya mengendarai tapi juga mengendalikan Komodo dan Anoa kebanggaan Pindad. Setelah menjajal produk Pindad, para delegasi MPR memuji dan decak kagum pada produk kendaraan khusus. □

AWGI dari berbagai sumber





Aneka Produksi Pindad

Anggapan orang produksi PT. Pindad (Persero) semuanya adalah peralatan tempur. Anggapan demikian tidak salah, namun sebenarnya perusahaan ini juga memproduksi banyak hal. Di sektor pertanian, perhubungan, dan pertambangan, Pindad juga menciptakan peralatan untuk memudahkan pekerjaan. Berikut beberapa produksi yang diciptakan. Diambil dari sumber pindad.com.

Kendaraan Taktis Maung 4x4

Kendaraan Taktis Ringan 4x4 ini ditujukan untuk mendukung operasi dan mobilisasi pertempuran jarak dekat, serta jelajah segala medan. Dengan kecepatan aman 120 km/jam, transmisi manual 6 speed dan mampu menjangkau jarak tempuh hingga 800 km, menjadikan Maung memiliki manuver yang gesit dan handal. Maung dapat dilengkapi dengan braket senjata 7,62 mm, konsol senjata SS2-V4, GPS navigasi, tracker dan perlengkapan lainnya.

Anoa 6x6 Command

Varian Anoa 6x6 yang didesain untuk menjadi kendaraan bagi komandan dalam memimpin serta mengarahkan pasukan dalam pertempuran. Memiliki kapasitas 7 orang personel, termasuk pengemudi, Anoa tipe Command memiliki top speed 80 km/h pada jalan raya dengan daya jelajah 600 kilometer dengan daya maksimal 320 Horsepower.

Harimau Medium Tank

Harimau Medium Tank Kanon 105 mm adalah kendaraan tempur produk terbaru dari PT Pindad (Persero) yang didukung oleh Kementerian Pertahanan RI sesuai



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

kebutuhan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Kendaraan ini dilengkapi dengan two-man turret kaliber 105 mm serta senapan mesin kaliber 7,62 mm untuk daya gempur maksimum. Harimau Medium Tank didesain khusus untuk daerah operasi tropis, seperti hutan, karena memiliki bobot yang lebih ringan dari Main Battle Tank.

Anoa 6x6 Amphibious

Panser APC Anoa 6x6 tipe amfibi adalah

pengembangan terbaru dari Panser Anoa APC oleh PT. Pindad (Persero). Kendaraan ini mampu melakukan manuver baik di darat maupun permukaan air. Dalam beroperasi di air, Anoa Amphibious dapat mencapai top speed 10 km/h. Pada varian ini, kapasitas tangki bahan bakar dinaikkan menjadi 260 liter. Kendaraan ini dapat memuat 10 personel, yang dapat membawanya menjelajah sejauh 600 kilometer menggunakan mesin bertenaga 320 Horsepower. Dilengkapi dengan senapan mesin kaliber 7,62 mm untuk melindungi personel selama proses pergerakan. Sebagai kendaraan amfibi, kendaraan ini dilengkapi dengan water propeller, swimming drive system dan sistem hidrolik untuk propulsinya.

SS2-V5 A1

Varian SS2-V5 yang mendapatkan beberapa upgrade untuk meningkatkan performanya. Popor lipat yang menjadi standar pada SS2-V5 diganti dengan popor model teleskopik. Pada bagian handguard disematkan rail pada kiri, kanan, atas, dan bawah untuk memasang berbagai aksesoris. Pada rail bawah sudah terpasang sebuah vertical foregrip yang dapat





FOTO-FOTO: ISTIMEWA

menambah ergonomi dan kenyamanan dalam penggunaan senjata. Selain itu, pisir model carry handle diganti dengan model lipat pada rail. Pisir dan pijera ini dapat diganti dengan berbagai jenis teleskop yang dipasang pada rail senjata.

SPR-4

Senapan Penembak Runduk yang didesain untuk melengkapi jajaran produk senjata produksi PT. Pindad (Persero) dalam jarak penembakan 1.500 meter. Penggunaan munisi MU56-M memastikan akurasi terbaik yang didukung oleh teleskop dengan pembesaran hingga 25x serta Bipod untuk menjaga kestabilan dalam penembakan.

G2 Premium kal. 9mm

Merupakan pengembangan dari sisi desain dan frame yang berasal dari varian G2 lainnya. Fitur serta karakter pada G2 Premium sepenuhnya dikembangkan dari umpan balik para pengguna yang telah mengoperasikan varian G2 Combat dan Elite. Menggunakan munisi kaliber 9 mm, G2 Premium memiliki jarak tembak efektif sampai dengan 25 meter. G2 Premium merupakan varian teratas dalam keluarga pistol G2.

Traktor Roda Empat PTM-45

PT. Pindad (Persero) memproduksi traktor roda empat dengan nama PTM 45. PTM 45 merupakan tipe traktor poros ganda (4WD) yang berfungsi untuk mengolah lahan dengan mengimplementasikan bajak piringan

maupun rotari. Bagian-bagian utama traktor terdiri dari motor penggerak (engine), sistem penerusan daya dan pengatur kecepatan, empat buah roda karet dan kanopi. Sistem penerusan daya berfungsi sebagai penyedia daya tarik melalui batang penarik (draw bar) dan daya putar (torsi) melalui PTO (power takeoff).

Excava 200

Excava 200 merupakan produk alat berat pertama produksi PT Pindad yang merupakan hasil transformasi kompetensi produk pertahanan dan keamanan (hankam). Kompetensi produk yang digunakan, yaitu sistem hydraulic pada kendaraan khusus jenis recovery dan kompetensi roda rantai. Excava 200 adalah produk hemat bahan



bakar, memiliki daya tampung 20 ton dan dapat masuk ke medan yang cukup dalam.

Sebagai opsi lain, bucket Excava 200 dapat diganti menjadi hydraulic breaker

Rota Tanam

Rota Tanam merupakan mesin produksi PT. Pindad (Persero) yang berfungsi untuk mengolah tanah sekaligus mencacah sisa jerami padi, jagung, dan gulma serta mencampurnya dengan tanah, sehingga dapat meningkatkan kandungan bahan organik tanah. Rota Tanam ini juga dilengkapi dengan penyemprot decomposer.

Mesin rota tanam memiliki fungsi dan keunggulan sebagai berikut: 1. Pengolahan Tanah. 2. Penanaman biji-bijian (jagung, kedelai, dan lain sebagainya). 3. Aplikasi pupuk cair (opsional). 4. Pelaksanaan pengolahan tanah, penanaman dan pemupukan dapat dilakukan secara bersamaan.

Turnout/Wesel

Turnout atau wesel adalah suatu sistem mekanik yang memungkinkan kereta api untuk dibimbing dari satu track ke track yang lain pada sebuah persimpangan jalan kereta api.

Pada ujung turnout terdapat sepasang rel meruncing menempel lurus yang dikenal sebagai lidah (swith point) terletak di antara rel luar. Lidah ini dapat dipindahkan lateral ke salah satu dari dua posisi untuk mengarahkan kereta api yang datang dari ujung menuju jalan yang lurus atau menyimpang (belok kiri atau kanan). □

AWG/dari berbagai sumber

Temu Tokoh Nasional di Kelurahan Dembe Jaya

Fadel Muhammad: Jika Ingin Maju Harus Berdayakan Rakyat

WAKIL Ketua MPR Prof. Dr. Ir. H Fadel Muhammad bersilaturahmi dan mendengar aspirasi masyarakat dalam kunjungan kerja di Provinsi Gorontalo. Acara dengar aspirasi itu berlangsung Senin malam (8/1/2024), dalam acara yang dikemas dalam bentuk Temu Tokoh Nasional, Keagamaan, dan civitas akademika di Kelurahan Dembe Jaya, Kota Gorontalo.

Dalam pertemuan itu berbagai aspirasi atau keluhan dari warga masyarakat mengemuka. Antara lain, para petani mengaku kesulitan untuk mendapatkan pupuk, dan juga kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) untuk traktor. Selain persoalan kesejahteraan yang masih masih dirasakan oleh para buruh.

Menanggapi aspirasi atau pun keluhan dari warga masyarakat itu, Fadel Muhammad mengungkapkan, ketika memimpin Provinsi Gorontalo pada 20 tahun lalu, anggaran sangat terbatas. Oleh karena itu, menurut Fadel, pertama dia fokus pada pembangunan sumber daya manusia, antara lain membangun sekolah, memberikan beasiswa, mengirim mahasiswa melanjutkan pendidikan di dalam dan luar negeri. "Pokoknya, pembangunan sumber daya manusia menjadi prioritas pertama," katanya.

Jadi, lanjut Fadel, bila sebuah daerah ingin maju maka paling utama memberdayakan masyarakat. "Kalau daerah ingin maju harus



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

berdayakan masyarakat. Harus ada yang diperbuat untuk rakyat. Kita berdayakan mereka. Kita bantu mereka," ungkap Fadel Muhammad dalam acara yang berlangsung di Ruang Serba Guna Baitul Karim, Kota Gorontalo.

Lalu, Fadel Muhammad mengungkapkan pengalamannya ketika memimpin Provinsi Gorontalo pada 20 tahun lalu. Waktu itu, cerita Fadel, anggaran sangat terbatas. Oleh karena itu, langkah pertama dia fokus pada pembangunan sumber daya manusia, antara lain membangun sekolah, memberikan beasiswa, mengirim mahasiswa melanjutkan pendidikan di dalam dan luar negeri. "Pembangunan sumber daya

manusia menjadi prioritas pertama," katanya.

Kedua, mengembangkan pertanian, khususnya tanaman jagung. Petani mendapatkan benih dan pupuk. "Ketika panen, saya membeli dan ikut memasarkan produksi jagung hingga ke Malaysia. Masyarakat antusias menanam jagung, karena harganya cukup tinggi. Karena itu, masyarakat mendapatkan penghasilan dan bisa meningkatkan kesejahteraan. Dengan memberdayakan masyarakat maka ekonomi akan tumbuh," urai Fadel Muhammad.

"Ekonomi akan tumbuh kalau kita memberdayakan masyarakat. Inilah yang berbeda dengan periode sesudah saya menjadi gubernur," sambung mantan Gubernur Gorontalo dua periode ini.

Menurut Fadel Muhammad, saat ini pertanian dan perikanan kurang menjadi fokus pembangunan di Gorontalo. Anggaran lebih banyak terserap untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan. Pertanian dan perikanan mulai mengalami penurunan. "Kita harapkan Gubernur Gorontalo nanti bisa meneruskan kemajuan pertanian dan perikanan," tuturnya.

Pemerintah daerah, lanjut Fadel Muhammad, perlu memberi perhatian pada petani dan nelayan. Pasalnya, kemiskinan terbesar ada pada petani dan nelayan. "Kita memberikan anggaran dan bantuan yang besar kepada petani dan nelayan untuk memberdayakan mereka," katanya.

Fadel Muhammad menambahkan, Provinsi Gorontalo perlu melakukan lompatan besar (quantum leap). "Kalau berjalan biasa-biasa saja, satu langkah, dua langkah, maka tidak akan terasa. Tetapi kita harus melakukan langkah besar," jelasnya.

Salah satu langkah besar itu, menurut Fadel, adalah menjadikan Provinsi Gorontalo sebagai lumbung pangan nasional. Saat ini sedang dilakukan studi kelayakan bersama IPB. Kabupaten Pohuwato yang memiliki lahan subur dan luas menjadi pusat pertanian dan perikanan.

"Saya mengajak masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat untuk terus membangun Gorontalo agar provinsi ini bisa lebih maju. Kita masih tertinggal dari provinsi-provinsi lain," katanya. □



Tuntut Kebijakan Pro Disabilitas

Lestari Moerdijat: Tidak Boleh Ada yang Ditinggalkan dalam Proses Pembangunan

Setiap warga negara berhak memiliki ruang untuk berpartisipasi sesuai dengan kemampuan masing-masing individu dan memastikan dirinya tidak ditinggalkan dalam dinamika pembangunan bangsa.

KITA harus memastikan bahwa *slogan leaving no one behind* benar-benar terlaksana dan tidak benar-benar bila ada warga negara yang ditinggalkan dalam proses pembangunan,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, pada acara serap Aspirasi Masyarakat yang dihadiri para anggota komunitas Sahabat Difabel Jepara (Sadifa), Komunitas Pejuang Disabilitas Demak dan Forum Komunikasi Difabel Kudus (FKDK), di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Jumat (19/1).

Hadir pada acara tersebut Surya Chandra (Wakil Menteri Agraria dan Pertanahan 2019-2022), Tri Mumpuni (Anggota Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional/BRIN), Nicky Clara (Founder Alun Jiva Indonesia), Rismawan Yulianto (Ketua FKDK), Nur Khamid (Ketua Sadifa), Zaedi Abdul Syukur (Ketua Pejuang Disabilitas Demak), Kuntjoro Hadi Witjaksono (Kepala Sekolah SMK SLB Cendikia Kudus), dan sejumlah anggota DPRD Kabupaten Kudus.

Menurut Lestari, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama, serta kompleksitas masalah sosial dari lingkup kehidupan yang sama. Karena itu, tegas Rerie, sapaan akrab Lestari, para sahabat difabel harus bersama-sama bekerja keras,



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

dan yang terpenting harus berani berada di depan dalam memperjuangkan kesetaraan.

Menurut Rerie, yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah, dengan konstitusi dan undang-undang yang kita miliki, negara sejatinya sudah menjamin perlindungan setiap warga negara, termasuk dalam memperoleh kesetaraan dan hak-haknya.

Pancasila, tegas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, meletakkan nilai-nilai kemanusiaan yang utuh dalam norma-norma kehidupan berbangsa, dengan catatan yang sangat tegas tidak boleh satu pun yang ditinggalkan. “Sekarang kembali kepada kita semua untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kita berani berada di depan untuk berjuang agar tidak menjadi kelompok yang ditinggalkan,” ujarnya.

Sejumlah poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), tambah Rerie, cukup jelas bahwa pendidikan berkualitas dan mengurangi kesenjangan adalah sejumlah hak penyandang disabilitas yang harus diperjuangkan.

Rerie meyakini, setiap anak bangsa dapat bergandengan tangan untuk mewujudkan seruan *leaving no one behind*, yang sejatinya merupakan inti dari transformasi dunia bahwa pada 2030 nanti kita memasuki periode di mana kesetaraan dan inklusivitas adalah model dari kehidupan dunia.

Pada kesempatan yang sama, Ketua FKDK Rismawan Yulianto mengungkapkan pentingnya upaya menghapus stigma negatif yang disematkan masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Untuk itu, Rismawan berharap, pemerintah pusat dan daerah dapat mewujudkan akses yang setara bagi penyandang disabilitas melalui sejumlah kebijakan yang pro disable.

Dalam proses itu, jelas Rismawan, dibutuhkan perubahan cara berpikir dengan tidak menganggap penyandang disabilitas sebagai obyek, sehingga setara sebagai warga negara. Selain itu, tambah dia, upaya mewujudkan kesetaraan bagi penyandang disabilitas di tanah air membutuhkan data yang akurat agar mampu menghasilkan kebijakan yang tepat.

Catatan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) per Juni 2023 menyebutkan, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 22,97 juta jiwa atau sekitar 8,5% dari jumlah penduduk Indonesia, dengan jumlah disabilitas terbanyak pada usia lanjut. □



Wacana Pemekaran Kabupaten Cianjur

Syarief Hasan Bermohon Moratorium Pemekaran Ditinjau Kembali

Pembahasan tentang pemekaran Cianjur sudah berlangsung lama. Tokoh masyarakat, pemuda hingga tokoh agama sepakat untuk memekarkan Cianjur menjadi Cianjur Selatan.

WAKIL Ketua MPR RI, yang juga caleg Partai Demokrat Dapil Jawa Barat III meliputi Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur, Prof. Dr. H. Sjarifuddin Hasan, SE., MM., MBA., bersimpati dan mendukung wacana warga kabupaten Cianjur Selatan yang menghendaki pemekaran di daerahnya. Simpati itu muncul karena setiap kali bertemu masyarakat Cianjur Selatan, keinginan pemekaran itulah yang selalu disuarakan. Dan, itu selalu diulang-ulang. Tak terkecuali, ketika melakukan kunjungan ke Cianjur Selatan, Kamis (18/1/2024).

Secara geografis, menurut Syarief Hasan, Kabupaten Cianjur layak dilebarkan. Terbukti, waktu tempuh dari Cianjur menuju Cianjur Selatan mencapai 5 jam. Daerah Cianjur sendiri meliputi wilayah yang sangar luas, mencapai 32 kecamatan. Dari wilayah seluas itu sebagian kondisi alamnya berkelok serta berbukit. Cianjur Selatan juga memiliki potensi ekonomi yang tidak kecil, mulai dari pertanian, kekayaan laut, hingga pariwisata.

"Potensi ekonomi di Cianjur sangat besar, tetapi belum dimanfaatkan secara baik. Akibatnya, kesejahteraan masyarakatnya masih memprihatinkan. Itulah yang menjadi salah satu alasan mengapa masyarakat Cianjur Selatan terus menyuarakan pemekaran," ungkap Syarief Hasan.

Syarif Hasan berharap, pemerintah segera meninjau ulang moratorium pemekaran wilayah yang sudah berlangsung selama ini. Terlebih karena banyak warga masyarakat yang berharap daerahnya segera dimekarkan. Jangan sampai, pemerintah terlambat merespon, dan malah tenang-tenang saja.

"Saya sudah sering mendapat masukan, harapan dan keinginan pemekaran daerah, tetapi semua tertunda karena ada moratorium. Mudah-mudahan pemerintah mau mendengar dan segera mempertimbangkan kembali keinginan rakyatnya," ungkap Syarief Hasan.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat itu tidak memungkiri ada beberapa daerah yang tidak bisa berkembang setelah dilakukan



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

otonomi. Tetapi, tidak termasuk Cianjur. Karena, wacana pelebaran Cianjur Selatan telah melewati berbagai kajian yang mendalam.

"Jangan disamaratakan semua, seolah semua akan gagal, termasuk Cianjur. Cianjur memiliki potensi ekonomi sangat besar, tetapi karena wilayahnya sangat luas, anggaran terbatas, akibatnya belum semua potensi bisa digerakkan. Kalau pemekarannya disetujui, niscaya pembangunan Cianjur Selatan akan berjalan lancar, untuk membawa kesejahteraan bagi semua

warga," pungkasnya.

Pembahasan tentang pemekaran Cianjur sendiri sudah berlangsung lama. Tokoh masyarakat, pemuda hingga tokoh agama sepakat untuk memekarkan Cianjur menjadi Cianjur Selatan. Dari 32 kecamatan di Kabupaten Cianjur, 14 kecamatan diantaranya akan berpisah dan membentuk Kabupaten Cianjur Selatan. Yakni, Sindangbarang, Sukanagara, Pagelaran, Tanggeung, Cibinong, Pasirkuda, Cijati, Leles, Cidaun, Karupandak, Takokak, Naringgul, Cikadu, dan Agrabinta. □



Delegasi Kades Kab. Bone Bolango

Berbagai Aspirasi Mereka Sampaikan kepada Fadel Muhammad



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

PULUHAN Kepala Desa Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, menyambangi Rumah Aspirasi Fadel Muhammad di Kota Gorontalo, Jumat (26/1/2024). Kedatangan mereka adalah untuk menyampaikan aspirasi dan harapan kepada Wakil Ketua MPR RI Prof. Dr. Ir. H. Fadel Muhammad yang juga merupakan Anggota DPD RI Dapil Provinsi Gorontalo.

Berbagai aspirasi disampaikan oleh puluhan Kepala Desa ini kepada Pimpinan MPR ini, antara lain: Agar dana desa

dinaikkan, keinginan agar pengelolaan dana desa langsung dilakukan oleh desa, dan berharap agar tunjangan kinerja pemerintah desa dihidupkan kembali.

Setelah mendengar berbagai aspirasi yang disampaikan oleh para Kepala Desa itu, kepada wartawan, Fadel Muhammad menyatakan, "Soal keinginan dana desa dikelola oleh desa, menurut saya, itu baik saja. Sebab, yang tahu masalah dan bagaimana cara membangun desa ya mereka sendiri," kata Fadel Muhammad.

Lalu, mengenai tunjangan kinerja

pemerintahan desa, menurut Fadel, ini perlu agar para Kepala Desa dan aparaturnya berkompetisi dalam kebaikan, yakni membangun desa dan rakyatnya. Fadel menyatakan, terkait tunjangan kinerja untuk pemerintahan desa sudah dilakukan olehnya pada saat menjabat Gubernur Provinsi Gorontalo selama dua periode.

"Tunjangan kinerja ini mampu menaikkan profesionalitas kerja desa dalam memaksimalkan potensi desa, untuk kesejahteraan rakyat. Ini betul-betul saya rasakan manfaatnya waktu itu. Sekarang tidak ada lagi, entah kenapa. Padahal program yang baik-baik harusnya diteruskan dan ditingkatkan kualitasnya. Jangan malah dihentikan," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Koordinator Delegasi, yaitu Ketua DPC APDESI Kabupaten Bone Bolango, Mohamad Yamin, sangat mengapresiasi penerimaan mereka oleh Fadel Muhammad. "Intinya, aspirasi yang kami sampaikan adalah titipan dari masyarakat di desa-desa yang kami pimpin. Dan, maksud kami menyampaikan aspirasi ini agar mendapatkan perhatian dari Pemerintah Daerah Gorontalo," tandas Mohammad Yamin yang juga Kades Kramat, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo.

Di sesi akhir, Fadel Muhammad memberikan buku hasil buah pikirnya berjudul 'Fadel Muhammad: Building A Legacy,' yang berisi pengalamannya, termasuk saat memimpin Gorontalo sebagai Gubernur, kepada para Kades. "Mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran dan inspirasi, serta motivasi untuk para Kades dalam memimpin desa masing-masing," harapnya.

Beberapa hari sebelumnya, Fadel Muhammad juga menerima kunjungan silaturahmi puluhan Kepala Desa dari beberapa Kabupaten, seperti Gorontalo Utara dan Kabupaten Gorontalo, yang pada intinya menyampaikan aspirasi yang sama. □



Banyak Harapan Rakyat Belum Terwujud

Fadel Muhammad: PR Besar Pemerintah Pasca Pemilu 2024



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

DUA hari sebelumnya (Rabu, 24/1/2024), Wakil Ketua MPR RI Prof. Dr. Ir. H. Fadel Muhammad juga melakukan kegiatan serap aspirasi masyarakat di Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Salah satu aspirasi yang mencuat di desa ini adalah agar pemerintah daerah memerhatikan daerah yang berpotensi banjir di musim penghujan.

Aspirasi lainnya datang dari kaum ibu yang mengaku selalu kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari sebagai dampak dari makin mahalnya harga berbagai bahan kebutuhan pokok sehari-hari. Sementara dari generasi muda, — yang tergolong angkatan kerja yang baru lulus kuliah — mengaku merasakan sangat sulitnya menembus akses dunia kerja.

“Saya sendiri mengalami hal itu. Sebagai

*fresh graduate*_perguruan tinggi sangat sulit mencari kerja. Banyak saya dengar, harus ada koneksi orang dalam. Saya berharap, agar ke depan dibuka seluas-luasnya lapangan kerja tanpa harus ada koneksi orang dalam,” ujar salah seorang peserta.

Mantan Gubernur Gorontalo dua periode ini mendengar dan menyimak apa yang disampaikan oleh warga masyarakat Gorontalo ini. “Mereka adalah rakyat yang berdaulat. Daerah ini dan bahkan negeri ini milik mereka. Kita harus mendengarkan aspirasi dan harapan mereka. Jangan sampai ada pejabat publik menyepikan aspirasi rakyat. Para pejabat bisa duduk di kursi kekuasaan karena suara rakyat. Ketika terpilih, rakyat harus dilayani dan disejahterakan,” katanya.

Fadel mengaku, sangat prihatin berbagai harapan masyarakat Gorontalo yang belum atau kurang maksimal terwujud. Padahal, Gorontalo menyimpan potensi alam sangat luar biasa jika dikelola dengan baik. Anggota DPD RI Dapil Provinsi Gorontalo ini menegaskan, semua harapan masyarakat tersebut mesti menjadi PR atau Pekerjaan Rumah pemerintah baru yang terbentuk pasca Pemilu 2024. □



Brigadir Fitriani Maisyarah

Polwan Tangguh Penerima *'Hoegeng Awards 2023'*



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

CITRA Kepolisian Republik Indonesia nyaris tak pernah sepi dari berita miring. Ada saja oknum yang berulah, sehingga mencemarkan nama baik Kepolisian Republik Indonesia. Tetapi, di luar mereka yang gemar berbuat onar itu, masih banyak anggota Polisi yang memiliki integritas tinggi. Bukan saja mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, bahkan melebihi apa yang seharusnya. Di antara anggota Polri yang berbuat melebihi tugas dan kewajibannya itu, satu di antaranya adalah Brigadir Fitriani Maisyarah.

Brigadir Fitriani merupakan anggota Polisi di Polres Barito Timur, Kalimantan Tengah (Kalteng). Sehari-hari ia bertugas sebagai Bhabinkamtibmas Desa Haringen, Barito Timur, Kalteng. Berkat integritas, pengorbanan, dan tanggung jawabnya, Fitriani Maisyarah terpilih sebagai penerima Hoegeng Awards 2023 kategori Polisi Berdedikasi. Penganugerahan sebagai Polisi Berdedikasi Hoegeng Awards 2023 disampaikan pada malam puncak penganugerahan Hoegeng Awards 2023, yang dihelat di The Tribhata Darmawangsa, Jakarta Selatan, Jumat malam (14/7/2023).

Salah satu alasan Fitriani mendapat penghargaan itu adalah kiprahnya dalam

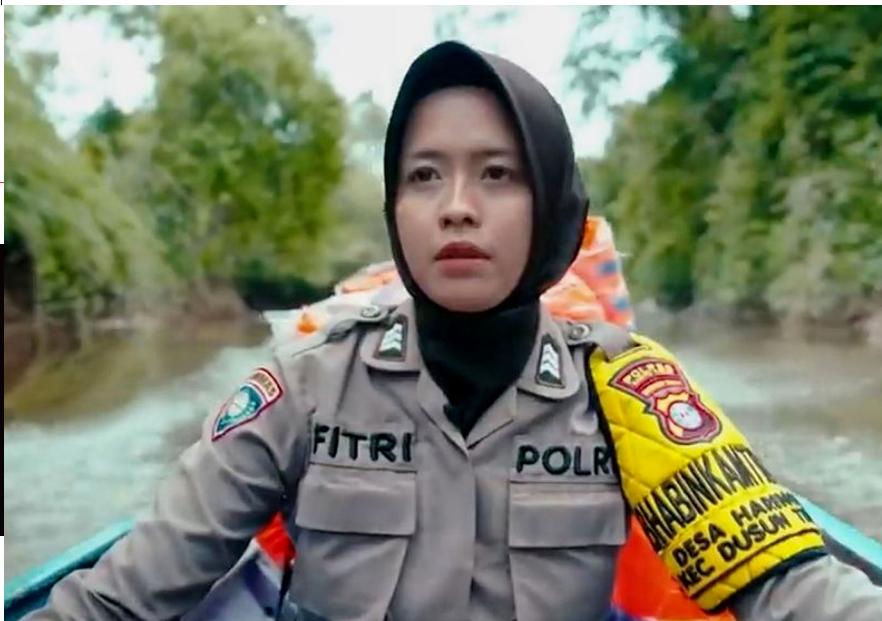
menjaga hutan dari kerusakan akibat kebakaran. Peran Fitriani menekan kasus kebakaran terbilang sangat vital. Karena kerugian yang ditimbulkan dari kebakaran sangat besar. Bahkan, anak-anak sekolah pun terpaksa diliburkan untuk mengurangi risiko menghirup asap. Apalagi, hutan di



kawasan Desa Haringen termasuk daerah yang sering mengalami kebakaran, serta menghasilkan asap tebal dan pekat.

Untuk mengantisipasi bertambahnya areal hutan yang terbakar, Fitriani melakukan sosialisasi ditujukan kepada pemilik lahan, mengenai bahaya kebakaran hutan. Sosialisasi itu dilakukan karena kebanyakan lahan yang terbakar itu berawal dari upaya pembukaan lahan pertanian oleh masyarakat. Terbukti, setiap kali dia datang ke titik api selalu ada orang yang menunggu api tersebut. Terkadang mereka tak bisa mempertahankan nyala apinya, sehingga terjadilah kebakaran.

Setelah melalui diskusi dan pendekatan, termasuk dengan aparat desa, solusi yang diharapkan akhirnya didapat juga. Agar masyarakat tidak kehilangan mata pencaharian dan kebakaran hutan bisa diminimalisir dibutuhkan adanya koordinasi. Caranya, masyarakat diimbau agar menghubungi pihak aparat sebelum melakukan pembakaran. Selain itu, diharapkan pembakaran tidak dilakukan sendiri, tetapi bekerjasama dengan orang lain. Agar, saat membuka lahan juga dilakukan upaya-upaya pencegahan kebakaran hutan. Termasuk melibatkan dirinya untuk mengantisipasi agar kebakaran bisa dihindari.



Alat Bantu

Selain melakukan sosialisasi bahaya kebakaran, Fitriani juga mempersiapkan sendiri alat pemadam kebakaran. Ia memodifikasi kendaraan bermotor dan mengubahnya menjadi alat bantu pemadam kebakaran alternatif di desa binaannya. Dengan cara tersebut, Fitriani bisa menerobos masuk hingga ke dalam hutan, tempat titik api berkobar. Alat tersebut terbilang efektif, karena mampu memadamkan api sebelum membesar dan menyebabkan kebakaran hutan.

Bukan hanya melakukan pencegahan dan pemadaman kebakaran, alasan lain yang mendorong warga mengajukan Fitriani agar mendapatkan penghargaan, karena sang Bhabinkamtibmas ini ternyata juga dikenal ringan rangan. Ia sering membantu warga yang tengah dalam kesulitan. Terlebih saat masyarakat tempatnya bertugas mengalami musibah.

Salah satu contoh, pada tahun 2021, Desa Haringen tersapu oleh bencana banjir bandang. Peristiwa tersebut menyebabkan rumah, sawah, dan binatang piaraan warga musnah dan rusak berat. Kerusakan juga menimpa jalanan kampung, membuat transportasi tersendat. Akibatnya, sebagian warga terpaksa memilih mengungsi ke tempat yang lebih aman.

Tidak mau berdiam diri melihat warga dalam kesusahan, Brigadir Fitriani tergerak menyalurkan bantuan kepada masyarakat di tengah dilanda banjir bandang. Ia bekerja keras, dengan alat seadanya membantu warga di tengah sarana jalan yang nyaris tidak bisa dilewati.

Fitriani berharap, ke depan akan bermunculan polwan-polwan yang mempunyai



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

dedikasi tinggi untuk mengabdikan kepada masyarakat. Tidak hanya memberi rasa aman, tetapi juga membantu saat warga di tengah kesulitan. Tidak hanya memberi pelayanan, tapi juga di operasional dan turun ke lapangan.

Saat ini, hubungan Fitriani dengan warga Desa Haringen semakin baik. Warga desa

merasa sangat berhutang budi atas kebaikan dan kerja keras yang ditunjukkan Fitriani yang sudah bertugas di Desa Haringen sejak 2019. Apalagi, masyarakat Desa Haringen juga menilai, kalau Fitriani lebih baik dibanding petugas Bhabinkamtibmas sebelumnya. □

MBO

Sudah Idealkah Format Debat Capres- Cawapres?

Debat calon presiden (capres) - calon wakil presiden (cawapres) yang digelar oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) yang beberapa kali selama masa kampanye lalu dinilai sudah berjalan baik, meski masih ada yang mengatakan format debat masih terdapat kekurangan. Lalu, bagaimana menutupi kekurangan itu agar pelaksanaannya semakin baik, sehingga acara debat betul-betul dapat menggali ide dan gagasan capres - cawapres? Berikut pendapat wakil rakyat atas pelaksanaan acara resmi debat yang digelar oleh KPU itu?

Dr. H. Sukamta Anggota MPR Fraksi PKS

Tidak Ada Yang Menyerang Personal



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

MENURUT saya (debat calon capres-cawapres yang digelar oleh KPU) tidak ada yang perlu diubah format debatnya. Sudah berlangsung tiga kali debat dari 5 kali yang dijadwalkan. Mengubah aturan main di tengah jalan itu menurut saya tidak *fair*.

Sejauh ini tidak ada (capres atau

cawapres) yang menyerang personal. Yang terjadi di debat adalah pengkritisan terhadap paslon terkait dengan kebijakan yang ada. Jadi, kinerja dan tindakan yang dikritisi. Menyerang personal itu kalau misalnya mengungkap kekurangan fisik personal, kondisi keluarga, dan seterusnya. Soal kritik terhadap lahan yang dikuasai itu bukan

menyerang personal, karena lahan yang dimaksud adalah lahan negara yang dimanfaatkan secara legal oleh pengelola dalam bentuk HGU (hak guna usaha), namun masalahnya pengelolaannya juga tidak maksimal sementara pada saat yang bersamaan, banyak prajurit TNI yang belum punya rumah dinas.

Terkait data? Data yang bersifat rahasia negara jelas tidak boleh diungkap, tetapi kalau data soal pembelian alutsista, publik perlu tahu, karena pembelian dan perawatannya menggunakan uang rakyat. Hal ini perlu transparan untuk meminimalisasi penyelewengan.

Anggaran pertahanan yang sifatnya gelondongan juga bukan rahasia negara. Hal demikian ada di buku APBN yang diterbitkan tiap tahun dan setiap masyarakat bisa akses dan baca. Rahasia itu contohnya seperti rencana operasi atau spesifikasi teknis yang mau dibeli. Kalau spesifikasi pesawat semua juga sudah tahu karena itu pabrikan umum.

Apakah debat ini berpengaruh pada naik dan turunnya suara? Berpengaruh, khususnya untuk para calon pemilih yang belum menentukan pilihan (*undecided voter*). Lalu apakah penonton debat perlu ditertibkan? Perlu. □

AWG

Fahira Idris Anggota MPR dari Kelompok DPD

Perlu Debat Tambahan di Luar KPU



BERHARAP ada institusi pendidikan, terutama kampus, lembaga *think tanks*, maupun *civil society organization* yang juga ikut menggelar debat antarcapres-cawapres di luar debat yang digelar KPU. Pasalnya, dari debat yang sudah digelar banyak isu-isu krusial yang belum terungkap. Selain karena keterbatasan waktu dan sub tema debat yang terlalu banyak, format debat yang masih sangat kaku, menutup kesempatan paslon untuk lebih mengeksplorasi gagasannya (Disampaikan dalam *press release*, Januari 2024).

Dari debat yang sudah digelar KPU, isu-isu krusial dan persoalan sehari-hari rakyat yang seharusnya jadi pangkal perdebatan belum terungkap. Oleh karena itu, publik memerlukan panggung debat tambahan agar gagasan semua paslon terkait isu-isu

penting yang belum disinggung dalam debat KPU bisa diadu kembali dan dinilai mana yang terbaik oleh masyarakat luas. Saya berharap institusi pendidikan, terutama kampus, lembaga *think tanks*, maupun *civil society organization*, bisa memfasilitasi debat tambahan ini.

Contoh debat ketiga antarcapres yang bertemakan: Pertahanan, Keamanan, Hubungan Internasional dan Geopolitik, tidak menyinggung sama sekali sikap, pandangan, dan solusi para capres terkait isu pengungsi Rohingnya yang semakin banyak mendarat di sejumlah wilayah di Aceh dan Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Selain menjadi isu paling mutakhir, jika dicermati pemberitaan di media massa, para capres sebenarnya memiliki pandangan yang berbeda soal isu pengungsi Rohingnya sehingga idealnya harus dibahas dalam debat.

Isu penting lain yang cukup mendesak, tetapi saat debat capres publik belum mendapat solusi yang konkret dari semua kandidat adalah soal pertahanan dan keamanan siber di Indonesia yang masih lemah, sehingga terus berulangnya kasus kebocoran data pribadi. Solusi soal saat ini banyaknya masyarakat yang terjerat kejahatan siber juga belum didengar publik.

Demikian juga isu-isu dalam tema debat sebelumnya yang masih banyak menggantung. Misalnya saja soal strategi masing-masing kandidat untuk mengembangkan ekonomi syariah yang sempat ramai saat sesi tanya jawab kandidat pada debat kedua antarcawapres. Panggung debat di luar KPU bisa mengangkat khusus tema ini mulai dari strategi penguatan pada halal *value chain*, keuangan syariah, UMKM berbasis produk syariah, dan ekonomi digital yang melayani produk syariah, sehingga publik paham mana kandidat yang paham dan memiliki gagasan terbaik soal ekonomi syariah yang potensinya bagi Indonesia sangat besar.

Lima kali debat yang digelar KPU, dengan sub tema yang sangat banyak, waktu yang sangat terbatas dan format debat yang masih belum mengalir, tidak akan cukup mengupas gagasan ketiga paslon. Padahal, sebelum memilih, publik butuh lebih banyak forum perdebatan agar bisa membandingkan paslon mana yang mereka pilih. Semoga ada lembaga atau organisasi yang menggelar debat pilpres tambahan dengan tema yang lebih spesifik. □

AWG

Sosialisasi Empat Pilar MPR di Jawa Tengah:

Bersama MPC. Pemuda Pancasila Kebumen

Bamsoet Pemuda Pancasila Tidak Kemana-mana tapi Ada di Mana-mana



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila Bambang Soesatyo meminta seluruh elemen bangsa membangun komitmen kolektif untuk mewujudkan suasana kondusif dan iklim politik yang menyejukkan. Esensi dari kontestasi politik adalah memenangkan hati rakyat, sehingga apa pun hasilnya harus bermuara pada kepentingan rakyat, bukan justru menempatkan rakyat pada kutub-kutub yang berseberangan.

“Pemilu tidak boleh menimbulkan residu konflik di tengah masyarakat. Pemilu juga tidak semestinya dimaknai semata-mata sebagai implementasi demokrasi prosedural. Pemilu harus benar-benar dimaknai untuk memilih para wakil rakyat atau pimpinan negara terbaik, tanpa harus membuat perpecahan di tengah masyarakat,” ujar Bamsoet dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bersama MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Kebumen di Kebumen Jawa Tengah, Kamis (18/1/24).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, saat ini kader Pemuda Pancasila tersebar di tiga cabang kekuasaan, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Bahkan, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH. Maruf Amin telah menjadi Anggota Kehormatan Pemuda



Pancasila.

“Pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, Pemuda Pancasila juga menempatkan kadernya yang tersebar di berbagai partai politik. Ini membuktikan Pemuda Pancasila tidak kemana-mana, tapi ada dimana-mana,” kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum FKPP/kepala Badan Bela Negara FKPP dan



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini meminta setiap kader Pemuda Pancasila senantiasa menjadi patriot yang menampilkan wajah Pancasila. Bukan menampilkan wajah premanisme maupun nilai-nilai yang tidak sesuai ajaran Pancasila.

"Keberadaan Presiden Joko Widodo dan

Wakil Presiden KH Maruf Amin dalam keluarga besar Pemuda Pancasila meneguhkan bahwa antara nilai-nilai nasionalis dan nilai agamis bisa berbaur dalam rumah besar Pancasila. Karena, nilai nilai Pancasila sesungguhnya tidak pernah bertentangan dengan nilai-nilai

nasionalisme maupun nilai-nilai agama," jelas Bamssoet.

Wakil Ketua Umum FKPP dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menambahkan, sejak didirikan pada 28 Oktober 1959 atas inisiasi Jenderal Besar AH. Nasution, Pemuda Pancasila yang kini berusia 64 tahun telah memainkan banyak peranan penting dalam menjaga, menyebarkan, dan menanamkan nilai-nilai Pancasila.

"Karenanya, setiap kader harus betul-betul memahami seluk-beluk dan suasana kebatinan organisasi, memiliki jatidiri yang mengakar, serta memiliki loyalitas dan komitmen kuat untuk mewujudkan cita-cita organisasi. Yaitu, mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara," pungkask Bamssoet. □

Bersama LDII Kebumen

Bamsoet Ajak Cegah Keterbelahan Umat Beragama



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menuturkan, segenap komponen bangsa, termasuk seluruh umat beragama, memiliki tanggung jawab yang sama untuk menumbuhkan-kembangkan menjaga soliditas kebangsaan. Hal ini penting mengingat secara kodrat, Indonesia adalah bangsa yang sangat majemuk dan heterogen. Tanpa wawasan kebangsaan yang memadai, bangsa Indonesia tidak akan memiliki soliditas kebangsaan,

sehingga akan mudah tercerai-berai. “Setiap perbedaan latar belakang agama, suku, dan budaya bukanlah penghalang bagi kita untuk bersatu dan bukanlah penghalang bagi kita untuk hidup rukun dalam keharmonisan. Perbedaan juga bukan penghalang untuk hidup saling menghormati, saling membantu, saling tolong-menolong dan membangun solidaritas sosial yang kokoh,” ujar Bamsoet dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI saat kunjungannya ke Dapil-7 Jawa Tengah hari ke-2 bersama

Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kabupaten Kebumen di Kebumen Jawa Tengah, Jumat (19/1/24).

Hadir, antara lain Wakil Bupati Kebumen Ristawati Purwaningsih, Ketua DPW LDII Jawa Tengah Singgih Tri Sulistiyono, Ketua Dewan Penasihat LDII Kebumen Agus Septadi, Ketua LDII Kebumen Gunardi, dan Sekretaris LDII Kebumen Hadi Purwanto.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, dalam konteks kekinian, salah satu tantangan yang akan dihadapi dalam merawat dan menjaga soliditas kebangsaan adalah penyelenggaraan Pemilu serentak yang pelaksanaannya pada 14 Februari 2024. Di satu sisi diharapkan besarnya anggaran Pemilu yang mencapai Rp 71,3 triliun akan berbanding lurus dengan penyelenggaraan Pemilu yang jujur, adil, dan berkualitas. Di sisi lain, diharapkan kedewasaan politik masyarakat juga semakin matang, sehingga siklus sejarah penyelenggaraan Pemilu yang selalu menyisakan residu persoalan, dapat diminimalisir.

“Kita tidak ingin Pemilu menyebabkan polarisasi rakyat pada kutub-kutub yang berseberangan yang bermuara pada lahirnya konflik horisontal. Dalam konsepsi ini, diperlukan sikap kebijaksanaan dari segenap pemangku kepentingan untuk bersama-sama membangun komitmen mewujudkan Pemilu yang damai dan menggembirakan,” kata Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Perhimpunan Alumni Doktor Ilmu Hukum UNPAD dan Dosen Pascasarjana Universitas Pertahanan RI (UNHAN) ini menerangkan, pada beberapa kali penyelenggaraan Pemilu, hampir selalu menyisakan residu persoalan di tengah masyarakat. Karena itu, diperlukan sikap kedewasaan dan kebijaksanaan dari segenap pemangku kepentingan untuk tidak memperkeruh kondisi dengan berbagai kegaduhan yang tidak perlu dan merugikan kehidupan rakyat



“Seluruh umat beragama juga memiliki tanggungjawab kolektif yang sama untuk menyukseskan penyelenggaraan pesta demokrasi agar berjalan secara tertib,

lancar, jujur, adil dan berkualitas. Umat beragama seyogyanya menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga agar aktualisasi kehidupan berpolitik tidak

bersinggungan dengan isu-isu sensitif yang dapat menimbulkan kesalahpahaman, dan memicu konflik horisontal,” pungkas Bamsoet. □

Bersama Pensiunan PNS (PWRI)

Bamsoet: Soliditas Kebangsaan adalah Sebuah Keniscayaan



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menuturkan, Indonesia memiliki posisi geografis yang strategis di antara Benua Asia dan Benua Australia serta Samudera Pasifik dan Samudera Hindia yang perairannya dilintasi 40% jalur perdagangan laut dunia. Menempatkan Indonesia sebagai ‘center of gravity’ yang akan menarik bagi beragam kepentingan global. Baik dalam aspek positif, yakni potensi kerjasama dan kemitraan. Ataupun aspek negative, yaitu tergerusnya ketahanan ideologi dan budaya, pengaruh dan infiltrasi serta ancaman keamanan maritim

“Posisi Indonesia sebagai negara yang majemuk dan kaya akan sumberdaya, membuat bangsa Indonesia rentan terhadap perpecahan. Karenanya, soliditas kebangsaan adalah sebuah keniscayaan dan sebuah harga yang tidak bisa ditawar-

tawar lagi,” ujar Bamsoet dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bersama pensiunan pegawai negeri sipil (PNS) atau Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Kabupaten Kebumen dalam kunjungan Dapil-7 Jawa Tengah hari ke-3 di Kebumen Jawa Tengah, Sabtu (20/1/24).

Hadir, antara lain Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Sekda Kebumen Edy Rianto, Penasihat PWRI Kebumen Marmoat Atmojo, Ketua PWRI Kabupaten Kebumen Hayatmu, serta Sekretaris PWRI Kabupaten Kebumen Saksono.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, pembangunan wawasan kebangsaan menjadi kata kunci dalam menjawab berbagai tantangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seiring perkembangan zaman, tentunya tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara tersebut akan semakin kompleks

dan dinamis.

“Sampai pada titik ini, tentunya kita memiliki kesepahaman mengenai urgensi wawasan kebangsaan. Di sisi lain, mentransformasikan gagasan wawasan kebangsaan dari alam konseptual menjadi sebuah realita, tidak semudah yang kita rasakan. Pembangunan wawasan kebangsaan bukanlah upaya yang instan, melainkan harus dilaksanakan secara masif agar dapat menjangkau segenap elemen masyarakat dan berkesinambungan agar mengakar kuat dalam kehidupan sehari-hari,” kata Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Ketua Dewan Pembina Perhimpunan Alumni Doktor Ilmu Hukum UNPAD ini menerangkan, membangun wawasan kebangsaan menuntut adanya kesadaran yang mendalam, kesungguhan niat, komitmen yang kuat, serta semangat kolektivitas yang tinggi. Artinya, kunci sukses pembangunan wawasan kebangsaan akan sangat tergantung pada keberpihakan dan dukungan dari segenap pemangku kepentingan. Sehingga setiap elemen masyarakat memiliki andil dan tanggungjawab yang sama.

“PWRI sebagai organisasi tempat berhimpunnya para abdi negara yang telah purna bakti, memiliki peran penting dan strategis dalam pembangunan wawasan kebangsaan. Karena gagasan wawasan kebangsaan senantiasa melekat dan mewarnai setiap aktivitas abdi negara, sehingga telah mendarah daging dan menjadi urat nadi bagi setiap abdi negara,” urai Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPi ini menambahkan, semangat pengabdian pada kepentingan



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

masyarakat, bangsa, dan negara, tidak akan terhenti oleh status purna bakti. Status purna bakti bukanlah akhir pengabdian. Justru setelah purna tugas, para abdi negara purna bakti semakin memiliki banyak waktu dan kesempatan untuk mengabdikan dan berkontribusi secara langsung pada setiap kegiatan kemasyarakatan.

“Saya sangat mengapresiasi banyaknya anggota PWRI yang mengabdikan diri sebagai Ketua RT, Ketua RW, menjadi tokoh masyarakat, tokoh agama, atau peran-peran sosial lainnya. Aktivitas segenap anggota PWRI yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat akan menjadi generator dan sekaligus dinamisator dalam pembangunan wawasan kebangsaan di tengah-tengah masyarakat,” pungkas Bamsoet. □

Bersama Keluarga Besar PGRI

Bamsoet Dorong Capres Terpilih Tingkatkan Kesejahteraan Guru



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengingatkan para kontestan Capres - Cawapres apabila nanti memenangkan Pilpres, harus langsung tancap gas dalam meningkatkan kesejahteraan guru. Sekaligus mempercepat

proses pengangkatan status 1 juta lebih guru honorer menjadi Guru Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Keberpihakan pada status dan kesejahteraan guru merupakan salah satu elemen penting dalam peningkatan kualitas pendidikan. Sangat naif jika menuntut

tingginya kualitas pendidikan, namun di sisi lain status dan kesejahteraan guru tidak diperhatikan.

“Mengingat hingga saat ini masih ada daerah yang tunjangan penghasilan gurunya lebih rendah dari petugas kebersihan. Padahal, profesi guru sangat mulia, sebagai pendidik yang mencerdaskan anak bangsa dalam mempersiapkan masa depan bangsa yang gemilang. Besarnya jiwa pengabdian dan pengorbanan guru, ibarat lilin di tengah kegelapan yang demi memberikan jalan terang bagi anak didik yang dikasihinya, ia merelakan dirinya meleleh dan luluh lantak, hingga habis terbakar oleh panasnya api pengorbanan,” ujar Bamsoet dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bersama Keluarga Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Banjarnegara, Selasa (23/1/24).

Turut hadir, antara lain Ketua PGRI Kabupaten Banjarnegara Noor Tamami, Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara Teguh Handoko, serta Kepala Kantor Kementerian

Agama Kabupaten Banjarnegara Karsono.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, sebagai wadah resmi tempat bernaung para guru, keberadaan PGRI harus tetap solid dan jangan sampai terpecah belah. Sehingga bisa terus menjadi lokomotif dalam memajukan kehidupan pendidikan di Indonesia. Termasuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengelola dan mengawasi anggaran pendidikan yang terdapat dalam APBN.

“Sesuai amanat konstitusi, anggaran pendidikan dalam APBN sudah dialokasikan sebesar 20%. Dalam APBN 2024, jumlahnya mencapai sekitar Rp 660,8 triliun. Namun, langkah tersebut tidak serta merta dapat mendongkrak kualitas pendidikan di tanah air. Sehingga perlu ada evaluasi dan pembenahan dalam distribusi anggaran pendidikan, agar benar-benar tepat sasaran dan dapat menjawab persoalan-persoalan mendasar yang masih menjadi pekerjaan rumah dalam dunia pendidikan,” jelas Bamsoet.

Dosen pascasarjana Universitas Pertahanan RI (UNHAN), Universitas Borobudur, UT dan Universitas Perwira Purbalingga (UNPERBA) ini menerangkan,



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

tokoh pendidikan nasional, Ki. Hadjar Dewantara, telah mewariskan buah pikiran yang selalu dapat kita jadikan rujukan dalam konsep pendidikan dan kepemimpinan nasional. Semboyan *ing ngarso sung tulodo* (di depan memberi teladan/ccontoh), *ing madyo mbangun karso* (di tengah memberikan motivasi/semangat), dan *tut wuri handayani* (di belakang memberikan dorongan), menggambarkan pentingnya peran guru sebagai teladan, motivator, dan

sekaligus generator.

“Saya meyakini jika setiap guru menerapkan prinsip pendidikan sebagaimana diwariskan oleh Ki Hajar Dewantara tersebut maka pendidikan nasional akan melahirkan sumberdaya-sumberdaya manusia yang tidak sekedar memiliki keunggulan kognitif dan daya saing. Namun, jauh lebih fundamental, yaitu sumberdaya manusia yang berkarakter dan berwawasan kebangsaan,” pungkas Bamsoet. □

Sosialisasi Empat Pilar MPR

Fadel Muhammad Sampaikan Tiga Pesan untuk Masyarakat Gorontalo

WAKIL Ketua MPR Prof. Dr. Ir. H. Fadel Muhammad menyampaikan tiga pesan utama dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR kepada masyarakat Kelurahan Libuo, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo. Ketiga pesan itu adalah: Pertama, menjaga dan mengawal Empat Pilar MPR,

Kedua, mendorong Pemilu 2024 bisa berjalan dengan baik, dan ketiga menjadikan Provinsi Gorontalo ke depan lebih baik lagi. “Saya ingin agar Empat Pilar MPR, yaitu Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, tetap menjadi pegangan masyarakat,” kata Fadel





FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Muhammad usai menyampaikan Sosialisasi Empat Pilar MPR kepada masyarakat di Kelurahan Libuo, Kota Gorontalo, Ahad petang (7/1/2024).

Lalu, pesan kedua, berharap pemilu pada 14 Februari 2024 berjalan dengan baik sehingga terpilih pemimpin di tingkat nasional dan daerah. Dan, pesan ketiga, kita ingin Provinsi Gorontalo lebih maju lagi, terutama ekonominya.

Menurut Fadel Muhammad, Empat Pilar MPR (Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara) sangat penting, karena menjadi pilar bangsa. "Ibarat membangun rumah perlu dasar dan pilar yang kuat. Begitu juga dengan bangsa kita perlu pondasi yang kuat," katanya.

Fadel Muhammad menjelaskan masing-masing pilar kepada masyarakat. "Masyarakat perlu menjaga Empat Pilar MPR. Empat Pilar sangat penting. Kita harus menjaga persatuan dan kesatuan. Kita berbeda-beda tetapi tetap satu. Kalau kita tidak jaga, bangsa ini bisa terpecah belah," terang Wakil Ketua MPR dari Kelompok DPD ini.

Di depan masyarakat Libou, Fadel

Muhammad mengingatkan, bangsa Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi Pemilu pada 14 Februari 2024. Calon presiden pun akan berkampanye ke Provinsi Gorontalo. "Setiap mereka (calon presiden) datang ke Gorontalo, saya ikut mendampingi karena saya sebagai 'orangtua,' bapaknya Gorontalo," katanya.

Fadel berharap, Pemilu 2024 bisa menghasilkan pemimpin nasional yang terbaik, tidak hanya presiden dan wakil presiden, tetapi juga wakil-wakil di DPR pusat, DPRD provinsi, kabupaten dan kota, serta anggota DPD. "Proses Pemilu ini sudah berjalan, dan saya berharap penyelenggaraan Pemilu bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan pemimpin yang terbaik," harapnya.

Di akhir sosialisasi, Fadel berpendapat, Provinsi Gorontalo harus bisa melakukan lompatan besar (quantum leap). "Provinsi Gorontalo jika berjalan biasa-biasa saja akan sulit maju. Karena itu ketika menjadi gubernur, saya melakukan lompatan besar," ujar Gubernur Gorontalo dua periode ini.

Karena itu, Fadel Muhammad mengusulkan Provinsi Gorontalo sebagai lumbung pangan nasional. "Artinya, lumbung pangan nasional ada di Gorontalo. Potensi itu terlihat di Kabupaten Pohuwato.

Daerah ini memiliki lahan dan irigasi yang bisa dikembangkan menjadi lumbung pangan nasional," ujarnya.

Kalau menjadi lumbung pangan nasional, lanjut Fadel, maka Provinsi Gorontalo mendapatkan anggaran dari pemerintah pusat. Dengan anggaran yang besar itu, Provinsi Gorontalo akan cepat berkembang. "Seperti ketika saya membuat Gorontalo sebagai daerah penghasil jagung. Ini memiliki dampak yang besar dan bisa menyejahterakan rakyat. Karena itu, Provinsi Gorontalo harus memiliki program-program untuk melakukan lompatan besar," tambahnya.

Untuk mewujudkan Provinsi Gorontalo sebagai lumbung pangan nasional, Fadel telah menyiapkan proposal dan dilakukan studi kelayakan. Kantor Gubernur Gorontalo bekerjasama dengan IPB sedang melakukan studi kelayakan Provinsi Gorontalo sebagai lumbung pangan nasional. "Studi kelayakan ini mudah-mudahan tidak lama lagi selesai," pungkasnya.

Turut hadir dalam sosialisasi Empat Pilar MPR ini Camat Duingingi Heriyanto Abas, Lurah Kelurahan Libou Arifin Ali, Staf Khusus Wakil Ketua MPR Hasan Shahab, dan Hana Hasanah Fadel Muhammad, dan ratusan masyarakat Libou. □

Sosialisasi Empat Pilar MPR di Kudus

Kekayaan Sejarah di Patiayam Mampu Memperkokoh Nilai-Nilai Kebangsaan



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

SITUS Patiayam bukan hanya tempat terkuburnya tulang belulang fosil purbakala tapi lebih dari itu, merupakan situs yang mampu mereproduksi kekayaan sejarah peradaban manusia yang dapat memperkokoh nilai-nilai kebangsaan yang kita miliki.

"Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya. Situs Patiayam ini situs purbakala yang luar biasa dengan nilai-nilai sejarah yang menyertainya," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam acara Sosialisasi Empat Pilar MPR bertema: 'Jelajah Patiayam Situs Purbakala Kudus' di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Sabtu (20/

1/2024).

Selain para peserta yang terdiri dari para pelajar dan generasi muda, acara ini juga dihadiri oleh, antara lain: Tri Mumpuni (Anggota Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional), Murtikah, S.H, (Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus), Agus Susanto (Camat Jekulo), Supeno (Kepala Desa Terban), Prof, Dr. Truman Simanjuntak (Ketua Center of Prehistory and Austronesian Studies), dan anggota DPRD Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.

Menurut Lestari, nilai-nilai kebangsaan yang kita miliki saat ini juga bersumber dari

nilai-nilai yang diterapkan para pendahulu bangsa yang tercatat pada sejarah masa lalu. Nilai-nilai sejarah bangsa, kata Rerie, sapaan akrab Lestari, mengungkapkan nilai-nilai sejarah bangsa kita itu, antara lain terkandung dalam Empat Pilar MPR yang kita kenal sebagai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia/NKRI.

Berdasarkan Empat Pilar MPR yang kita miliki itu, jelas Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah, kita sebagai anak bangsa diamanatkan untuk mewujudkan negara yang adil dan makmur.

Di situs Patiayam, ungkap Rerie, sejumlah temuan arkeologi seperti fosil dan artefak yang diduga berusia ratusan ribu tahun itu memberikan catatan sejarah perjalanan kehidupan manusia yang bila ditarik benang merah akan terkait dengan dinamika kehidupan kita di masa kini.

Wilayah Patiayam ini, tegas dia, menjadi modal masyarakat Kudus memahami bahwa negara kita kaya dan bagaimana kita mampu menelisik lebih dalam peninggalan masa lalu, sehingga secara kolektif dapat mendalami nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Rerie, yang juga anggota Majelis Tinggi Partai NasDem, itu mengakui, hingga saat ini situs Patiayam belum mendapat status sebagai cagar budaya di tingkat nasional. Sejatinnya, menurut Rerie, untuk memastikan situs Patiayam menjadi cagar budaya nasional merupakan kerja bersama untuk memperjuangkan kemanusiaan. Karena, tegasnya, dengan status cagar budaya nasional kita memiliki kesempatan lebih dalam untuk meneliti dan mengungkap kehidupan sejarah peradaban yang ada di Patiayam pada masa lalu.

Dia berharap, hasil dari penelitian mendalam terhadap situs purbakala Patiayam dapat membuka mata para pemangku kepentingan dan mengelola kawasan situs purbakala ini lebih jauh sehingga mampu menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat sekitarnya. □



Bertemu AGPAII Kabupaten Purbalingga

Bamsoet Ajak Tanamkan Nilai-Nilai Luhur Agama



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menekankan perlu adanya monitoring dan evaluasi untuk memastikan besarnya alokasi anggaran pendidikan 20% dari APBN yang jumlahnya mencapai Rp 660,8 triliun maupun 20% dari APBD, digunakan seoptimal mungkin untuk kesejahteraan guru. Mengingat terjaminnya kesejahteraan guru pada akhirnya akan berdampak positif pada peningkatan kualitas pendidikan dalam melahirkan sumberdaya manusia yang gemilang.

Sesuai amanat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, tujuan kita bernegara salah satunya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mewujudkannya harus terlebih dahulu dengan menyejahterakan

para guru sebagai ujung tombak dalam sistem pendidikan nasional.

“Sehingga tidak ada lagi ditemui guru yang memiliki pekerjaan sampingan sebagai tukang ojek dan lainnya demi memenuhi kebutuhan dapur. Tidak lagi ditemui guru digaji hanya Rp 500 ribu. Justru seharusnya gaji guru sudah bukan lagi di atas UMR, melainkan di atas rata-rata gaji manager perusahaan nasional atau bahkan lebih besar dari itu,” ujar Bamsoet dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bersama Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII) Kabupaten Purbalingga, Sabtu (27/1/23).

Turut hadir, antara lain Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi Setjen MPR RI Hentoro Cahyono, Staf Khusus Ketua MPR RI Brigjen Pol. Putu Putra Sedane, dan Ketua DPD AGPAII Kabupaten

Purbalingga Priyanto.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini juga mengingatkan agar luhurnya nilai-nilai agama jangan sampai dikontaminasi dengan politik pecah belah. Nilai-nilai agama, baik itu agama Islam maupun lainnya justru harus dijadikan sebagai sumber inspirasi bagi para politisi dan pendukungnya dalam menjalankan politik yang mencerahkan.

“Khusus bagi pemeluk agama Islam di Indonesia, kita harus menjadi contoh implementasi Islam yang rahmatan lil ‘alamin. The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC) melaporkan, jumlah populasi muslim di Indonesia mencapai 240,62 juta jiwa pada tahun 2023, atau setara 86,7% dari populasi nasional yang totalnya 277,53 juta jiwa. Menempatkan Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbanyak di Asia Tenggara, bahkan di dunia. Karena itu, wajah Islam Indonesia punya pengaruh besar terhadap wajah Islam dunia,” jelas Bamsoet.

Dosen pascasarjana Universitas Pertahanan RI (UNHAN), Universitas Borobudur, Universitas Terbuka (UT), dan Universitas Perwira Purbalingga (UNPERBA), serta Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, peran organisasi guru agama Islam seperti halnya AGPAII, menjadi faktor yang sangat menentukan dalam membentuk wajah dan citra Islam Indonesia. Khususnya, dalam meredam aksi radikalisme, terorisme, dan berbagai aksi kekerasan lainnya yang mengatasnamakan Islam.

“Para guru juga berperan penting dalam membangun moderasi dalam beragama, di samping meluruskan persepsi dan pemahaman yang sempit tentang agama Islam itu sendiri. Karenanya, organisasi guru agama Islam harus terus menjadi wadah dan sarana yang tepat untuk menjalin sinergi dan kolaborasi dengan segenap pemangku kepentingan dalam meluruskan citra Islam sebagai agama yang cinta damai,” pungkas Bamsoet. □



Sosialisasi Empat Pilar di Desa Pongongaila

Fadel Muhammad Ajak Masyarakat Perkuat Toleransi dan Empati



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR RI Prof. Dr. Ir. H. Fadel Muhammad mengajak masyarakat Gorontalo untuk memperkuat toleransi, rasa persaudaraan, dan empati antarsesama, dalam menghadapi berbagai masalah dan persoalan.

Fadel Muhammad mengemukakan hal itu, karena banyak mendengar berbagai keluhan dan permasalahan rakyat, terutama soal

ekonomi, dalam setiap kegiatan dan kunjungan kerjanya di Gorontalo. "Pemerintah tidak selalu ada untuk rakyat. Walaupun ada perhatian, namun gerakannya tidak cepat," ungkap Fadel Muhammad.

Berbicara dalam acara Sosialisasi Empat Pilar MPR di Desa Pongongaila, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo, Rabu (24/1/2024), Anggota DPD RI Dapil Gorontalo ini mengaku, melihat masih banyak sekali

masalah yang dihadapi rakyat Gorontalo. Dia berpendapat, saling menjaga dan membantu antarmasyarakat akan sangat meringankan.

Selain dihadiri Fadel Muhammad, Sosialisasi Empat Pilar MPR yang diselenggarakan oleh MPR bekerjasama dengan Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI) tersebut juga dihadiri oleh, antara lain: Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Irfan Igrisa, Kepala Desa, tokoh masyarakat dan warga masyarakat setempat sebagai peserta.

Lebih jauh, Fadel Muhammad menjelaskan bahwa memperkuat toleransi, empati, dan saling membantu antarsesama adalah implementasi dari nilai-nilai luhur bangsa yang terdapat pada Empat Pilar MPR, yakni Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

"Memahami dan mengamalkan Empat Pilar seperti kita membangun sebuah rumah besar. Rumah besar itu pasti membutuhkan pilar-pilar untuk memperkuat bangunan rumah, sehingga tidak mudah goyah bahkan hancur oleh terpaan permasalahan dan tantangan, baik dari dalam maupun dari luar negeri," jelas mantan Gubernur Provinsi Gorontalo dua periode ini.

Salah satu pilar dalam Empat Pilar, lanjut Fadel Muhammad, adalah Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang mengamanahkan kepada rakyat untuk selalu percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan percaya kepada Tuhan, pasti beragama. Dan, agama mengajarkan untuk selalu membantu sesama yang membutuhkan.

"Lalu sila kedua. Pancasila mengamanahkan kepada kita untuk selalu berbuat adil dan beradab kepada setiap manusia. Kemudian ada sila Keadilan Sosial, agar kita selalu memegang teguh keadilan untuk semua," ujar tokoh nasional yang kembali maju menjadi anggota DPD RI Dapil Provinsi Gorontalo dalam kontestasi Pemilu 2024 ini. □



Sosialisasi Empat Pilar Bersama Pemuda Sulawesi Selatan

Fadel Muhammad: Jadilah Pengusaha Sebab Lapangan Kerja Terbatas



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

AHAD, 4 Februari 2024, ratusan pemuda dan warga masyarakat Desa Longalo dan sekitarnya memenuhi Balai Desa Longalo, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Sore hari itu, mereka mendapat kesempatan mengikuti Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika atau yang lebih populer disebut Sosialisasi Empat Pilar MPR.

Wakil Ketua MPR RI, Prof. Dr. Ir. H. Fadel Muhammad dalam acara sosialisasi yang digelar oleh MPR bekerjasama dengan Ikatan Pemuda Sulawesi Selatan (IPSS) Provinsi Gorontalo itu hadir sebagai narasumber sosialisasi. Kehadiran pimpinan MPR dari Kelompok DPD tersebut disambut oleh Kepala Desa Longalo, Irwan Wumu, dan Ketua IPSS, Andi Nurazizah Al Zamzami.

“Saya merasa senang bisa berkunjung lagi ke desa yang memiliki banyak ladang jagung

ini,” ujar Fadel Muhammad mengawali paparannya selaku pembicara. Dia menjelaskan, desa dan kecamatan yang dikunjungi ini sudah diperhatikan semenjak ia menjabat gubernur di provinsi itu. “Saya perhatikan daerah ini sejak menjabat Gubernur Gorontalo tahun 2001, sekarang banyak perkembangan,” katanya.

Alumni ITB Bandung ini kemudian menceritakan bahwa saat pemilu untuk memilih anggota DPD pada tahun 2019, dirinya mengaku mendapat suara hampir 100% di Bulango Utara. “Untuk itu, dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih,” paparnya, seraya berharap, masyarakat di sana tetap mendukung dan mendoakan di masa-masa yang akan datang.

Kepada peserta sosialisasi, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu selanjutnya menjelaskan tentang tugas dan wewenang lembaga tinggi negara, MPR RI. Salah satu tugas MPR, jelas Fadel, adalah melakukan Sosialisasi Empat Pilar. MPR melakukan tugas ini, karena ingin bangsa Indonesia solid, utuh, dan terus membangun. “Kita ingin mempertahankan bangsa Indonesia dengan Empat Pilar,” tegasnya.

Dalam sosialisasi yang dihadiri oleh banyak pemuda itu, pria yang pernah menjadi Politisi Partai Golkar itu menginginkan agar peran pemuda ke depan semakin besar. Tapi, peran pemuda yang semakin besar itu diharap dibarengi dengan pemahaman Empat Pilar MPR. Hal demikian penting mengingat tantangan pemuda ke depan semakin rumit.

Fadel mengungkapkan, setelah tamat kuliah, pemuda pasti ingin mengabdikan di tengah masyarakat, namun lapangan kerja yang ada terbatas. “Peluang menjadi pegawai negeri sipil terbatas,” tuturnya. Fadel Muhammad berharap kepada para pemuda agar berwirausaha atau menjadi pengusaha. Menjadi pengusaha, menurut Fadel, tidak perlu berskala besar, tapi yang penting usahanya jalan dan bisa menghidupi diri sendiri dan keluarga. “Inilah yang kita harapkan dari pemuda ke depan”, tegasnya.



Menurut Fadel, menjadi wirausahawan atau pengusaha sekarang semakin terbuka, sebab salah satu bank milik pemerintah siap memberikan pinjaman dengan bunga bank yang rendah.

Dalam kesempatan itu, Fadel Muhammad juga mendapat curhat dari kepala desa tentang banyaknya tantangan hidup para petani di sana. Menurut sang kepala desa, 90% dari

jumlah penduduk di sana bekerja sebagai petani. Bila ada El Nino, katanya, hasil pertanian mengalami kerusakan. Bukan hanya itu, petani di sana juga mengalami kekurangan benih.

Menanggapi hal demikian, pria yang menjadi Guru Besar di Universitas Brawijaya itu membandingkan saat dirinya menjadi Gubernur Provinsi Gorontalo. “Dulu saya kirim benih dari Jawa ke Gorontalo,”

tuturnya. Menurut Fadel, pertanian harus menjadi tulang punggung kehidupan masyarakat. “Jangan tinggalkan sektor pertanian,” pintanya.

Selanjutnya, Fadel Muhammad menyatakan komitmennya untuk terus memerhatikan desa dan kecamatan di Provinsi Gorontalo. “Ke depan kita dorong untuk menjadi lebih maju,” ungkapnya. □

Sosialisasi Empat Pilar MPR di Desa Bunuyo

Fadel Muhammad Paparkan Seputar Kewenangan MPR RI



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

DI HARI yang sama (Rabu, 24/1/2024), Wakil Ketua MPR RI Prof. Dr. Ir. H. Fadel Muhammad juga menyampaikan materi Sosialisasi Empat Pilar MPR di Desa Bunuyo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo. Hadir dalam kesempatan itu, staf ahli Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad, Hasan Shahab, Kepala Desa Bunuyo Nikson Husain, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat.

Di depan para peserta Sosialisasi Empat Pilar MPR, Fadel Muhammad menjelaskan, Indonesia memiliki satu lembaga tinggi negara, yakni MPR RI yang

memiliki tugas dan kewenangan yang sangat luar biasa dan hanya MPR yang memilikinya. Yakni, berwenang mengubah dan menetapkan Undang Undang Dasar, serta melantik dan memberhentikan Presiden RI.

“Kewenangan ini tidak ada di lembaga tinggi negara lainnya. Dan, saya putera Gorontalo adalah salah satu dari 10 orang Pimpinan MPR yang ada. Dari 10 pimpinan tersebut, 9 orang mewakili partai politik. Hanya saya sendiri yang mewakili daerah, yakni dari kelompok DPD RI,” katanya.

Lebih jauh, Fadel Muhammad menyampaikan bahwa lembaga MPR saat era

kekuasaan Orde Baru sempat menjadi lembaga superbodi, yakni sebagai lembaga tertinggi negara. Saat itu, Presiden RI dipilih oleh MPR sebagai Mandataris MPR.

Tapi, paska reformasi bergulir, dilanjutkan dengan amandemen UUD 1945, MPR berubah menjadi lembaga tinggi negara, setara dengan lembaga tinggi negara lainnya, seperti DPR, DPD, Presiden, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Karena saat acara Sosialisasi Empat Pilar MPR itu berlangsung masih dalam masa kampanye Pemilu, Fadel Muhammad tidak bosan-bosan memberikan edukasi tentang Pemilu serentak 2024. Pemilu 2024, kata Fadel Muhammad, merupakan pesta demokrasi rakyat setiap lima tahun sekali, memilih Presiden, Wakil Presiden, calon anggota legislatif, dan Kepala Daerah. “Saya berpesan kepada bapak dan ibu, gunakan hak pilih kalian dengan bijak,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama Kepala Desa Bunuyo Nikson Husain tidak mengira desanya dikunjungi Fadel Muhammad, tokoh nasional asal Gorontalo yang menjabat sebagai salah satu pimpinan lembaga tinggi negara, MPR RI.

“Ini desa kecil, kami merasa terhormat. Apalagi materi Sosialisasi Empat Pilar yang disampaikan Fadel Muhammad, memberikan wawasan dan pengetahuan baru buat masyarakat,” tandasnya. □



Dr. H. Bambang Soesatyo, SE., SH., MBA.

Ketua MPR RI

Kuasa Rakyat Memilih dan Menyerahkan Mandat

KETIKA setiap warga negara yang berhak memilih masuk bilik suara untuk memilih pemimpin dan wakilnya di parlemen, pada detik itulah dia menyerahkan mandat kepada sosok calon presiden (Capres) dan sosok calon anggota legislatif (Caleg) yang dipilihnya. Mandat segenap rakyat itu sudah dimeteraikan dalam pembukaan atau mukadimah konstitusi negara kesatuan Republik Indonesia, yakni UUD 1945.

Mandat rakyat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 itu bertitah bahwa pemerintahan dan lembaga perwakilan rakyat yang lahir dari setiap pemilihan umum (Pemilu) wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Semua kewajiban itu selaras dengan dasar dan falsafah bangsa-negara, yakni lima sila Pancasila.

Karena pemerintah bersama MPR, DPR, DPD hingga semua DPRD wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, pelaksanaan pemungutan suara dalam momentum Pemilu tahun 2024 hingga proses pengumpulan dan penghitungan suara, hendaknya berjalan dengan aman dan lancar, damai, jujur serta bermartabat.

Momentum itu dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari 2024, hari ketika rakyat melaksanakan hak

dan kewajibannya sebagai pemegang kedaulatan tertinggi memilih sosok presiden dan sosok anggota legislatif. Bersamaan dengan memilih, rakyat yang juga menyerahkan mandat tentang hidup berbangsa-bernegara sebagaimana telah ditetapkan dalam Pembukaan UUD 1945 itu.

Esensi dari mandat rakyat itu adalah kewajiban konstitusional. Maka, kepada presiden terpilih dan anggota legislatif terpilih hendaknya tidak sekadar menerima mandat itu, melainkan wajib memahami, memenuhi, dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Dengan memenuhi dan melaksanakan mandat itu, presiden dan anggota legislatif terpilih memenuhi kewajiban konstitusionalnya. Dengan begitu, pemahaman akan hasil Pemilu jangan hanya sebatas kalah-menang, melainkan kesadaran dari mereka yang terpilih untuk menyerap, memahami dan berupaya memenuhi aspirasi rakyat selaku pemberi mandat.

Pemilu yang jujur dan bermartabat sudah barang tentu sangat penting, karena semua elemen rakyat sangat mendambakan hasil Pemilu yang legitimate. Pelaksanaan Pemilu yang jujur juga mencerminkan penghormatan terhadap martabat dan hak asasi manusia. Semua kalangan yakin dan percaya bahwa dari hasil Pemilu yang bermartabat akan lahir pemerintahan baru yang legitimate.

Tampilnya pemerintah baru yang legitimate menjadi jaminan bagi terwujudnya stabilitas politik dan keamanan, terjaganya ketertiban umum dan

terawatnya stabilitas ekonomi. Lebih dari itu, semua elemen masyarakat tidak ragu untuk melaksanakan ragam kegiatan produktif. Dan, sudah barang tentu bahwa citra positif negara-bangsa dalam pergaulan antarbangsa pun akan tetap terjaga dengan baik.

Sebaliknya, semua orang tentu paham dan mampu memprediksi akibatnya jika masyarakat ragu akan legitimasi hasil Pemilu 2024. Keraguan itu akan mereduksi derajat kepercayaan terhadap pemerintahan baru. Keraguan akan legitimasi hasil Pemilu pun berpotensi menjadi benih instabilitas politik dan keamanan, yang eksisnya akan menjalar ke sektor ekonomi dan bisnis, serta aspek kehidupan lainnya

Untuk mengikis atau menutup ruang keraguan terhadap legitimasi hasil Pemilu 2024, pilihan yang tersedia hanya satu, yakni mengakui dan menghormati kedaulatan rakyat pemilih menggunakan hak pilihnya di bilik suara. Siapa pun harus bersedia menghormati setiap individu pemegang hak pilih sebagai pribadi yang merdeka dalam menentukan pilihannya berdasarkan suara nuraninya sendiri.

Ketika berbicara tentang Pemilu yang jujur dan bermartabat, sudah barang tentu peran penyelenggara Pemilu menjadi faktor utama. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan semua instrumen pelaksana di lapangan diharapkan mau melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik dan benar, seturut peraturan yang telah disepakati bersama.

Cukup beralasan untuk mendorong KPU dan semua instrumennya agar mencerna dan menghayati dinamika di ruang publik, akhir-akhir ini. Mendekati waktu pemungutan suara, berbagai elemen masyarakat telah menyatakan sikap dan menyuarakan aspirasi. Dinamika seperti itu hendaknya dipahami sebagai upaya publik melakukan pengawasan terhadap setiap tahap dan proses pelaksanaan Pemilu

2024. Karena itu, kesalahan sekecil apa pun tidak boleh ditolerir, utamanya tahap penghitungan suara.

Hasil Pemilu 2024 harus produktif, dalam arti menjadi langkah lanjutan dari proses pembangunan nasional. Maka, hasil Pemilu 2024 pun harus memberi jaminan bagi terwujudnya stabilitas nasional, karena melanjutkan pembangunan nasional butuh suasana kondusif pada aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebagaimana telah menjadi pemahaman bersama bahwa sejak persiapan hingga pelaksanaan Pemilu 2024, dunia sedang tidak baik-baik saja. Ada perang di berbagai kawasan yang menyebabkan disrupsi rantai pasok serta gangguan pada aspek lalu lintas barang dan jasa. Perubahan iklim menyebabkan anjloknya produktivitas sektor tanaman pangan. Harga energi (minyak) pun mahal. Belum lagi faktor tingginya suku bunga acuan yang memberi tambahan beban pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), utamanya beban membayar bunga utang luar negeri.

Semua ekses Ketidakpastian global itu sudah dirasakan langsung oleh masyarakat Indonesia. Dalam beberapa pekan terakhir, masyarakat mulai mempersoalkan naiknya harga beras. Dengan fakta ini, ada kewajiban regulator untuk berupaya menurunkan harga beras, dan kerja menurunkan harga beras butuh suasana yang kondusif atau berkepastian.

Maka, pelaksanaan Pemilu 2024 dan hasilnya tidak boleh menjadi faktor yang menyulut ketidakpastian di dalam negeri. Semua pihak diminta berkontribusi untuk mewujudkan kondusifitas itu. Dengan suasana kehidupan bernegara yang konfusif, segenap warga bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia akan terlindungi. Lebih dari itu, selalu ada peluang untuk meningkatkan kesejahteraan segenap warga bangsa. □

Siti Fauziah Terima Piagam Government Customer Appreciation dari Pos Indonesia



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

PLT. Sekretaris Jenderal MPR RI, Siti Fauziah, SE., MM., menerima piagam penghargaan Government Customer Appreciation dari Pos Indonesia. Penghargaan ini merupakan apresiasi tinggi Pos Indonesia kepada Sekretariat Jenderal MPR RI atas kerjasama selama ini dengan Pos Indonesia.

Piagam penghargaan ini diserahkan langsung oleh Direktur Pos, Ditjen PPI

Kemenkominfo, Gunawan Hutagalung, dalam acara Pos Indonesia Day 'Leading To Logistic Government': Logistik Pemerintah, Layanan Pos Universal dan Filateli, di Menara Danareksa, Jakarta, Rabu (7/2/2024).

Tampak hadir dalam acara itu adalah: Menkoinfo RI, Budi Arie Setiadi; Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kominfo RI, Wayan Toni Supriyanto; Dirut Pos Indonesia, Faizal Rochmad Djoemadi,

dan seluruh pejabat Kominfo RI.

Dalam kesempatan itu, Siti Fauziah menyampaikan apresiasi kepada Pos Indonesia atas kinerjanya yang sangat luar biasa, dan terjalannya kerja sama dengan MPR RI. Menurut Ibu Titi, sapaan Siti Fauziah, MPR memilih bekerjasama dengan Pos Indonesia, karena MPR memiliki 711 anggota yang kebanyakan melakukan kegiatan bukan di kota, tapi jauh di pelosok daerah di Indonesia.

Salah satu program kegiatan yang dilaksanakan para anggota MPR adalah Sosialisasi Empat Pilar MPR kepada masyarakat. "Tentu penyampaian sosialisasi ini dibarengi dengan pemberian materi fisik. Karena Pos Indonesia adalah ekspedisi yang memiliki jaringan luas dan bisa menjangkau ke segenap pelosok daerah. Dan, Pos Indonesia bisa melakukannya dalam waktu yang cepat. Sehingga semua program kami lancar, karena kinerja Pos Indonesia yang bisa diandalkan," terangnya.

Merespon apresiasi Siti Fauziah itu, Direktur Bisnis Kurir dan Logistik Tonggo Marbun menyatakan, Pos Indonesia sangat menghargai dan berterima kasih atas kepercayaan Setjen MPR RI bekerjasama dengan Pos Indonesia. "Pada intinya kami bangga menjadi partner sebuah lembaga tinggi negara, MPR RI. Ke depan kami akan terus meningkatkan pelayanan kami menjadi lebih baik lagi," tandasnya. □

DER



Pelantikan Pejabat di Lingkungan Setjen MPR

Siti Fauziah Dorong Peningkatan Integritas, Profesionalitas, Loyalitas, dan Komitmen



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

PL.T. Sekretaris Jenderal MPR RI, Siti Fauziah, SE., MM., melantik serta mengambil sumpah/janji pejabat eselon III, eselon IV, dan tenaga PPPK di lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) MPR RI, yang dipromosikan untuk menempati posisi penugasan baru.

Gelar acara pelantikan yang diselengga-

rakan di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/2/2024), ini turut dihadiri para pejabat teras Setjen MPR RI.

Siti Fauziah yang biasa disapa Ibu Titi dalam sambutannya menekankan, agar seluruh pejabat yang baru dilantik untuk tetap menjaga, serta meningkatkan integritas,

profesionalitas, loyalitas, dan komitmen terhadap tugas yang diamanahkan, sebagai bentuk tanggung jawab.

Selain itu, Ibu Titi berharap, agar selalu berusaha meningkatkan kinerja, baik secara pribadi, unit kerja, maupun organisasi secara keseluruhan. "Promosi dan mutasi jabatan yang dilaksanakan hari ini merupakan dinamika dan kebutuhan organisasi," tegas Bu Titi.

"Kita perlu terus menerus melakukan penyegaran agar terjadi peningkatan kinerja organisasi. Untuk mewujudkan hal itu, kita mesti menempatkan orang yang tepat pada tempat yang tepat, agar fungsi organisasi dapat berjalan dengan baik," jelasnya.

Bagi yang mendapatkan promosi jabatan, lanjut dia, harus memahami bahwa promosi bukanlah hak, melainkan penghargaan bagi pegawai yang telah menunjukkan prestasi dan berkinerja baik. Harus dicamkan pula bahwa penghargaan itu membawa kewajiban yang harus dipikul di pundak pemegang jabatan, yaitu kewajiban untuk bekerja lebih baik, berkinerja lebih baik, dan menjadi contoh atau teladan bagi anak buah yang saudara pimpin, serta bagi seluruh pegawai.

"Sedangkan bagi pejabat yang mengalami mutasi, kita perlu memiliki pemahaman yang sama bahwa mutasi merupakan sesuatu yang biasa dalam sebuah organisasi yang terus bergerak dinamis," imbuhnya

Dalam kesempatan itu, Ibu Titi sekaligus menyampaikan beberapa hal penting yang harus diketahui semua pejabat dan pegawai di lingkungan Setjen MPR. Antara lain, seputar pemilu, lalu persiapan dan pelaksanaan Sidang Tahunan MPR 2024, yang rencananya akan dilaksanakan di Ibu Kota Negara (IKN) baru.

Terkait soal Pemilu, Ibu Titi mengingatkan dan mengajak untuk tidak menyia-nyikan hak pilih. Sebab, satu suara akan menentukan nasib bangsa Indonesia lima tahun ke depan. Pilihan boleh dan pasti berbeda. Tetapi, berbeda pilihan tidak kemudian mengakibatkan persatuan terpecah. Ibu Titi



mengajak untuk tetap solid sebagai keluarga besar Sekretariat Jenderal MPR.

“Pada detik-detik terakhir ini, saya perlu mengingatkan agar kita semua tetap menjaga netralitas sebagai seorang ASN,” ujar dia.

Lalu soal persiapan pelaksanaan Sidang Tahunan MPR 2024. Ibu Titi memaparkan bahwa pada tahun 2024 ini Setjen MPR akan menghadapi tugas berat. Empat agenda kenegaraan akan dilaksanakan pada tahun ini, yaitu: Sidang Tahunan MPR di 16 Agustus 2024, Sidang Paripurna MPR Akhir Masa Jabatan yang di bulan September, Sidang Paripurna MPR dalam rangka Pelantikan Anggota MPR periode 2024 – 2029 yang dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 3 atau 4 Oktober, dan Sidang Paripurna MPR dalam rangka Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden hasil Pemilu 2024, yang di dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2024.

“Tugas-tugas yang tidak ringan harus kita kerjakan, di tengah rencana kepindahan ibukota negara, dari DKI Jakarta ke IKN. Kita harus betul-betul mempersiapkan diri dengan segala situasi dan kondisi yang ada di hadapan kita dan tetap fokus kepada kelancaran dan kesuksesan semua agenda



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

penting tersebut,” paparnya.

Di sesi akhir, Ibu Titi memberi semangat dan motivasi. Dia meyakini serta percaya, kesulitan seberat apa pun pasti ada jalan keluar terbaik. Terlebih, jika semua saling bahu membahu dalam mengatasi berbagai kesulitan itu.

“Tanggung jawab pelaksanaan per-

sidangan MPR pada tahun 2024 tidak terletak pada satu atau dua unit kerja saja, melainkan menjadi tanggung jawab seluruh unit kerja, menjadi tanggung jawab kita semua. Maka berikanlah yang terbaik demi keberhasilan Sidang MPR pada tahun 2024 ini,” pungkasnya. □



Acun Herdikan

Kades Desa Botuboluo

Festival Pantai Batuboluo untuk Ajang Promosi Wisata



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

DESA kami kebetulan dekat dengan laut dan pantai Botuboluo Gorontalo yang sangat indah. Sehingga, kami beranikan diri untuk membuka wisata laut di sini yang kami beri nama 'Botuboluo Beach Park.' Hanya memang gaungnya tidak begitu luas.

Wisatawan lokal yang berkunjung kemai kebanyakan dari seputar desa di sini, dan sedikit dari domestik. Destinasi wisata ini memang masih belum begitu dikenal oleh wisatawan domestik dan wisman. Untuk itu, memang kami perlu memviralkannya dengan promosi besar-besaran.

Maksimal yang bisa kami lakukan adalah menyelenggarakan kegiatan berupa Festival Pantai Botuboluo. Festival ini memang gaungnya masih belum sampai secara nasional, tapi bisa kita kembangkan lebih baik lagi di masa datang.

Untuk itu, kami perlu kerjasama dan dukungan, baik dari pemerintah daerah maupun pusat agar destinasi wisata pantai yang indah ini bisa sejajar dengan destinasi wisata pantai lainnya di Indonesia. □

DER

Ibu Renny

Warga Gorontalo

Para Caleg Harus Tepati Janji Jika Terpilih

JANGAN hanya janji, tapi tepati begitu terpilih dan duduk enak di kursi dewan. Kami rakyat, terutama kaum ibu, pasti ingat janji para caleg. Jadi, jangan kecewakan rakyat. Keinginan kami sederhana saja, ingin hidup baik-baik saja, semua tercukupi, murah dan banyak, terutama bahan untuk makan sehari-hari.

Lalu pendidikan untuk anak-anak kami jangan dipersusah, harus terjangkau sehingga anak-anak kami bisa menempuh pendidikan dan menjadi pintar untuk kehidupan mereka yang lebih baik.

Di daerah kami, terutama pejabat yang mencalonkan diri kembali, kami akan melihat apa yang dia sudah kerjakan untuk rakyat saat menjabat dahulu. Seperti dahulu kami pernah punya seorang Gubernur yang sangat baik dan bisa memajukan rakyatnya di bidang pertanian jagung. Seperti itulah seharusnya. Pejabat yang amanah kita pilih kembali. □

DER





FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Ledia Hanifa Amaliah, S.Si, M.Psi.T., Anggota MPR Fraksi PKS

Ada Persoalan dalam Skema Pinjol untuk Membayar UKT

AKHIR-AKHIR ini muncul polemik, pro dan kontra, di seputar pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) dengan skema pinjaman online atau pinjol. Polemik ini muncul pertama kali ketika Institut Teknologi Bandung (ITB) menawarkan pinjol dari Danacita kepada mahasiswa yang mengalami kesulitan atau menunggak membayar uang kuliah. Sebelumnya, polemik ITB menawarkan mahasiswa membayar uang kuliah menggunakan pinjol sudah ramai diperbincangkan di media sosial X (dulu twitter).

Mulanya, sebuah akun @itbfess mengunggah foto pamflet berisi informasi cicilan kuliah bulanan yang dikelola oleh pihak ketiga. Pada pamflet itu terdapat informasi program cicilan enam bulan hingga 12 bulan. Proses pengajuan tanpa down payment (DP) dan tanpa jaminan apapun, layaknya aplikasi pinjol lainnya. Tertera nominal pengajuan biaya pendidikan sebesar Rp 12,5 juta dengan

waktu 12 bulan. Nominal pengajuan pendidikan tersebut dapat dicicil per bulan dengan biaya Rp 1.291.667. Estimasi total pengembalian selama setahun sebesar Rp 15.500.004. Angka itu terdiri dari rincian durasi pembayaran 12 bulan, biaya bulanan platform 1,75% dan biaya persetujuan 3%.

Pihak Rektorat ITB menyebutkan, cicilan UKT melalui pinjol Danacita ini merupakan kebijakan yang ditetapkan Rektorat ITB sebagai salah satu solusi dan opsi mahasiswa untuk bisa membayar tunggakan UKT. Kebijakan cicilan UKT melalui pinjol Danacita itu di-upload pada website pembayaran UKT mahasiswa ITB. ITB sendiri sudah bekerjasama dengan Danacita sejak Agustus 2023. Danacita adalah sebuah platform lembaga keuangan non bank yang terdaftar dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang pendanaannya bergerak khusus di bidang pendidikan.

Pihak Rektorat ITB sudah sosialisasikan skema pembayaran UKT melalui pinjol ini pada November 2023.

Namun, sosialisasi itu dilakukan secara terbatas kepada mahasiswa yang masih memiliki tunggakan pembayaran UKT. Informasi skema pembayaran UKT melalui pinjol juga disebarakan melalui email mahasiswa. UKT di ITB sendiri mencapai belasan juta rupiah.

Untuk membahas polemik ini, Majelis mewawancarai anggota MPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ledia Hanifa Amaliah, S.Si., M.Psi.T. Berikut wawancara dengan Ledia Hanifa Amaliah yang juga anggota Komisi X yang bermitra dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Petikannya.

Pinjaman online (pinjol) masuk kampus. Institut Teknologi Bandung (ITB) membuka opsi bagi mahasiswa yang mengalami kesulitan membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) dengan skema pinjol. ITB pun sudah bekerja-sama dengan Danacita, sebuah lembaga non-bank yang bergerak dalam pendanaan

khusus di bidang pendidikan. Namun, skema pinjol ini mengundang pro dan kontra. Apa tanggapan Ibu?

Sebetulnya, kalau kita perhatikan, kita sudah mempunyai undang-undang yang berkaitan dengan pendidikan tinggi (perguruan tinggi), yaitu UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Dalam UU Pendidikan Tinggi disebutkan mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam membayar perkuliahan karena ketidakmampuan orang tua atau latar belakang orangtua yang kurang mampu bisa mendapatkan beasiswa, atau mendapatkan pinjaman. Ketentuan itu ada di pasal 76 Ayat 2.

(Pada pasal 76 ayat 2 UU Nomor 12 Tahun 2012 disebutkan: "Pemenuhan hak mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan a) beasiswa kepada mahasiswa berprestasi; b) bantuan atau membebaskan biaya pendidikan dan/atau; c) pinjaman dana tanpa bunga yang wajib dilunasi setelah lulus dan/atau memperoleh pekerjaan").

Bagi mahasiswa yang memilih untuk mendapatkan pinjaman harus memenuhi ketentuan berikutnya, yaitu pinjaman itu tidak boleh ada bunga dan dibayarkan sesudah lulus atau mendapat pekerjaan (penghasilan). Karena itu, dengan sistem atau mekanisme pinjol seperti yang dilakukan sekarang (diterapkan di ITB), yaitu ketika mahasiswa masih kuliah dan ada bunga pinjaman maka skema itu sebenarnya sudah bertentangan dengan undang-undang.

Sebenarnya bukan kali ini saja pinjol masuk kampus. Beberapa waktu lalu, mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) pun terjerat kasus pinjol. Sebanyak 126 mahasiswa IPB menjadi korban penipuan dengan modus pinjol. Artinya, pinjol marak di masyarakat, termasuk mahasiswa. Padahal, pinjol lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya. Apa pendapat Ibu?

Itu juga menjadi persoalan. Artinya, literasi keuangan kita memang rendah. Banyak hal-hal yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh kita, seperti pinjol ini. Sama halnya dengan skema pinjol untuk pembayaran UKT, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus menelusuri pokok persoalannya, karena dalam proses pinjol itu ada pelanggaran UU.

Pada kenyataannya, memang banyak mahasiswa baik negeri maupun swasta yang mengalami kesulitan membayar UKT. Apakah ada alternatif skema pembiayaan atau pendanaan bagi mahasiswa yang kesulitan atau menunggak untuk membayar UKT?

Dengan adanya skema pinjol untuk pembayaran UKT sebenarnya bertentangan dengan UU karena adanya bunga pinjaman maka pemerintah harus memikirkan bagaimana pembiayaan pendidikan kita. Yaitu, bagaimana kita membuat kebijakan soal pembiayaan pendidikan. Artinya, setelah kebijakan wajib pendidikan 12 tahun, kemudian ingin ditingkatkan ke perguruan tinggi, maka pilihannya adalah bagaimana agar para siswa yang akan meneruskan



pendidikan ke jenjang perguruan tinggi bisa mengikuti pendidikan tinggi dan tidak terhambat dengan persoalan biaya.

Bagaimana perhatian pemerintah terhadap masalah itu? Apakah pemerintah membiarkan skema pembayaran UKT melalui pinjol, atau memberikan alternatif lain?

Ini harus diperbaiki. Sebab, perguruan tinggi di Indonesia ini secara umum dan sebagian besar sudah menjadi PTNBH yaitu perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Dengan bentuk PTNBH ini maka pemerintah sudah mulai mengurangi bantuan kepada perguruan tinggi negeri. Karena itu, perguruan tinggi negeri mencari sendiri sumber pendanaan. Seharusnya dalam ketentuannya, perguruan tinggi itu mempunyai perusahaan yang dikelola perguruan tinggi bersangkutan sehingga bisa menghidupi kampus.

Bantuan pemerintah sekarang ini seperti

beasiswa. Persoalannya adalah ketika di tengah jalan orangtua mengalami masalah keuangan sehingga tidak bisa membayar UKT. Pada waktu lalu ada bantuan UKT, tetapi sekarang bantuan itu sudah tidak ada lagi. Komisi X DPR sudah meminta pemerintah untuk menghidupkan kembali bantuan UKT.

Kemudian student loan. Student loan ini sedang diproses, mudah-mudahan bisa berjalan karena sebelumnya tidak pernah ada student loan. Seterusnya, ketika berkaitan dengan perguruan tinggi swasta, yaitu adanya pinjaman. Pihak perguruan tinggi bekerjasama dengan pihak swasta mengadakan skema pinjaman, tetapi pinjaman itu harus dilunasi ketika mahasiswa sudah lulus dan mendapatkan pekerjaan.

Apakah pemerintah perlu menge-

luarkan regulasi baru untuk menghindari mahasiswa membayar UKT melalui skema pinjol?

Tidak perlu ada regulasi yang baru, karena sudah tercakup dalam regulasi UU tentang Pendidikan Tinggi. Persoalannya, UU itu tidak diikuti atau dipatuhi. Seharusnya pihak Inspektorat Kementerian Pendidikan harus melakukan tindakan ketika terjadi polemik tentang pinjol untuk pembayaran UKT ini.

Apa yang akan dilakukan DPR, khususnya Komisi X, menghadapi polemik skema pembayaran UKT melalui pinjol?

Komisi X DPR RI melihat bahwa memang ada persoalan dalam polemik skema pinjol untuk pembayaran UKT ini. Persoalan ini harus segera diselesaikan. Kita perlu mendiskusikan lebih komprehensif terhadap persoalan ini dan mencari jalan keluarnya. □

Artis 'Nyaleg' Hak Sebagai *Warga Negara*



Ronny Siantury

ARTIS pun berduyun-duyun mendaftarkan diri sebagai calon legislative pada Pemilu 2024 ini. Mereka tercatat di berbagai partai politik. Salah satunya adalah **Ronny Siantury**. Artis yang termasuk salah satu personil grup Trio Libels yang terkenal di era 1980-an ini nyaleg di Dapil Provinsi Gorontalo.

Ronny Sianturi adalah caleg DPR RI dari PDI Perjuangan. Dia sadar

bahwa banyaknya artis maju sebagai caleg mengundang berbagai reaksi. Banyak yang mendukung, tapi tidak sedikit pula yang apatis.

“Sebagai warga negara siapapun berhak mencalonkan diri sebagai caleg. Termasuk juga artis. Soal kepastian terpilih atau tidak itu urusan lain. “Itu tergantung kepercayaan rakyat atas pilihannya,” ujarnya di Gorontalo, Januari 2024. □

DER

Belajar Bahasa Minang di Film Hamka & Siti Raham

AKTRIS film, presenter, dan model **Laudya Cynthia Bella** bermain di film *Hamka & Siti Raham* Vol.2. Artis serba bisa ini beradu akting dengan aktor Vino G. Bastian.

"Ini film luar biasa tantangannya, juga berat. Saya harus memainkan karakter Siti Raham di usia tua yang selalu setia mendampingi Buya Hamka dalam berdakwah dan berjuang," ujar artis kelahiran Bandung, Februari 1988, ini.

Tantangan lainnya, di film ini Bella menggunakan bahasa Minang, yang masya Allah susah. "Tapi, alhamdulillah aku merasa ada pertolongan Allah," ujar selebritis yang memulai karirnya di tahun 2002, saat mengikuti pemilihan majalah remaja dan menjadi Runner-Up model Majalah Kawanku ini.

Agar bahasa Minang di dalam film lancar, Bella mengaku, harus selalu mempraktikkan bahasa Minang setiap hari saat proses reading berlangsung. Apalagi, bahasa yang digunakan adalah bahasa Minang yang masih tradisional. □

DER



Laudya Cynthia Balla



Shafira Umm

Jadi Presiden Itu Orang Hebat

SAPA saja yang bisa jadi Presiden Indonesia, dia adalah orang hebat. Pendapat Sharira Umm, seorang aktris, model, presenter, dan juga penyiar radio Indonesia keturunan Arab ini kira sulit untuk dibantah.

"Saya sendiri kalau ditanya mau jadi Presiden, aduuh pusing. Indonesia sangat kompleks. Hebat jika ada yang jadi Presiden RI," ujar artis kelahiran 2 Desember 1984 yang memulai kariernya sebagai finalis MTV VJ Hunt pada tahun 2006.

"Saya nggak mimpi jadi pemimpin negeri ini. Tapi, saya hanya bermimpi menjadi pemimpin rumah tangga aja, ha ha ha.," ujarnya. □

DER



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Menengok Salah Satu Masjid Ter... di Jawa Barat

MATAHARI sudah mulai condong ke barat, dan terus bergerak semakin mendekati peraduannya. Pada saat itulah Majalah *Majelis* tiba di Alun-Alun Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Langit di tempat tersebut tampak cerah dengan sedikit awan tipis yang berlarian. Seolah-olah, bagaikan anak-anak yang saling berkejaran.

Pada saat bersamaan, terlihat banyak pedagang yang tengah menjajakan dagangan mereka di lokasi sekitar alun-alun. Mulai dari kacang rebus, somay, batagor, bakso, juga berbagai jenis minuman. Uap mengepul yang terus beterbangan di atas kacang rebus, seolah kacang itu baru keluar dari tungkunya, membuat *Majelis* tergoda untuk membelinya.

Belakangan, bukan hanya Majalah *Majelis* yang tergoda menikmati kacang rebus di sore itu. Tetapi, ada juga beberapa ibu-ibu yang ikut membeli kacang di tempat yang sama. Dan, dengan gerakan yang cekatan, pemilik dagangan melayani mereka satu persatu, menarik lalu membungkusnya dengan kertas koran.

Itulah sebagian suasana yang bisa terekam oleh *Majelis* saat mengunjungi Alun-

Alun Cianjur, pertengahan Januari silam. Seperti layaknya alun-alun, di Cianjur pun tempat (alun-alun) menjadi tempat favorit warga untuk menghabiskan waktu, dengan bersantai. Karena itu, bisa dimaklumi jika di sana ada beberapa orang yang menyewakan mainan anak-anak, seperti mobil-mobilan hingga sepeda listrik. Ada juga beberapa anak tengah asik bermain bola bersama sesama.

Sedangkan yang membedakan Cianjur dengan alun-alun lain adalah masalah rumput. Dikebanyakan alun-alun, di tengahnya tumbuh rumput subur. Tetapi di alun-alun Cianjur rumputnya diganti dengan karpet. Bahkan, karpet itu ditata, sehingga tampak seolah-olah sebagai terusan shaf Masjid Agung yang memang ada di sana. Bahkan, keberadaan alun-alun itu terlihat menyatu dengan halaman depan dari masjid.





Berfungsi menampung jamaah yang tidak mendapat tempat di dalam masjid.

Karena itu, jangan heran bila beberapa orang yang sore itu ada di alun-alun mengenakan sarung dan berpeci. Mereka adalah masyarakat Muslim yang telah bersiap melaksanakan salat Magrib berjamaah di Masjid Agung Cianjur. Dan, semakin sore, jumlah umat Islam yang hendak melaksanakan salat semakin banyak, seiring hari yang semakin gelap.

Masjid Agung Cianjur sendiri merupakan masjid tertua di kabupaten terluas kedua di Pulau Jawa ini, setelah Sukabumi. Masjid ini dibangun pada 1290 hijriyah atau 1810 M, di atas tanah wakaf R. Siti Bodedar. Di kawasan alun-alun sendiri, masjid kebanggaan "Tatar Santri" itu menjadi bangunan yang paling mencolok. Baik karena ukurannya yang besar maupun arsitekturnya yang menawan.

Syair Sejarah Masjid

Bangunan Masjid Agung terdiri dari dua lantai, berdiri di atas lahan seluas 4.000 meter. Sejak berdiri, Masjid Agung sudah mengalami renovasi hingga tujuh kali.

Uniknya, kapan masjid ini berdiri sempat menjadi tanya. Misteri tersebut baru terungkap setelah ditemukannya *nadzom* atau syair yang terukir di atas papan jati seukuran daun pintu di depan mihrab.

Untaian syair terdiri dari 11 larik itu berisi puji-pujian dan kekaguman terhadap Ka'bah di Mekah dan Masjid Nabawi Madinah, serta masjid Agung sendiri. Di akhir *nadzom* itu tertulis keterangan tahun pembangunan masjid, yaitu 1290 hijriyah atau tahun 1810.

Sayang, pada pelaksanaan renovasi ke lima, atau tahun 1968, ukiran papan berisi *nadzom* sejarah masjid raib. Tidak ada satupun yang mengetahui, di mana papan tersebut disimpan. Beruntung salah satu tokoh bernama Ending Bahrudin sempat menyalin syair tersebut, dan mengartikannya dalam bahasa Indonesia.

Pada akhir pekan dan hari libur, Masjid Agung Cianjur menjadi tujuan wisata religi yang banyak peminatnya. Acapkali, wisatawan yang datang bahkan dari luar Cianjur. Umumnya, mereka tertarik menyaksikan arsitektur masjid, yang digadang-gadang sebagai salah satu yang terbaik di Jawa Barat. Ini terbukti dengan

beberapa penghargaan yang sempat diperoleh. Antara lain, pada 1977 Masjid Agung dinyatakan sebagai salah satu masjid termegah di Jabar. Dan, pada 2005, masjid ini mendapat penghargaan dari Dewan Masjid Indonesia (DMI) sebagai masjid dengan arsitektur terbaik di Jawa Barat.

Masjid Agung Cianjur merupakan masjid tertua di Jawa Barat. Sebagai masjid tertua, Masjid Agung Cianjur memadupadankan budaya dan unsur arsitektur Sunda, Banten, dan Turki. Desain atap prisma bertingkat serta bangunan melebar mengingatkan pada model rumah tradisional Jawa. Sementara dua menara, pada sisi kanan dan kiri, menambah nilai kemegahan masjid.

Salah satu yang tak kalah unik dan menjadi icon dari masjid ini adalah Tiang Asmaul Husna juga monumen Alqur'an besar di tengah alun-alun. Keberadaan tiang bertuliskan Asmaul Husna menjadikan kompleks masjid tampak makin cantik. Tempat ini kerap menjadi spot foto para wisatawan. Semua keindahan tersebut akan terlihat semakin cantik ketika masjid digunakan umat Islam mendirikan salat berjamaah. □

MBO

Anak Muda: Penakar Identitas Budaya Dalam Modernitas

Pendahuluan

Dalam perspektif evolusi, tahapan peradaban dunia mengubah kehidupan manusia global. Perubahan yang menyertai pada setiap periode sejarah diakui sebagai realisasi kemampuan dinamis, kesadaran adaptif serta kebutuhan mempertahankan dan merawat kehidupan. Catatan sejarah manusia menyajikan rangkaian perkembangan sejak kehidupan nomaden sampai pola hidup berkelompok dengan tujuan kesejahteraan manusia. Keseluruhan perkembangan terkait erat dengan upaya pemenuhan kebutuhan dasar, keterhubungan antarmanusia dengan ragam penyesuaian atas perbedaan dan paradigma berpikir tentang masa depan yang lebih baik. Dalam dinamika tersebut, terdapat seperangkat nilai berupa konsensus dan karya kreatif intelektual bersumber dari budi dan daya manusia yang diwarisi lintas generasi karena berisi seperangkat pedoman kemanusiaan. Dialektika budi dan daya tersebut dikenal dengan budaya yang merepresentasi kekayaan identitas, bahasa, seni, kuliner, cara berpikir, berinteraksi dan atribusi lain yang mewarnai perjumpaan antar manusia.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki kekayaan sejarah mulai dari cerita kehidupan berbasis suku, kerajaan, perjumpaan dengan bangsa pencari rempah, kolonialisme, pra-kemerdekaan, kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan. Setiap periode sejarah memiliki nilai budaya yang diteruskan sampai generasi kini. Daya imajinasi dan interpretasi dapat dioptimalkan dalam menghadirkan sketsa tentang dinamika setiap periode sejarah dengan keunikan tertentu. Salah satunya tampak pada periode pra-kemerdekaan berupa daya dorong masing-masing kelompok melalui anak muda untuk menyatu sebagai satu bangsa tanpa menegasi keanekaragaman budaya, suku, bangsa, bahasa, etnis, seni, musik, kuliner, dan sistem kepercayaan. Puncak kesatuan dicatat dalam ingatan holistik maupun kesadaran kolektif pada sumpah satu tanah, bangsa dan bahasa menuju cita-cita kemerdekaan. Lalu, masih relevankah warisan nilai dan identitas budaya ditanamkan dalam bedeng modernitas?

Modernitas: Antara Peluang dan Tantangan

Modernitas memang mengedepankan keberagaman, inklusivitas dan keterbukaan informasi. Setiap detik, individu mampu mengetahui tentang peristiwa maupun temuan ilmiah dalam geliat dunia terkini. Tetapi, dunia yang sama mengancam generasi muda tercerabut dari sejarah diri dan budayanya. Dengan karakter mengedepankan hype culture dan trend budaya konsumerisme,

kemudian tuntutan untuk terlibat pembicaraan alur informasi cepat dan eksplosif, dampak yang mengkhawatirkan adalah pengambilan inspirasi membentuk diri dan lingkungan sekitar bersumber dari online word of mouth. Budaya dialog tergantikan oleh monolog virtual di hadapan segenggam mesin berupa handphone. Asumsinya, teknologi dengan kemudahan dan kecepatan akses memengaruhi cara hidup manusia, menyajikan percampuran norma, mengubah pola perilaku, dan melanggengkan praktik sosial budaya tertentu. Kemudahan akses pada jejaring informasi memungkinkan setiap individu maupun kelompok menjauhkan diri dari sumber kebenaran ilmiah serta nilai budaya karena yang paling dibutuhkan adalah kesesuaian dengan fenomena trending agar tidak dianggap ketinggalan dalam pusaran budaya populer. Akibat dari geliat yang ada, suatu generasi berpotensi terasing dengan akar budayanya.

Pada Mei 2023, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyimpulkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 215 juta jiwa. Berdasarkan usia, kelompok remaja di usia 13-18 menjadi pengguna paling banyak sebesar 98,2%. Kelompok muda yang berusia 19-34 tahun sebanyak 97,17%, dan kelompok dewasa awal yang berusia 35-54 tahun mencapai 84,04%. Sementara berdasarkan tingkat pendidikan, kelompok pascasarjana mencapai 100%, sarjana 97,61%, kelompok SMA 94,74% dan tingkat SMP 85,42%. Maka, kelompok anak muda yang didominasi Gen-Z dan Millennial yang termasuk kategori usia produktif merupakan pengguna kanal media informasi terbanyak dengan tingkat penetrasi internet yang tinggi, baik untuk kepentingan pekerjaan, belajar, dan keperluan lainnya.

Anak muda sebagai pengguna internet terbanyak menjadi salah satu potensi yang diandalkan untuk menakar identitas budaya dalam modernitas, mengingat teknologi informasi hadir dengan peluang dan tantangan. Peluangnya adalah anak muda mampu mengoptimalkan teknologi informasi untuk menumbuhkan kapasitas inovatif, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, mempromosikan kekhasan daerah masing-masing dan memberitakan peristiwa yang dapat dipastikan kebenaran faktualnya. Dengan demikian, anak muda mampu menampilkan identitas keindonesiaan yang menyatukan seluruh anak bangsa dari Sabang sampai Merauke, dari Rote sampai Miangas. Tantangan yang dihadapi adalah potensi kemunduran moral dan ketidakmampuan berpikir kritis. Ragam kekerasan disajikan hampir setiap hari dan sebagian mengakui mempelajari tentang aksi kekerasan dari internet. Kemudian, atas nama kebebasan berpendapat, setiap individu mudah menyebarkan informasi tanpa dipastikan kebenaran dan sumbernya, semakin banyak pihak terbiasa menyebarkan hoax,

Oleh:
Dr. Lestari Moerdijat, SS.,MM.
Wakil Ketua MPR RI



menjadi penyulut kebencian, dan menggunakan kemudahan teknologi untuk memupuk kejahatan.

Modernitas, idealnya mendorong setiap individu meninggalkan habitus primordial, melalui paradigma berpikir modern yang mengedepankan rasio, emosi dan seni. Pada kenyataannya, manusia terancam kehilangan nilai karena cenderung tunduk pada “perintah” mesin dan kultur instan yang menular setiap detik. Fenomena dunia modern penuh “drama” membutuhkan observasi dengan pandangan segar dan baru dari setiap elemen baik individu maupun institusi untuk merefleksikan kembali arti menjadi manusia Indonesia.

Elegan dalam Jubah Kebudayaan

Memaknai frasa “menjadi manusia Indonesia” berarti memiliki kemauan untuk menyelami kedalaman sejarah bangsa, merefleksikan identitas budaya dengan kekayaan nilai yang terus diwariskan lintas generasi, memupuk kebanggaan pada seni dan budaya bangsa secara berkelanjutan. Indonesia sebagai negara dengan keberagaman budaya, bahasa, suku, agama dan kekayaan intelektual “menuntut” generasi milenial - gen Z untuk mengutamakan perhatian pada pelestarian setiap atribut keberagaman yang ada. Media sosial mesti menjadi kanal yang diisi dengan pembicaraan dalam rangka mempromosikan kekayaan budaya, salah satu cara memperkenalkan dan mempertahankan warisan leluhur dalam laju teknologi. Anak muda dengan keterampilan teknis dalam penggunaan kanal maupun aplikasi kekinian dapat menjadi penakar identitas budaya dalam modernitas.

Menakar identitas berarti menentukan porsi, menetapkan posisi, dan mencegah distorsi budaya dengan menguatkan akar pemahaman budaya Nusantara agar mampu menerima kebaruan yang ditawarkan tanpa tercerabut dari identitas dan tradisi. Menjadi penakar identitas bertujuan meneguhkan kehendak untuk menjaga keragaman budaya berdasarkan kesadaran dan pemikiran mendalam pada gejala realitas sosial virtual. Dari gejala yang ada, dapat dicerna bahwa kehidupan dunia dengan ketidakpastian kini, dikenal dengan age of anxiety, kental dengan budaya terburu-buru, keputusasaan, kekhawatiran, ketakutan dan pesimisme pada masa depan, menuntut penyesuaian sikap.

Berhadapan dengan segala dampak perubahan, tugas anak-anak muda adalah memperkokoh harapan. Harapan dapat ditumbuhkan melalui konsistensi mengimpelentasikan nilai-nilai kebangsaan dan budaya yakni spiritualitas, kemanusiaan, persatuan, dialog menuju kesejahteraan bersama. Dengan demikian, anak muda luput dari jebakan fear of missing out (FOMO) karena tetap elegan dalam jubah kebudayaan dan kebangsaan. Anak muda menjadi kelompok

yang diandalkan untuk menjaga dan mempertahankan harmoni nilai budaya dengan teknologi, agar adaptasi pada kemajuan tetap berpijak pada warisan nilai sebagai panduan kehidupan modern.

Dengan berpijak pada warisan nilai, anak-anak muda membangun sikap solid dalam setiap keterhubungan sosial, realistis menghadapi kenyataan dan tetap ekspresif pada ruang virtual. Sikap solid, realistis dan ekspresif memungkinkan terbentuknya kehendak untuk memelihara tradisi nilai sekaligus memupuk kemampuan inovasi. Inovasi yang tercipta tidak menghapus tradisi justru menunjukkan kekayaan karya intelektual yang dapat ditonjolkan secara elegan. Sikap elegan menandakan bahwa nilai budaya dan bangsa yang ditetapkan sebagai konsensus pada masa lalu sesungguhnya memiliki visi masa depan, karena diimplementasikan pada kekinian.

Penutup

Dengan demikian kebiasaan scrolling menjadi berarti, karena kita memiliki tujuan menyatukan pemahaman akan nilai kebangsaan dan budaya, kemudian membentuk habitus berada dan bertindak sebagai manusia Indonesia. Kesepahaman dan keberadaan akan nilai kemanusiaan Indonesia kemudian ditumbuhkan sebagai model mental kebanggaan akan bentangan pulau dengan kekayaan internal kelompok manusia yang berbudaya, maupun unsur eksternal berupa sumber daya alam berlimpah.

Anak muda dengan predikat melekat sebagai penakar budaya menjadi cermin bagi setiap institusi perumus kebijakan publik untuk mementingkan kehidupan manusia yang berbudaya, di samping tujuan ekonomis yang berorientasi pada peningkatan keadilan dan sejahtera. Peran anak muda dalam konteks tersebut menjadi penghubung kunci antara budaya, penciptaan perdamaian dan pemahaman antar keberagaman. Anak muda dapat mencegah degenerasi karena mampu beradaptasi pada perkembangan dunia, menghilangkan bias tendensius penyangkalan atas kebenaran, mengedepankan sikap kooperatif, memerhatikan prinsip resiprositas dalam kehidupan sosial, mempertahankan solidaritas, mengutamakan nalar dan etika, serta berpijak pada budaya bangsa pembentuk identitas diri dan komunitas.

Anak muda dengan tugas menakar budaya dalam modernitas menjadi komponen kritis untuk merawat dan memahat kemanusiaan suatu bangsa, khususnya Indonesia. Melalui kapabilitas individual, sosial dan spiritual, anak muda tetap elegan dalam jubah kebudayaan sebagai peneguh harapan kemanusiaan dan pemimpin masa depan. □

Mengantisipasi Bila Pemilu Tak Tepat Waktu

Sebagai Ketua MPR, Bambang Soesatyo, memang termasuk sangat produktif dalam menulis buku. Di penghujung atau di awal tahun, dia menulis dan menerbitkan buku berjudul: 'Konstitusi Butuh Pintu Darurat, Urgensi Memulihkan Wewenang Subjektif Superlatif MPR.' Di buku itu dikupas solusi atau pintu darurat bila bangsa ini mengalami kekosongan kekuasaan akibat pemilu yang tidak tepat waktu.

DI AKHIR tahun 2023 atau di awal tahun 2024 telah tercetak buku yang mengulas tentang 'pintu darurat' konstitusi. Buku karya Ketua MPR Dr. H. Bambang Soesatyo, SH., SE., MBA., itu bisa menjadi petunjuk jalan keluar ketika bangsa ini tertimpa sesuatu kejadian yang luar biasa, seperti pemilu tidak bisa dilaksanakan tepat waktu. Sehingga, menjadi pertanyaan siapa yang akan memperpanjang jabatan anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD, serta jabatan Presiden dan Wakil Presiden.

Bila pemilu tidak tepat waktu, menurut politisi Partai Golkar di buku itu, akan berkonsekuensi adanya kekosongan, karena pemerintah telah demisioner dan masa bakti anggota legislatif pun berakhir. Kekosongan terjadi karena produk pemilu yang meliputi presiden dan wakil presiden serta anggota legislatif dari tingkat pusat hingga daerah belum terpilih. Manakala kemungkinan ini terjadi, negara bangsa terperangkap dalam kondisi darurat akibat kebuntuan konstitusi.

Kedaruratan yang demikian, menurut pria yang akrab disapa Bamsuet itu, tak bisa dihindari karena tidak ada lembaga yang memiliki kuasa dan kewajiban hukum untuk mengatasi situasi. "Belum ada ketentuan dalam konstitusi tentang tata cara pengisian jabatan publik saat terjadinya kekosongan akibat pemilu yang tidak tepat waktu," ujar alumni Program Doktor Universitas Padjadjaran itu.

Di buku yang berjudul: *Konstitusi Butuh Pintu Darurat, Urgensi Memulihkan Wewenang Subjektif Superlatif MPR* itulah kita diberi jalan untuk mengatasi dan mengisi kekosongan kekuasaan. Buku yang bersampul gambar diri Bambang Soesatyo itu memiliki ketebalan 288 halaman.

Pada bagian awal buku ini, berisi kupasan tentang Ketetapan (Tap) MPR, Perubahan, Kedudukan, dan Wewenang. Politisi Partai Golkar itu di buku ini memang banyak mengupas tentang kekuatan hukum yang dimiliki oleh MPR agar pembaca paham dan mengerti mengapa memulihkan wewenang subjektif superlatif menjadi urgensi.

Di *Prakata* diungkap. Eliminasi atas wewenang subjektif superlatif

dari MPR sama artinya dengan reduksi atas kekuasaan tertinggi yang melekat pada rakyat yang berdaulat. Kuasa menetapkan arah negara-bangsa oleh rakyat berdaulat patut dipulihkan untuk melengkapi terpenuhinya kuasa memilih presiden dan kuasa memilih anggota parlemen.

Lebih lanjut diungkap di halaman 9, pemahaman pada makna kedaulatan rakyat hendaknya utuh, jangan sepotong-potong. Begitu pun dengan penerapan atau manifestasi rakyat itu sendiri. Haruslah utuh dan sepenuhnya.



Untuk memulihkan wewenang subjektif superlatif MPR, penulis menyodorkan dua solusi, yakni: *pertama*, mengembalikan dan menyempurnakan kekuatan tertinggi rakyat untuk membuat Tap MPR sebab Tap MPR patut dimaknai dan diterima sebagai sebuah rumusan aspirasi terbaik menurut semua elemen masyarakat negara-bangsa.

Bamsuet menyebut, bukankah untuk memenuhi berbagai aspek kepentingannya, rakyat selalu didorong untuk proaktif dalam proses merumuskan ragam kebijakan strategis. Ditegaskan, lebih dari itu, setiap kebijakan strategis yang terbit dan diberlakukan melalui Tap MPR patut dipahami sebagai sebuah inisiatif yang tujuannya semata-mata

demi kebaikan bersama semua elemen rakyat negara-bangsa. Sebab, kebijakan strategis atau Tap MPR itu lahir dari kesepakatan semua elemen rakyat dalam majelis permusyawaratan dan perwakilan yang konstitusional.

Kedua, dari kemauan memulihkan wewenang subjektif superlatif pada MPR adalah menyempurnakan serta mempertegas lagi hak rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pemberi mandat dengan kewajiban presiden sebagai mandataris rakyat melaksanakan mandat rakyat. Dengan penegasan akan hak dan kewajiban itu, presiden selaku mandataris rakyat menjadi benar-benar bermakna strategis dan konstitusional. □

AWG

Generasi Z Tulis Buku Pancasila

Ahmad Basarah Optimis Ideologi Negara Terus Menyala



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR Ahmad Basarah mengaku, bahagia dan optimistis ideologi negara Pancasila terus menyala di setiap jiwa komponen bangsa. Terbukti dengan ditulisnya buku tentang Pancasila oleh Maulana Fajri, mahasiswa kelahiran tahun 2002. Dia berharap, lelaki Generasi Z ini melakukan diseminasi Pancasila di banyak kampus di Indonesia.

"Saya tak punya wewenang untuk melarang atau memerintah seseorang menulis buku tentang Pancasila, meski objek buku itu adalah berita-berita tentang Pancasila yang bersumber dari saya sebagai politisi sekaligus pejabat publik. Saya malah optimistis, ada Generasi Z peduli Pancasila," ujar Ahmad Basarah dalam acara launching buku "Media, Propaganda, Kolaborasi Politisi: Studi Kasus Publisitas Ahmad Basarah Bumikan Pancasila" di Universitas Negeri Malang (UNM), Malang, Jawa Timur, Jumat (9/2/24).

Ketua Fraksi PDI Perjuangan itu awalnya mengaku terkejut ada anak Generasi Z sangat menaruh perhatian terhadap semua *press release* yang ia sebar di media massa, yang dalam penilaiannya rata-rata mengulas urgensi Pancasila. Berbekal semua berita itu,

lanjut Ahmad Basarah, mahasiswa strata satu Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta itu membuktikan secara ilmiah dalam skripsinya bahwa terdapat kolaborasi positif antara dirinya sebagai politisi dengan media massa.

"Jarak antara Generasi Z dengan masa kelahiran Pancasila itu sangat jauh. Menurut studi, generasi ini asyik dengan gadget mereka, yang dengan itu mereka bergaul dengan masyarakat dunia tanpa batas-batas negara. Pikiran mereka berorientasi transnasional. Jadi, kalau ada di antara generasi ini peduli pada ideologi negara dan nasionalisme, saya amat sangat bangga," jelas Ahmad Basarah dalam sambutannya.

Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Malang Raya ini menambahkan, selain menjadi politisi, dia juga seorang akademisi yang mengajar di Universitas Islam Malang, Universitas Kristen Indonesia (UKI) di Jakarta, dan beberapa kampus lain. "Politisi murni cenderung memikirkan diri sendiri untuk kemenangan elektoral. Seorang negarawan memikirkan bangsa dan negaranya. Pilihan saya untuk menekuni Pancasila adalah jalan sunyi yang tak semua orang mau menekuninya, meski sekarang mulai dicatat oleh dunia



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

akademis,” jelas Ahmad Basarah.

Acara launching buku yang dihadiri Plt. Sekjen MPR RI Siti Fauziah ini dilanjutkan dengan diskusi buku, menampilkan empat pembicara masing-masing Rektor UNM Prof. Dr. Hariyono, Dekan FISIP Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang Dr. Agung Suprojo, Ketua PWI Malang Cahyono, dan Maulana Fajri sebagai penulis buku. Direktur Pusat Kajian Pancasila, Syaiful Arif, tampil sebagai moderator.

Menurut Hariyono, penerbitan buku tentang Pancasila oleh mahasiswa strata satu ini sangat menginspirasi kampus yang dipimpinnya, agar mahasiswa tempat dia mengajar juga menulis buku seperti Maulana Fajri. “Apalagi yang menjadi objek kajian adalah

pikiran-pikiran Ahmad Basarah, itu sudah tepat,” tegas mantan Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) itu.

Sedangkan Agung Suprojo berpendapat, jika ada puluhan saja Generasi Z dan Generasi Milenial peduli pada Pancasila, generasi tua yang selama ini berkutat melakukan sosialisasi Pancasila bisa hidup nyaman sebab ideologi negara dijamin aman dari setiap perbenturan ideologi-ideologi dunia.

“Acara sosialisasi Empat Pilar kali ini unik. Biasanya generasi muda hanya jadi objek. Kali ini ada Generasi Z lewat bukunya justru menjadi subjek yang menyebarkan nilai-nilai Pancasila,” tutur Siti Fauziah. □





MPR
RUMAH KEBANGSAAN
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA
DAN KEDAULATAN RAKYAT



MPR
RUMAH KEBANGSAAN
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA
DAN KEDAULATAN RAKYAT



PANCASILA

